



BADAN POM



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR POM DI BANDUNG



2020





TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA TAHUN 2020

Penanggung Jawab

Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si., Apt., M.Si.

Pengarah

- ❖ Ir. Rusiana, M.Sc.
- ❖ Dra. Rera Rachmawati, Apt.
- ❖ Endang Yaya Suwarya
Anggadiharja, S.Si., Apt.
- ❖ Alex Sander, S.Farm, Apt., MH
- ❖ Jajat Setia Permana, S.Si, Apt.,
M.Si.
- ❖ Illtizam Nasrullah, S.Si, Apt., M.Si.

Ketua

Dwi Kurniasari, S.Si., Apt.

Wakil Ketua

- ❖ Leni Maryati, S.Si., Apt., M.Si
- ❖ Agung Purwanto, S.Si., MLQAM.

Sekretaris

Fadli Reizandi, A.Md.

Anggota

- ❖ Dra. Sri Prihatin, Apt., MM.
- ❖ Insan Nurul Padjar, S.Si., Apt.
- ❖ Puji Astuti, S.Si., Apt.
- ❖ Imas Ridawati, S.Si., M.Si.
- ❖ R. Oppy Sophiawaty, S.Si., Apt.
- ❖ Dra. Iis Siti Suwaidah, Apt.
- ❖ Aini Ratnawati, S.Si., Apt
- ❖ Dra. Iis Susilawati Rosid, Apt., M.Si.
- ❖ Fitria Augustin Trirahmadani, S.Si.,
Apt.
- ❖ Dra. Atiek Liestyaningsih, Apt
- ❖ Siti Aminah, S.Si., Apt., M.Si.
- ❖ Alia Kadarsih Abubakar, S.Si., Apt.
- ❖ Yenny Nina Febriyanthi Kembaren,
S.Si., Apt.
- ❖ Lintang Kusumawardani, SH
- ❖ Ernitasari Sipayung, S.Si, Apt
- ❖ Ratna Kumalasari, S.Farm., Apt.
- ❖ Heri Kuswanto, S.Farm., Apt.
- ❖ Ria Fitriana, S.Si., M.Si.
- ❖ Arief Nugroho, S.Farm., Apt.
- ❖ Elly Yanti, ST
- ❖ Agung Kurniawan, A.Md.
- ❖ Lutfi Rizki Andriansyah, S.Sos.
- ❖ Andi Hakim, S.Sos
- ❖ Widi Astuti, A.Md
- ❖ Fajar Sukma Perdana, S.Si
- ❖ Dian Ratih Mustikaningayu,
S.Farm., Apt
- ❖ Berlian Dwi Nuriyana Hidayanti,
S.Farm., Apt
- ❖ Alfi Maghfiroh, S.H.
- ❖ Agung Gunawan Prakoso, A.Md



KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 dapat diselesaikan. Tahun 2020, merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Pada tahun 2020, terjadi beberapa isu strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Balai Besar POM di Bandung. Namun, hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan tetapi dijadikan sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka “menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat”.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2020 maka disusunlah Laporan Kinerja (LAPKIN) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 ini. LAPKIN disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.21.04.15.2163 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Addendum Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar/Balai POM serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.




LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 memiliki dua fungsi utama yaitu (1) merupakan sarana bagi Balai Besar POM di Bandung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (2) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*), baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung. Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai.

Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada pemberi mandat dan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung pada masa yang akan datang.

Bandung, Februari 2021

Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung



Sonyani Chandrawati Anwar, S.Si, Apt., MSi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i		
DAFTAR ISI	iii		
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv		
HIGHLIGHT	viii		
<hr/>			
Bab 1	1.1	LATAR BELAKANG	1
Pendahuluan	1.2	GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
	1.3	STRUKTUR ORGANISASI	4
	1.4	ISU STRATEGIS	5
<hr/>			
Bab 2	2.1	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	16
Perencanaan Kinerja	2.2	RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020	23
	2.3	PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020	24
	2.4	RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2020	26
	2.5	METODE PENGUKURAN	28
<hr/>			
Bab 3	3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
Perencanaan Kinerja	3.2	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020	199
<hr/>			
Bab 4	4.1	KESIMPULAN	207
Perencanaan Kinerja	4.2	SARAN	209
<hr/>			
LAMPIRAN			210
DAFTAR TABEL			228
DAFTAR GRAFIK			230
DAFTAR GAMBAR			234





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama triwulan tahun 2020. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung selama tahun 2020 yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yaitu :

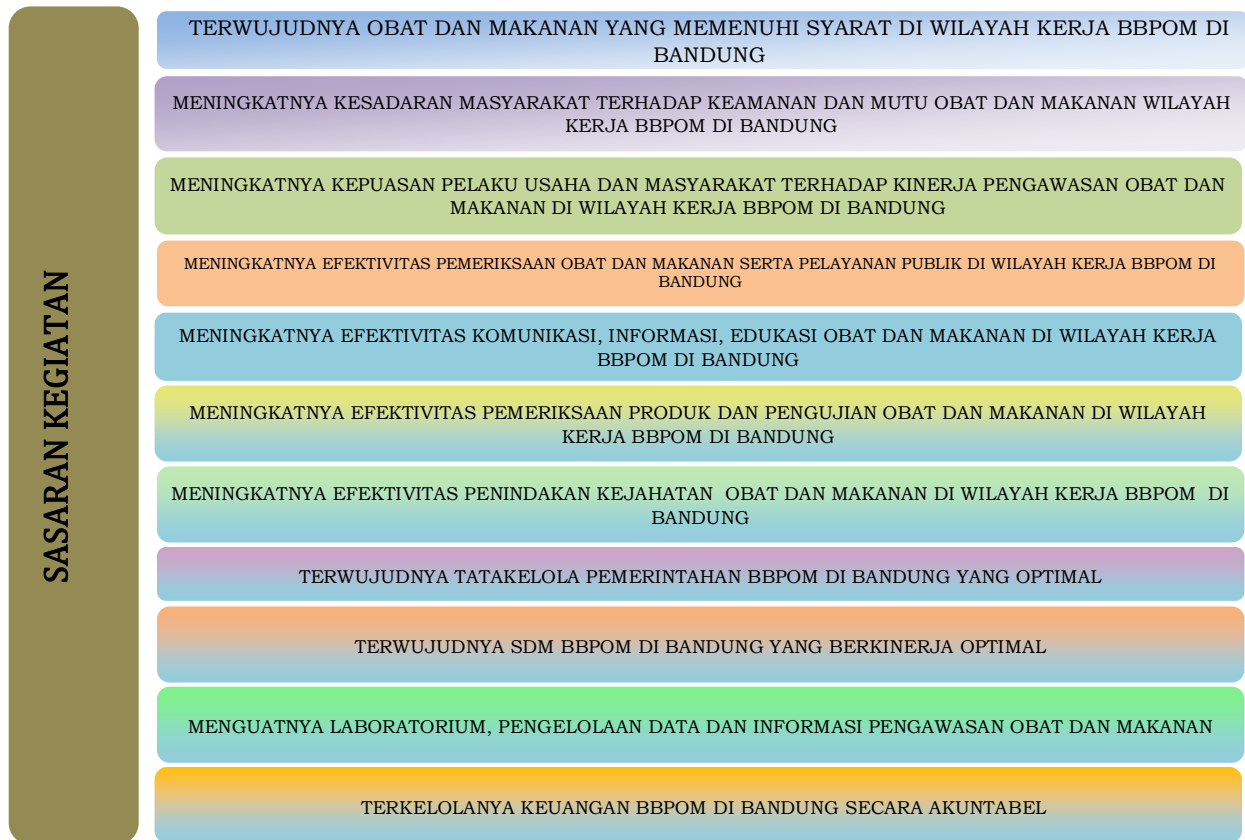
- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di Bandung dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung



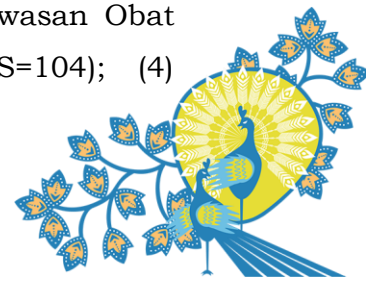
LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

Tahun 2020, telah ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Bandung.



Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Balai Besar POM di Bandung yang telah ditetapkan pada tanggal 02 Juni 2020. Perjanjian kinerja tersebut merupakan ikhtisar Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024.

Dari 11 (sebelas) sasaran strategis dengan rincian : Kategori **SANGAT BAIK**, 1 (satu) sasaran kegiatan, yaitu : (10) Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan (NPS=113). Kategori **BAIK**, 9 (sembilan) sasaran kegiatan, yaitu : (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung (NPS=104); (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung (NPS=94); (3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung (NPS=104); (4)



Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung (NPS=105); (5) Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung (NPS=101); (6) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung (NPS=109); (8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal (NPS=94); (9) Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal (NPS=105); dan (11) Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel (NPS=106). Kategori **CUKUP**, 1 (satu) sasaran kegiatan, yaitu : (7) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung (NPS=84). Sebanyak 16 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan seluruh kegiatan tersebut efektif, Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah KIE Obat dan Makanan Aman (KIE) (TE=0,26) dan Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan (TE=0,14). Sedangkan nilai TE terendah adalah Layanan Sarana dan Prasarana Internal (TE=-0,00).

Pada Tahun 2020, anggaran Balai Besar POM di Bandung sebesar Rp. 47.974.243.000,- (Empat puluh tujuh miliar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp.46.499.251.688,- (Empat puluh enam miliar empat ratus Sembilan puluh sembilan juta Dua ratus lima puluh satu ribu Enam ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 96,93%.

Dari capaian-capaian yang belum dapat memenuhi target kinerja tersebut Balai Besar POM di Bandung, Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain :

- a. Melakukan perbaikan yang lebih menyeluruh atas komponen reformasi birokrasi seperti kapasitas dan akuntabilitas, organisasi pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik sehingga terwujud Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Besar POM di Bandung.
- b. Pengembangan layanan publik bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan Mall



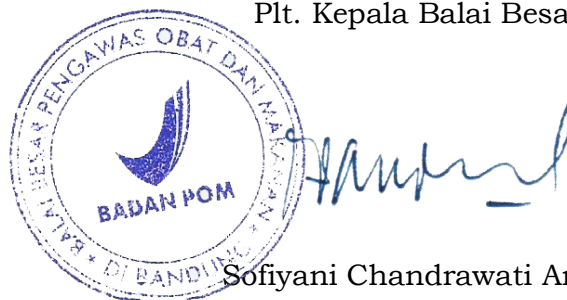
Pelayanan Publik yang ada untuk mendekatkan layanan publik (layanan informasi dan pengaduan) kepada masyarakat

- c. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta melakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya lebih efektif dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Barat
- d. Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, baik melalui kegiatan rutin pengawasan dan penindakan BBPOM BANDUNG maupun kerjasama dengan lintas sektor
- e. Pendampingan UMKM agar dapat meningkatkan kualitas sarana dan produk pangan skala rumah tangga hingga mendapatkan nomor registrasi MD dari Badan

Hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Balai Besar POM di Bandung, Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor untuk dapat memperlihatkan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Bandung, Februari 2021

Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandung



Sofiyani Chandrawati Anwar, S.Si, Apt., MSi





BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

1.4 ISU STRATEGIS

1.1

LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2020 dan awal dari Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai Besar POM di Bandung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

1.2

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagai tindak lanjut, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM sebanyak 21 (dua puluh satu); b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM sebanyak 12 (dua belas); dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM sebanyak 40 (empat puluh).

KEDUDUKAN

UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Balai Besar POM di Bandung mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

**TABEL 1.1
UNIT PELAKSANA TEKNIS BPOM
PROVINSI JAWA BARAT**

UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
BBPOM di Bandung	Alamat Jl. Pasteur No. 25 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung	1. Kota Bandung 2. Kabupaten Subang 3. Kabupaten Cianjur 4. Kabupaten Garut 5. Kabupaten Bandung Barat 6. Kabupaten Majalengka 7. Kabupaten Sumedang 8. Kabupaten Bandung 9. Kabupaten Karawang 10. Kota Bekasi



UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
		11. Kabupaten Bekasi 12. Kabupaten Sukabumi 13. Kota Cimahi 14. Kota Sukabumi 15. Kabupaten Purwakarta 16. Kabupaten Cirebon 17. Kota Cirebon, 18. Kabupaten Indramayu 19. Kabupaten Kuningan
Loka POM di Kota Tasikmalaya	Alamat Jl. Dinding Ari Raya, Panglayungan, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya	1. Kota Tasikmalaya 2. Kabupaten Ciamis 3. Kabupaten Pangandaran 4. Kabupaten Tasikmalaya 5. Kota Banjar
Loka POM di Kabupaten Bogor	Alamat Jl. Raya Karanggan, Karanggan, Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor	1. Kabupaten Bogor 2. Kota Bogor 3. Kota Depok

1.3

STRUKTUR ORGANISASI

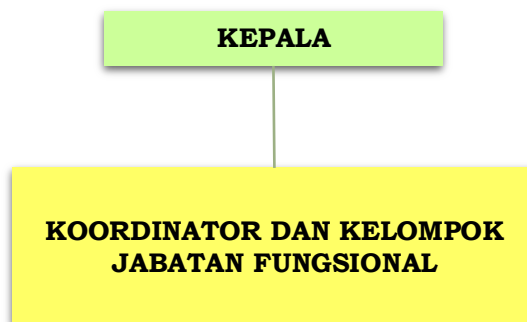
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung, Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diundangkan pada tanggal 7 September 2020.



GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI BBPOM DI BANDUNG



GAMBAR 1.2
STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM



1.4

ISU STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada tahun kerja 2020 maka muncul beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja, antara lain:



ISU INTERNAL

Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tersebut, terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPOM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Perpres tersebut di atas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan fungsi penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diberi kewenangan intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumberdaya Manusia

Balai Besar POM di Bandung memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional.

Luas lahan Balai Besar POM di Bandung seluas 4.268 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 5.686 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana adalah 78,1% yang terdiri dari pemenuhan alat laboratorium 61,7% dan pemenuhan sarana prasarana kerja 94,6%, sehingga masih diperlukan tambahan untuk penambahan alat laboratorium.

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium Balai Besar POM di



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

Bandung telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium pengujian dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-173-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu, laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai Besar POM di Bandung, masih terdapat gap sehingga pengadaan peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2019, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 62,4%.

ISU EKSTERNAL

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung adalah sebagai berikut :

Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Sebagaimana tertuang dalam PP no.72 Tahun 2012 tersebut, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai salah satu penyelenggara subsistem sediaan farmasi, dan makanan, dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan baik *pre-market* maupun *post-market* Obat dan Makanan sehingga dapat menjamin Obat dan Makanan yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu yang beredar memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh Balai Besar POM di Bandung, yaitu melalui :

- a) Upaya terkait jaminan aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar mulai dari pengawasan, pelaksanaan regulasi, pembinaan, penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, serta;
- b) Upaya terkait kemandirian pelaku usaha Obat dan Makanan.



Fokus sistem kesehatan nasional tahun 2021 dengan berkaca pada terjadinya Pandemi covid-19 menurut Bappenas akan menjadi salah satu *major project* dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Adapun fokus penguatan Sistem Kesehatan Nasional di 2021 antara lain penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), penguatan ketahanan kesehatan dan penguatan sumber daya melalui pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan. Balai Besar POM di Bandung sebagai UPT dari Badan POM memegang peranan penting di ketiga fokus penguatan ini, diantaranya dalam memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) untuk mengkampanyekan GERMAS pada masyarakat, memperkuat sistem pengawasan dengan penguatan kapasitas dan jejaring laboratorium serta pengawalan dalam pemenuhan vaksin dan obat, termasuk vaksin covid-19

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Selain peningkatan jumlah obat yang akan diregistrasi, jenis obat pun akan sangat bervariasi. Hal ini, disebabkan adanya peningkatan demand terhadap obat sebagai salah satu produk yang dibutuhkan. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya permintaan obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB. Dalam hal ini tuntutan terhadap peran Balai Besar POM di Bandung akan semakin besar, antara lain adalah peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar. Seiring dengan penerapan JKN, akan banyak industri farmasi yang harus melakukan resertifikasi CPOB yang berlaku 5 (lima) tahun. Dari sisi penyediaan (supply side) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian BPOM harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan



(penguji dan inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan naiknya beban kerja.

Implementasi JKN dalam menghadapi Pandemi covid-19 pada tahun 2020 juga memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada pengawasan Obat dan Makanan. Meningkatnya kapasitas produksi industri farmasi maupun obat tradisional yang menghasilkan Vitamin, Suplemen Kesehatan, Obat Tradisional, juga industri kosmetik yang menggunakan fasilitas produksinya bersamaan dengan produksi hand sanitizer menyebabkan dampak langsung pada Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandung sebagai UPT dari Badan POM. Sementara dampak tidak langsungnya ke masyarakat membuat Balai Besar POM di Bandung harus lebih giat dalam memberikan KIE mengenai cara konsumsi vitamin, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang benar; karena pastinya konsumsi produk ini akibat pandemi meningkat cukup signifikan.

Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan. Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional yang memungkinkan terbentuknya suatu kawasan bebas perdagangan. Hal ini membuka peluang produk Obat dan Makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar regional. Oleh karena itu diharapkan industri farmasi, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri mampu meningkatkan daya saing terhadap produk luar negeri. Hal tersebut juga berdampak pada pertumbuhan sektor industri Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2019 terdapat 88 industri farmasi, 54 industri Obat Tradisional, 24.291 industri PKRT, 187 industri kosmetik, 1802 industri suplemen makanan, 104 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), 141 industri alat kesehatan dan 926 Industri Pangan. Hal tersebut merupakan potensi bagi Balai Besar POM di Bandung dalam pemantapan stakeholder untuk memberikan bimbingan dan pembinaan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha.

Pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan di Propinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan . Hal ini menjadi peluang bagi Balai Besar POM di Bandung untuk ikut serta dalam meningkatkan daya saing industri tersebut dalam menghadapi pasar global. Namun disisi lain, timbul permasalahan era perdagangan bebas yaitu masuknya produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

Apabila dibandingkan pertumbuhan sektor industri di bidang Obat dan Makanan dengan SDM yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Bandung, sampai dengan tahun 2014 presentase pemenuhan SDM sesuai beban kerja hanya 76,97%. Sedangkan pemenuhan SDM sesuai beban kerja tahun 2015 berdasarkan Renstra tahun 2015-2019 hanya sebesar 44,48 %. Jumlah SDM yang tidak sebanding ini menjadi tantangan yang sangat besar dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Pandemi covid-19 yang kemudian mendatangkan vaksin dari Tiongkok juga merupakan bukti bahwa Badan POM terlibat dalam komitmen internasional, yang akhirnya menantang UPT-nya termasuk Balai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM-nya terutama dalam hal pengawalan distribusi vaksin dan pengujian sampel swab antigen dan RT-PCR.

Berdasarkan hal ini, Balai Besar POM di Bandung harus menyusun strategi agar kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dapat terlaksana secara optimal, dan juga menerapkan sistem manajemen kinerja secara optimal sehingga lebih efektif dan efisien. Namun demikian, Balai Besar POM di Bandung memiliki kelebihan yang dapat dipergunakan, yaitu adanya pedoman pengawasan yang jelas sebagai acuan dan standar baku dalam pengawasan atas Obat dan Makanan. Selain itu, Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 dan SNI ISO/IEC 17025: 2017.

Perubahan Iklim

Ancaman perubahan iklim dunia, akan semakin dirasakan oleh sektor pertanian khususnya produk bahan pangan di Indonesia. Perubahan iklim dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan pangan yang berkualitas, sehat, bermanfaat, dengan harga yang kompetitif. Dari sisi ekonomi makro, industri makanan dan minuman di masa yang akan datang perannya akan semakin penting sebagai pemasok pangan dunia. Selain dari sisi pangan, perubahan iklim juga dapat mengakibatkan munculnya bibit penyakit baru hasil mutasi gen dari beragam virus. Bibit penyakit baru tersebut diantaranya virus influenza yang variannya sekarang menjadi cukup banyak dan mudah tersebar dari satu negara ke negara lain.

Menurut Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) tahun 2013, dalam pelaksanaan kajian dan pemetaan model kerentanan penyakit infeksi akibat perubahan iklim, terdapat tiga penyakit yang perlu mendapat perhatian khusus terkait perubahan iklim dan perkembangan vektor yaitu Malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Diare. Selain dari ketiga jenis penyakit tersebut, masih ada lagi penyakit yang banyak ditemukan akibat adanya perubahan iklim seperti, Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dan penyakit batu ginjal.



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

Di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023, salah satu misinya memiliki tujuan meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan.

Hal ini merupakan tindak lanjut pemerintah daerah dalam mencapai target yang ditetapkan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) di sektor kesehatan yaitu diantaranya mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air dan penyakit menular lainnya. Untuk mencapai target tersebut pasti akan diimbangi dengan peningkatan jenis dan jumlah obat terkait penyakit-penyakit tersebut, dan ini semakin nyata dengan terjadinya Pandemi covid-19 sejak 2020 yang lalu.

Dengan adanya potensi permasalahan serta peluang dari proses perubahan iklim, diperlukan peran dari Balai Besar POM di Bandung dalam mengawasi peredaran varian obat baru dari jenis penyakit tersebut. Selain dari obat kimia, varian obat baru ini juga diikuti pula dengan varian obat herbal tradisional Indonesia dan Cina yang paling banyak beredar di pasar. Kondisi ini menuntut kerja keras dari Balai Besar POM di Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap perkembangan produksi dan peredaran obat tersebut.

Perubahan Demografi, Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Kemajuan dari ekonomi suatu provinsi dapat dilihat dari indikator makro-ekonomi, yakni pendapatan per kapita. Pada tahun 2018 PDRB per kapita atas harga berlaku Provinsi Jawa Barat sebesar 40,30 juta rupiah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 sebesar 37,18 juta atau naik sebesar 8,41 persen. Persentase jumlah penduduk miskin Jawa Barat juga mengalami penurunan dari tahun 2017 (7,86%) menjadi tahun 2018 (7,27%).

Hal ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli masyarakat yang secara teori dan fakta, bahwa semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memiliki standar dan kualitas. Faktor tersebut dapat menyebabkan kecenderungan perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat menimbulkan penurunan derajat kesehatan.

Pada tahun 2020, penduduk Jawa Barat berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yaitu sebanyak 48,27 juta jiwa, menjadikan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dalam hal jumlah penduduk terbesar. Terdiri atas laki-laki sebanyak 24,51 juta jiwa dan perempuan sebanyak 23,76 juta jiwa (Sumber: Badan Pusat Statistik - Jawa Barat dalam Angka 2020), menjadi tantangan bagi BBPOM di Bandung dalam perannya memberikan informasi dan edukasi publik mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.



Pertumbuhan jumlah penduduk dan bergesernya pola hidup masyarakat umum menjadi tantangan Balai Besar POM di Bandung untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin banyak jenis dan jumlahnya. Hal tersebut juga harus disertai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas edukasi terhadap masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai produk Obat dan Makanan yang aman.

Tuntutan masyarakat

Tuntutan masyarakat terhadap pangan yang semula hanya pada aspek harga, rasa dan tren gaya hidup, pada saat ini telah bergeser lebih kepada keamanan dan mutu pangan. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan semakin banyaknya lembaga perlindungan konsumen serta media informasi baik offline maupun online yang memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dalam memilih produk serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh konsumen.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Sistem Desentralisasi ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerjasama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk itu, agar tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Bandung berjalan dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintahan pusat dan daerah, antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dengan pihak swasta.

Disisi lain, pengakuan stakeholder akan keberadaan Balai Besar POM di Bandung semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan karena Balai Besar POM di Bandung tidak hanya telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal tetapi juga berperan aktif didalam berbagai forum instansi lainnya dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa diantaranya adalah Badan POM termasuk Balai Besar POM di Bandung sebagai Kelompok Kerja Keamanan Pangan Nasional di dalam Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT), Program Pembinaan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah, Program Pasar Aman dsari Bahan Berbahaya, Program Gerakan Keamanan Pangan Desa, dan sebagai narasumber dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

Balai Besar POM di Bandung juga melayani pengujian produk Obat dan Makanan dari pihak ketiga. Secara umum, pengujian dari pihak ketiga berasal dari instansi pemerintah dan masyarakat umum, antara lain kepolisian dan pelaku usaha. Hal tersebut menjadi peluang, khususnya bagi Laboratorium Balai Besar POM di Bandung dalam menjalin kerjasama dengan stakeholder sekaligus mendukung peningkatan daya saing pelaku usaha.

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi, baik teknologi produksi, distribusi dan pengembangan jenis produk, akan membawa dampak perubahan secara terus-menerus pada produk Obat dan Makanan. Hal ini harus menjadi perhatian dan antisipasi Balai Besar POM di Bandung untuk terus berinovasi dalam menghadapi perkembangan dan tuntutan yang ada. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai Besar di Bandung untuk dapat melakukan pelayanan online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Namun, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Bandung terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan yang dilakukan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi.

Sarana dan prasarana merupakan unsur penting dalam mendukung keberhasilan kegiatan dan untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan manajemen dan juga kegiatan teknis laboratorium. Laboratorium merupakan tulang punggung dari pengawasan Obat dan Makanan, oleh karenanya diperlukan sarana dan prasarana laboratorium yang lengkap mulai dari metode analisa, baku pembanding, reagensia sampai kepada peralatan yang memadai. Peralatan yang dimiliki masih belum memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan. Adalah fakta bahwa kemampuan dan kapasitas uji laboratorium Badan POM, termasuk Balai Besar POM di Bandung, belum memadai jika dibandingkan dengan beban kerja pengawasan Obat dan Makanan. Dengan perkembangan teknologi saat ini, tentu juga terkait erat dengan perkembangan teknologi di bidang pengujian, sehingga menjadi suatu tantangan tersendiri untuk laboratorium Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium dituntut untuk terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada terkait dengan produk dan metode analisis.

Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, mengingat juga masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandung. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015– 2019) menunjukkan tren penurunan terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada tahun 2015 jumlah sampel garam yang TMS sebesar 85% dan hingga tahun 2017 menjadi 81,62%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 54,82%. Sedangkan hasil pengawasan tepung terigu dan minyak goreng sawit dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015- 2019) menunjukkan relatif semua sampel yang diuji memenuhi syarat (MS).

Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya yaitu pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan, pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

Jejaring Kerja

Balai Besar POM di Bandung menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Balai Besar POM di Bandung mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga, baik di pusat, daerah, maupun internasional. Sebagai salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM, maka Balai Besar POM di Bandung sebagai bagian dari beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki BPOM yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, *Indonesia Rapid Alert System for Food and Feed* (INRASFF), Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal (Pusat dan Daerah), *Indonesia Criminal Justice System* (ICJS), dan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Di tingkat regional maupun internasional, BPOM memiliki jejaring kerja dengan *ASEAN Rapid Alert System for Food and Feed* (ARASFF), *World Health Organization* (WHO), *Codex Alimentarius Commission*, Forum Kerjasama Asia Pasifik dalam harmonisasi regulasi bidang obat (RHSC), *ASEAN References*



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

Laboratories (AFL), Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (PIC/S), dan International Crime Police Organization Interpol.

Balai Besar POM di Bandung melakukan pengembangan dan penguatan program pemberdayaan masyarakat melalui Food Safety Masuk Desa, PJAS, Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Selain itu, dilakukan pengembangan jejaring komunikasi melalui peningkatan komunikasi sosial melalui kegiatan Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (KIE) bersama tokoh masyarakat serta Iklan Layanan Masyarakat.

Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Bandung melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Pandemik Covid-19

Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi, termasuk Provinsi Jawa Barat, Setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakhiri pembatasan social berskala besar (PSBB) pada bulan Juni 2020 dan mulai menerapkan tatanan new normal, penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Jawa Barat alami peningkatan yang cukup tajam. Hal ini menjadi tantangan besar bagi BBPOM di Bandung dapat turut berkontribusi dalam percepatan penanganan covid-19 dan menjalankan tugas pengawasan Obat dan Makanan dalam masa pandemik-Covid-19 dengan membuat berbagai inovasi seperti layanan publik berbasis digital.





BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2020

2.5 METODE PENGUKURAN

2.1

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Renstra BPOM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kerjanya.

Secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri atas 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dan globalisasi. Isu kesehatan terkait Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta sehingga perlu peningkatan pengawasan Obat dan Makanan sebagai implikasi diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi dan otonomi daerah, agenda Sustainable Development Goals (SDGs), demografi, program fortifikasi pangan, serta perubahan iklim dunia. Adapun isu terkait globalisasi, utamanya tantangan menghadapi perdagangan bebas dan komitmen internasional, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, serta perkembangan teknologi.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai *impact assessment*.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Bandung, Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang



melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai Besar POM di Bandung telah menetapkan Visi 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.



Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

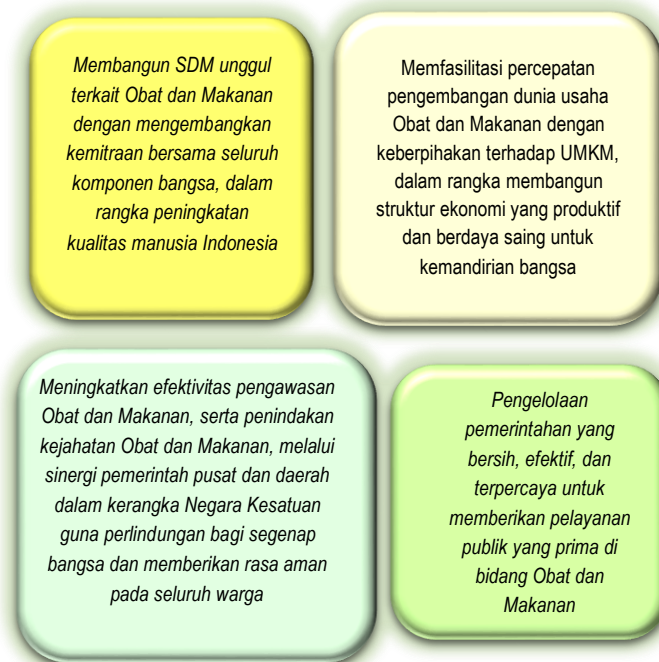
MISI

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Balai Besar POM di Bandung sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara *full spectrum* pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;



Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Bandung sebagai berikut:

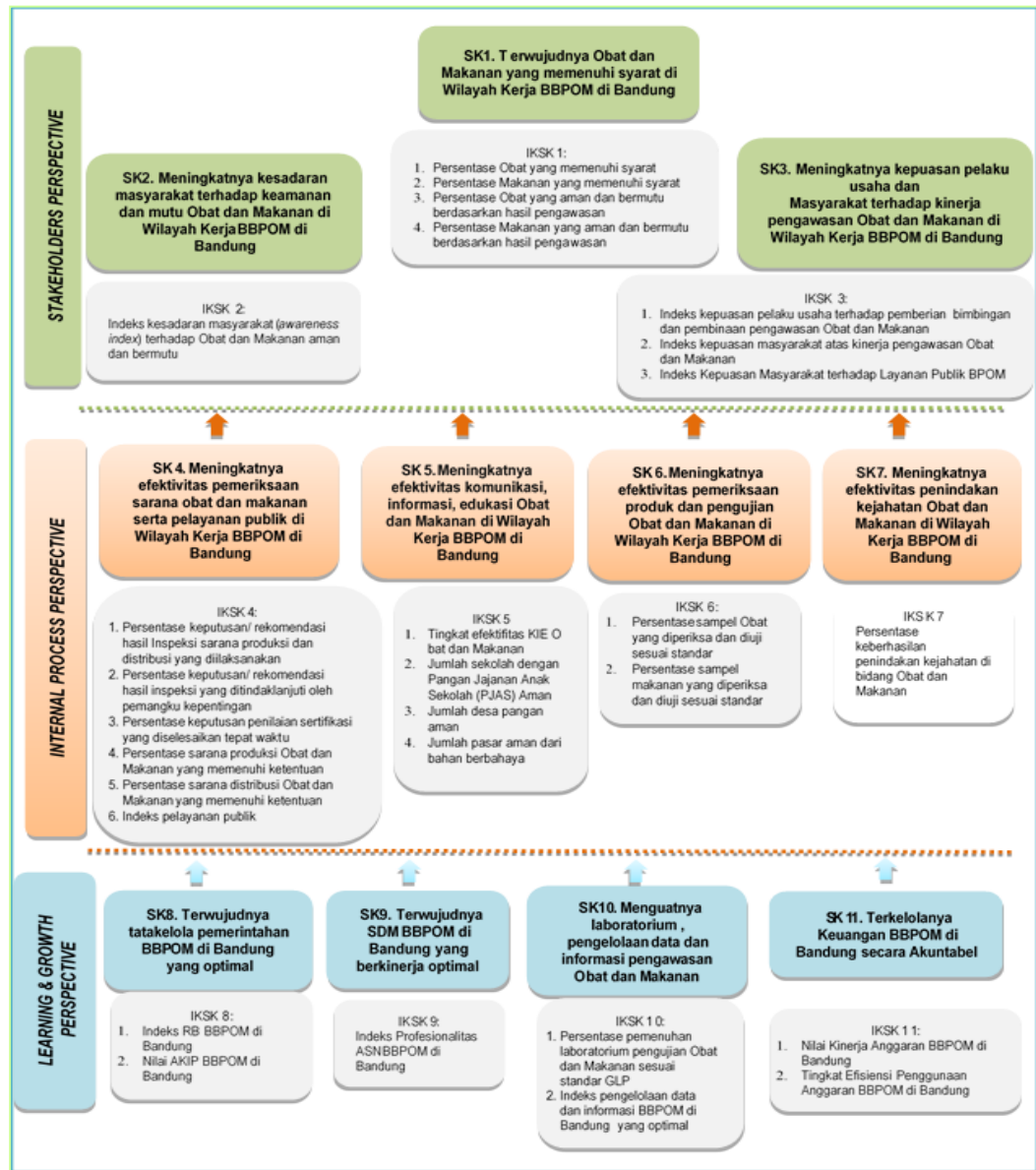


Gambar 2.1 Misi Balai Besar POM di Bandung 2020-2024



SASARAN KEGIATAN

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Bandung dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Bandung. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Bandung akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Balai Besar POM di Bandung berikut



Gambar 2.2 Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Bandung

Sumber: Konsensus BPOM



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, BBPOM di Bandung menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target sebagaimana disajikan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target BBPOM di Bandung
Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE						
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3
	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94
	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87,5	89
	7. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83
	8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92
INTERNAL PERSPECTIVE						
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9	63,9	70,9	78	85
	11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97
	12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70
	13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	14. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51
SK5. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83
	16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104
	17. Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47
	18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4	8	13	18	23
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94
	20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	84	86	88	90
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95
	23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90
	26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97
	28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)



2.2

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2020

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2020 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 mengalami perubahan terakhir dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Bandung Nomor. HK.02.02.103.1031.06.20.1060A tentang Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Bandung Nomor. HK.02.02.1031.12.19.3688 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020 sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.
Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Bandung
Tahun 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83
		7. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
		14. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,43
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		17. Jumlah desa pangan aman	6
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82
		20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Bandung	91
		23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76
		26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)

2.3

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020

Setelah penyerahan DIPA Balai Besar POM di Bandung Tahun Anggaran 2020, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 berdasarkan RKT Tahun 2020 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp. 47.101.471.000. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 sebagaimana tabel 2.3 berikut:



**Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja BBPOM di Bandung
Tahun 2020**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	29. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		30. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		31. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		32. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	33. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	34. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83
		35. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71
		36. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	37. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		38. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9
		39. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		40. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50
		41. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
		42. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	43. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,43
		44. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		45. Jumlah desa pangan aman	6
		46. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	47. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82
		48. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	49. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74



**LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2020**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	50. Indeks RB BBPOM di Bandung	91
		51. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	52. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	53. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76
		54. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	55. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93
		56. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)

Kegiatan :

Anggaran

1. Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Rp. 47.101.471.000

2.4

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2020

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2020 menyajikan target triwulan yang tercantum dalam PK Balai Besar POM di Bandung beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.4 berikut:

**Tabel 2.4
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)
Tahun 2020**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	80,8	80,8	80,8	542.172.000
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78	78	78	175.693.000
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	90	90	90	186.500.000
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	72	72	72	43.345.000
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				72	250.000.000



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				83	63.030.000
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				71	12.360.000
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung				88,5	118.060.000
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	113.270.000
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9	56,9	56,9	56,9	141.139.000
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	485.921.000
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	50	50	50	636.240.000
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	76	76	76	1.274.680.000
		14. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung				3,7	226.040.000
		15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		87,43	87,43	87,43	3.744.645.000
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Progress 20%	Progress 20%	Progress 50%	16	377.215.000
		17. Jumlah desa pangan aman	Progress 20%	Progress 65%	Progress 85%	6	685.850.000
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Progress 25%	Progress 60%	Progress 90%	2	167.885.000
		19. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	17,5	37,5	60	82	692.434.000
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22,5	42,5	65	82	429.280.000
		21. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	48	60	68	74	1.159.575.000
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di bandung				91	206.364.000
		23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung				81	1.857.087.000
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung				75	137.199.000
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				76	2.995.283.000



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dan Makanan	26. Persentase pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal		1,51	1,51	1,51	460.000.000
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	45	55	75	93	5.674.733.000
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	24.245.471.000

2.5

METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Bandung merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus dibawah ini:

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100 - \text{Realisasi})}{(100 - \text{Target})} \times 100\%$$









Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya **BUKAN DALAM %** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.5
KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

					
Tidak Dapat Disimpulkan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
X > 120%	110% ≤ X ≤ 120%	90% ≤ X < 110%	70% ≤ X < 90%	50% ≤ X < 70%	X < 50%





BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI











3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

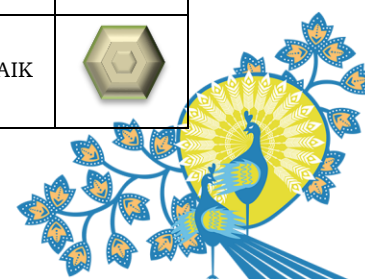
3.1


CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Seesuai dengan yang tercantum di dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Bandung tahun 2020 memuat 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Pencapaian keseluruhan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Bandung, Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor pada tahun 2020 secara lengkap adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2020

SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	
1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	104,42	BAIK	
2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	93,54	BAIK	
3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	104,24	BAIK	
4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	104,66	BAIK	
5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	100,94	BAIK	
6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	108,75	BAIK	
7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	84,23	CUKUP	
8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	93,76	BAIK	
9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	104,77	BAIK	
10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	113,27	SANGAT BAIK	



SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA
11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	105,50	BAIK 

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 28 indikator kinerja utama. Perbandingan target dan realisasi setiap indikator kinerja utama dari masing-masing sasaran kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

TABEL 3.2
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA CAPAIAN
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	80,80%	97,62%	120,82%	120,00%	Tidak dapat disimpulkan
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00%	76,80%	98,46%	98,46%	Baik
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%	94,49%	104,99%	104,99%	Baik
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00%	67,25%	93,40%	93,40%	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			104,42%	104,21%	BAIK
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung	5. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72,00%	67,35%	93,54%	93,54%	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			93,54%	93,54%	BAIK
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan	83,00	90,82	109,42%	109,42%	Baik



**LAPORAN KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA CAPAIAN
	kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	pembinaan pengawasan Obat dan Makanan					
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71,00	75,43	106,24%	106,24%	Baik
		8. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Bandung	88,5	85,91	97,07%	97,07%	Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			104,24%	104,24%	BAIK
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	87,00%	96,85%	111,32%	111,32%	Sangat Baik
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,90%	51,89%	91,20%	91,20%	Baik
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	86,51%	101,78%	101,78%	Baik
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%	56,59%	113,18%	113,18%	Sangat Baik
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00%	73,69%	96,96%	96,96%	Baik
		14. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	3,7	4,2	113,51%	113,51%	Sangat Baik
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			104,66%	104,66%	BAIK
5.	Meningkatnya efektivitas	15. Tingkat efektifitas KIE	87,43	90,70	103,74%	103,74%	Baik



**LAPORAN KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA CAPAIAN
	komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	Obat dan Makanan					
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16,00	16,00	100,00%	100,00%	Baik
		17. Jumlah desa pangan aman	6,00	6,00	100,00%	100,00%	Baik
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2,00	2,00	100,00%	100,00%	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN					100,94%	100,94%	BAIK
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82,00%	89,75%	109,45%	109,45%	Baik
		20. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82,0%	88,60%	108,05%	108,05%	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN					108,75%	108,75%	BAIK
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74,00%	62,33%	84,23%	84,23%	Cukup
NILAI PENCAPAIAN SASARAN					84,23%	84,23%	CUKUP
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Bandung	91,00	80,15	88,08%	88,08%	Cukup
		23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81,00	80,54	99,43%	99,43%	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN					93,76	93,76	BAIK
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	78,58	104,77%	104,77%	Baik
NILAI PENCAPAIAN SASARAN					104,77%	104,77%	BAIK
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76,00%	71,50%	94,08%	94,08%	Baik



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CAPAIAN (%) PENYESUAIAN	KRITERIA CAPAIAN
	Makanan	26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2,00	132,45%	120	Tidak dapat disimpulkan
NILAI PENCAPAIAN SASARAN					113,27%	107,04%	SANGAT BAIK
11.	Terkelolanya keuangan BBPOM di Bandung secara akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93,00	95,14	102,30%	102,30%	Baik
28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung		Efisien (92%)	Efisien (100%)	108,70%	108,70%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN					105,50%	105,50%	BAIK

Pada tahun 2020, terdapat satu (1) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria cukup yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung”, sasaran kegiatan tersebut diukur dengan satu (1) indikator yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan sasaran kegiatan ke-7.

Nilai Kinerja Organisasi Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 berdasarkan *Perspective Balance Score Card* sebesar 102, dengan rincian Nilai Kinerja *Stakeholder Perspective* (101); Nilai Kinerja *Internal Process Perspective* (100) dan Nilai Kinerja *Learning and Growth Perspective* (105), secara rinci sebagaimana tabel 3.3 berikut:

TABEL 3.3
NILAI KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN
PERSPECTIVE BALANCE SCORE CARD
TAHUN 2020

PERSPECTIVE	SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	NILAI PENCAPAIAN PERSPECTIVE
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	1. TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	104,42	100,73
	2. MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	93,54	
	3. MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	104,24	
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	4. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	104,66	99,65



PERSPECTIVE	SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	NILAI PENCAPAIAN PERSPECTIVE
	5. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	100,94	
	6. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	108,75	
	7. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG	84,23	
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL	93,76	104,33
	9. TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG BERKINERJA OPTIMAL	104,77	
	10. MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	113,27	
	11. TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG SECARA AKUNTABEL	105,50	
NILAI KINERJA ORGANISASI			101,57




Penjelasan mengenai kendala pencapaian dan upaya perbaikan untuk pencapaian target dapat dilihat pada penjelasan indikator kinerja di bawah ini

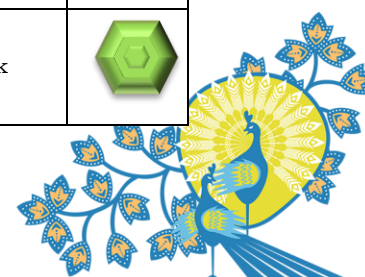
SASARAN KEGIATAN KE-1



TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar **104,42%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.4.

TABEL 3.4
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1
TAHUN 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	80,80%	97,62%	120,82%	Tidak dapat disimpulkan 
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78,00%	76,80%	98,46%	Baik 
3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	90,00%	94,49%	104,99%	Baik 




INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	72,00%	67,25%	93,40%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			104,42%	BAIK	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

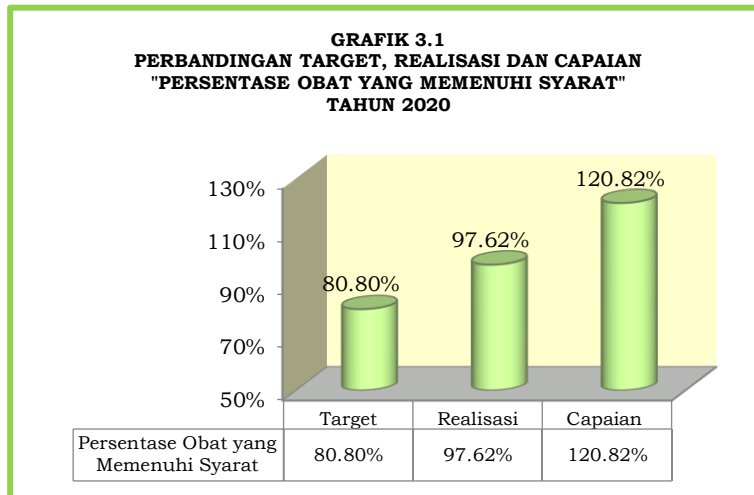
Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2020 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2020. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Sampel acak adalah sampel yang disampling terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun 2020. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, namun apabila termasuk poin 4, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

**TABEL 3.5
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT”
TAHUN 2020**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	80,80%	97,62%	120,82%	Tidak dapat disimpulkan	



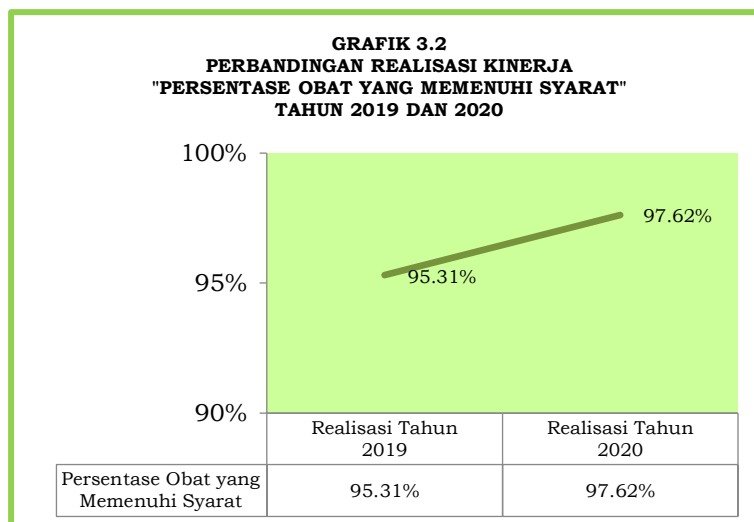
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020



Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80,80%. Sebanyak 1976 sampel acak telah diperiksa dan diuji dengan rincian sebanyak 1929 sampel memenuhi

syarat, 47 sampel tidak memenuhi syarat. Persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 97,62%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **120,82%** dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**. Hasil pengujian Obat yang TMS sebanyak 47 sampel yang terdiri dari TMK penandaan (27 sampel) dan TMS mutu pengujian (20 sampel). TMS mutu pengujian berasal dari Produk Obat, Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan. Parameter Uji TMS, meliputi uji Disolusi (Produk Obat), Angka Lempeng Total, Angka Kapang Khamir, Kadar air, Bahan Kimia Obat (Produk Obat Tradisional). Kadar Zat Aktif dan Kadar air (Produk Suplemen Kesehatan).

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019



Pada Tahun 2020, Definisi Operasional (DO) berbeda dengan DO tahun 2019. Pada tahun 2019, sasaran kegiatan 1 yaitu terwujudnya obat dan makanan yang bermutu di Provinsi Jawa Barat memiliki 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang

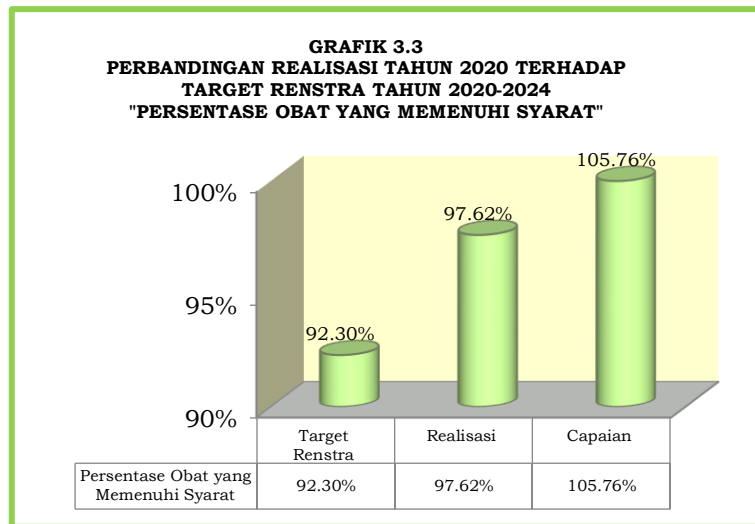
terdiri dari : Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat, Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat, Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat dan Persentase Makanan yang memenuhi syarat.



Sedangkan, pada Tahun 2020, Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2020 dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2020. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika.

Sehingga capaian untuk indikator sasaran kegiatan ini tidak dapat dibandingkan secara langsung. Namun, apabila diukur kembali realisasi kinerja tahun 2019 dengan menggunakan cara perhitungan indikator tahun 2020, maka diperoleh realisasi sebesar 95,31%. Hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan realisasi untuk indikator sasaran kegiatan ini. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 3.2.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

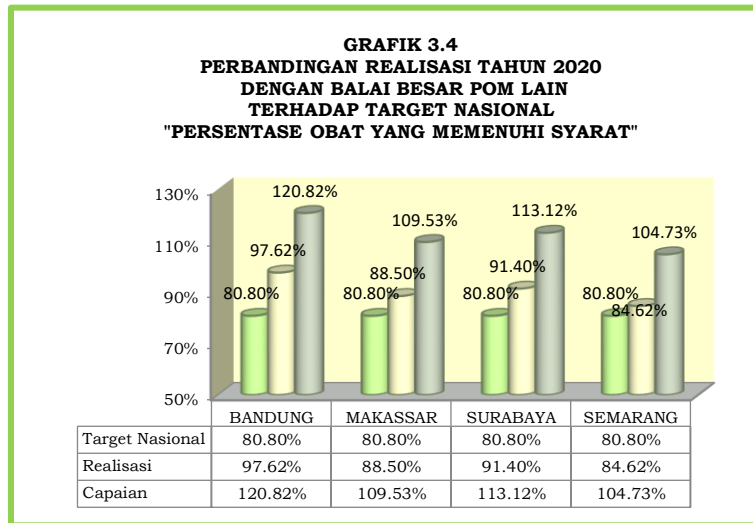


Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 92,30%. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja tahun

2020 sudah melebihi target Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar **105,76%** dengan kriteria **Baik**. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.3.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Bandung (97,62%), Balai Besar POM di Surabaya (91,40%), Balai Besar POM di Makassar (88,50%) dan Balai Besar POM

di Semarang (84,62%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (80,80%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Bandung (120,82%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.4.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada tahun 2020 disebabkan antara lain:

- ☛ Target yang ditetapkan pada tahun 2020, mengikuti target nasional sebesar 80,80%, sehingga capaiannya sebesar 120,82% (tidak dapat disimpulkan). Target nasional yang juga merupakan target Balai Besar POM di Bandung tahun 2020 (80,80%) berada di bawah capaian yang diperoleh pada tahun 2019 (95,31%). Hal tersebut menjadi salah satu penyebab persentase capaian meningkat sangat tinggi, dan tidak dapat disimpulkan. Untuk itu penetapan target tahun berikutnya harus dilakukan review kembali dengan mempertimbangkan data capaian tahun sebelumnya.
- ☛ Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah sampel obat yang tidak memenuhi syarat. Apabila kita bandingkan jumlah sampel obat yang disampling secara acak pada tahun 2019 terhadap tahun 2020, terjadi penurunan hasil tidak memenuhi syarat sebesar 49% (tahun 2019 : 92 sampel, tahun 2020 : 47 sampel). Penurunan berasal dari produk obat, obat tradisional, dan kosmetik, terutama untuk parameter uji cemaran mikroba.
- ☛ Meningkatnya kepatuhan produsen Obat terhadap pedoman yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, jumlah sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetika yang memenuhi ketentuan dalam pemenuhan GMP sebesar 78,34% dari 157 sarana yang diperiksa. Apabila dibandingkan dengan tahun



2019 yaitu sebesar 70,95% maka terdapat peningkatan terhadap pemenuhan GMP dari sarana produksi yang diperiksa.

- ☰ Adanya kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan media sosial.
- ☰ Pengawasan terhadap produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang beredar lebih intensif, antara lain melalui kegiatan operasi daerah dan nasional seperti Operasi Pangea

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☰ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder diantaranya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat, Dana Alokasi Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, Narasumber dan pengawasan bersama.
- ☰ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, *Public Warning* Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui talkshow bekerjasama dengan radio, televisi dan wawancara dengan koran. Bekerjasama dengan stake holder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE melalui webinar, tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- ☰ Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana pelayanan kefarmasian, pelaku usaha di bidang Obat dan masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan. Pembinaan dilakukan saat pengawasan rutin di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan memberikan informasi mengenai cek klik.
- ☰ Penerapan sanksi, baik administratif atau *pro justicia*, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

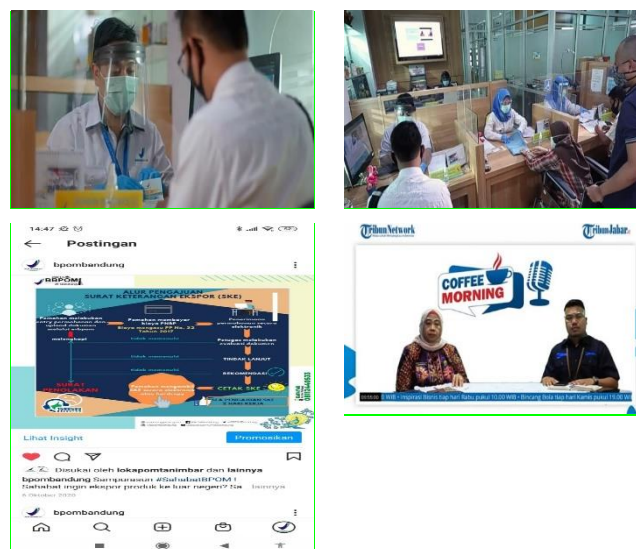
Berikut adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

- ☰ Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung, Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Loka POM di Kabupaten Bogor dilakukan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sejumlah 2519 sampel. Kegiatan tersebut dilakukan dengan



melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.

- ☰ Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan secara rutin oleh BPOM di Bandung, Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Loka POM di Kabupaten Bogor meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen Kesehatan. Pada tahun 2020 jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 157 sarana, jika dilihat dari persentase cakupan pengawasan sarana produksi di wilayah Jawa Barat adalah sebesar 29,46%.
- ☰ Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran. Sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian meliputi, Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Toko Obat, Klinik, Puskesmas, dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, serta suplemen kesehatan. Pada tahun 2020 jumlah sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa sejumlah 1139 sarana, jika dilihat dari persentase cakupan pengawasan sarana distribusi di wilayah Jawa Barat adalah sebesar 12,44%.
- ☰ Adanya kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan media sosial. Dan kegiatan pemberian layanan informasi Tata Cara Pendaftaran Obat dan Makanan. Serta Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media social Instagram, facebook dan Talkshow melalui radio dan media massa.



**GAMBAR 3.1
KEGIATAN LAYANAN INFORMASI DAN KIE**



G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- ☰ Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB termasuk fokus khusus penandaan obat tradisional terhadap sarana produksi Obat Tradisional, pemenuhan CPKB dan CDOB.
- ☰ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☰ Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM).
- ☰ Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* Obat yang diterbitkan oleh Badan POM.
- ☰ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.
- ☰ Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Obat serta masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan.
- ☰ Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar.
- ☰ Melaporkan hasil evaluasi penandaan Obat ke pusat untuk ditindaklanjuti ke produsen sebanyak 2508 label
- ☰ Meningkatkan kompetensi petugas dalam evaluasi penandaan sehingga hasil evaluasi penandaan Loka sesuai dengan evaluasi pusat.
- ☰ Membuat sistem yang dapat membuat pengawasan sarana tetap berjalan secara komprehensif, efektif, dan efisien di masa Pandemi COVID-19 ini.
- ☰ Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melibatkan dalam pelatihan yang diadakan Badan POM.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA


Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



2. PRESENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

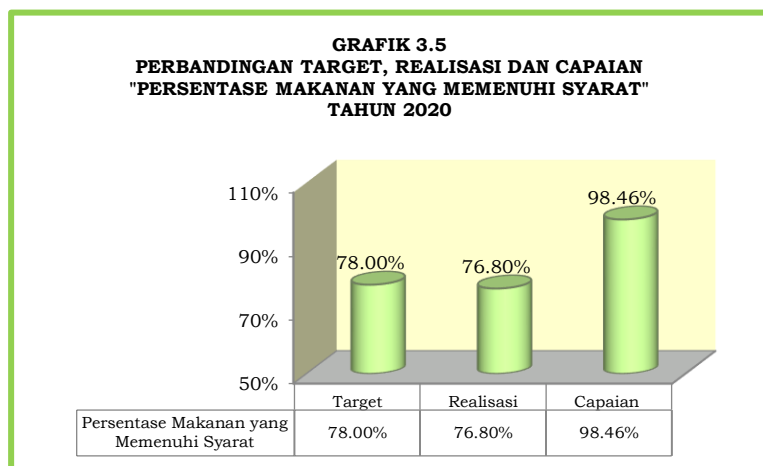
Persentase Makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat pada tahun 2020 dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji pada tahun 2020. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan label; dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung satu sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.6.

**TABEL 3.6
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT”
TAHUN 2020**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	78,00%	76,80%	98,46%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

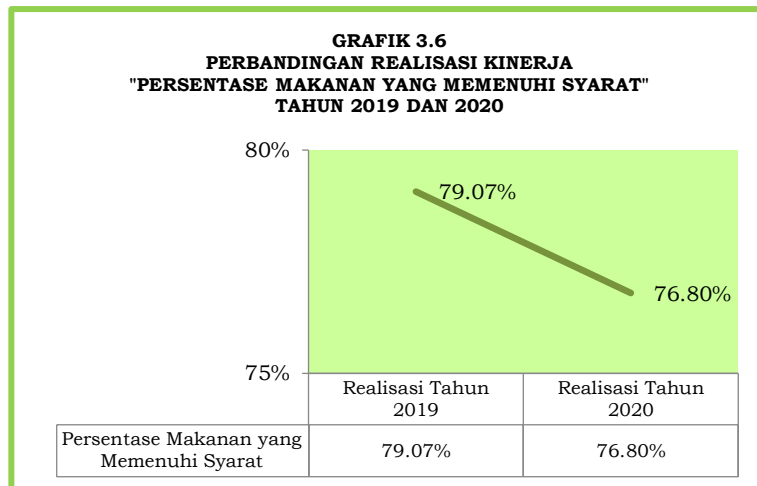
Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 78,00%. Realisasi yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar 76,80%, dengan rincian 470 sampel memenuhi syarat dan 142 sampel



tidak memenuhi syarat. Total sampel acak yang diperiksa dan diuji sebanyak 612 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **98,46%** dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator kinerja kegiatan yang baru

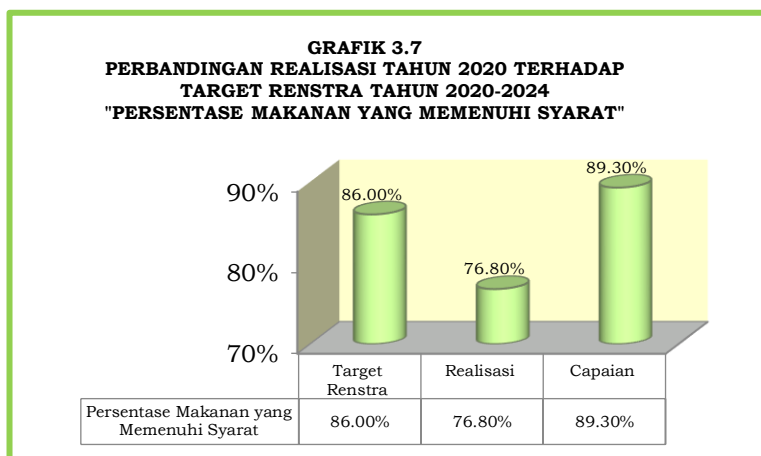


ditetapkan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 indikator kinerja utama ini diukur untuk sampel makanan secara keseluruhan, baik sampel acak/random maupun sampel targeted sehingga capaian kinerja tahun

2020 tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Akan tetapi jika dihitung berdasarkan definisi operasional yang sama maka persentase sampel makanan yang memenuhi syarat tahun 2019 sebesar 79,07%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan persentase sampel makanan memenuhi syarat sebesar 2,27% dibandingkan dengan tahun 2019.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

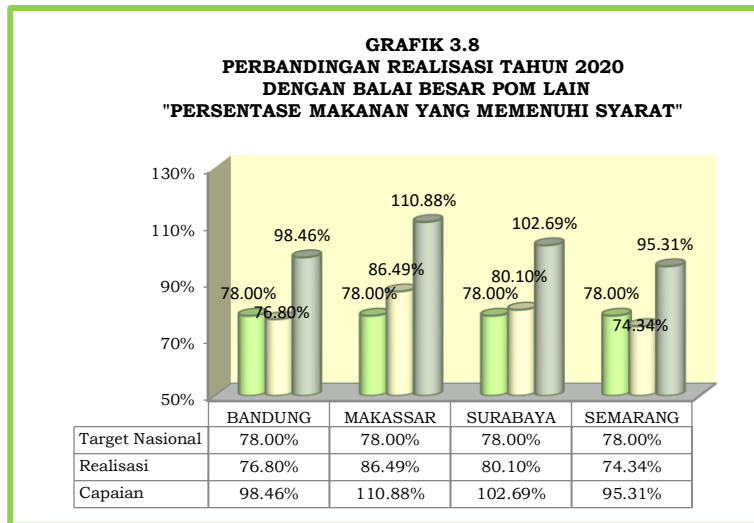
Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 86,00%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target



tersebut, maka nilai pencapaian sasaran pada tahun 2020 sebesar 89,30%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.7.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



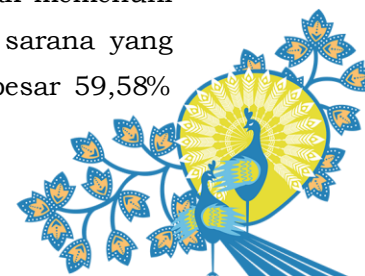
Realisasi kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Makassar (86,49%), Balai Besar POM di Surabaya (80,10%), Balai Besar POM di Bandung (76,80%)

dan Balai Besar POM di Semarang (74,34%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (78,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Makassar (110,88%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.8.

E. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penurunan capaian kinerja indikator ini pada tahun 2020 ini disebabkan oleh :

- ☛ Pada tahun 2020 terjadi peningkatan persentase sampel TMS yang berasal dari TMK label/penandaan dibandingkan dengan tahun 2019. Pada tahun 2019 hasil pengujian makanan TMK label/penandaan yaitu sebesar 51,53% (118 sampel dari 229 sampel acak yang TMS) sedangkan pada tahun 2020 hasil pengujian makanan TMK label/penandaan sebesar 52,82% (75 sampel dari 142 sampel acak yang TMS). Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap persyaratan pelabelan pangan olahan.
- ☛ Pada tahun 2020, sampel yang tidak memenuhi syarat mutu sebanyak 55 sampel, sebagian besar berasal dari sampel yang mengandung Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi persyaratan, seperti pengawet benzoat, pemanis siklamat dan pewarna sintesis, serta TMS parameter uji mikrobiologi yaitu *Enterobacteriaceae* dan Angka Lempeng Total (ALT). Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
- ☛ Pada tahun 2020, jumlah sarana produksi makanan yang tidak memenuhi ketentuan dalam pemenuhan GMP sebesar 56,92% dari 253 sarana yang diperiksa. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 59,58%



maka terdapat peningkatan terhadap ketidakpatuhan pemenuhan GMP dari sarana produksi yang diperiksa. Jika dilihat dari hasil pengawasan sarana produksi makanan dapat terlihat penurunan tingkat ketidakpatuhan produsen makanan. Ketidakpatuhan produsen makanan disebabkan karena ada pemenuhan beberapa aspek CPPOB yang belum diterapkan dengan baik.

- ☰ Masih rendahnya cakupan pengawasan sarana produksi makanan di wilayah Jawa Barat yaitu sebesar 1% dari 25.203 sarana produksi makanan sehingga pembinaan terkait pemenuhan GMP masih belum optimal.
- ☰ Meningkatnya ketidakpatuhan sarana distribusi makanan terhadap pedoman yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020, jumlah sarana distribusi makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 31,42% dari 366 sarana yang diperiksa. Apabila dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 29,07% maka terdapat peningkatan terhadap ketidakpatuhan dari sarana distribusi yang diperiksa.
- ☰ Adanya kegiatan Layanan Informasi serta Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan media sosial.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator antara lain:

- ☰ Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi standar melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- ☰ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan khususnya UMKM terkait pemenuhan CPPOB, melalui *desk CAPA* secara daring.
- ☰ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui talkshow bekerjasama dengan radio, televisi dan wawancara dengan Koran antara lain dengan bekerjasama dengan RFM, Sonora, IRadio. Bekerjasama dengan stake holder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE melalui webinar yang dilaksanakan tentang Cara Ritel Modern Yang Baik dan Cara Ritel yang baik untuk Pasar Tradisional, Webinar Keamanan Pangan untuk Generasi Emas. Selain itu, melalui media sosial sebanyak 286 kali, media cetak Jabar Express sebanyak 2 kali serta KIE tokoh masyarakat pola lama sebanyak 13 kali, sedangkan pola baru sebanyak 21 kali



- ☰ Peningkatan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- ☰ Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar.
- ☰ Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melibatkan dalam pelatihan yang diadakan Badan POM, seperti pelatihan *Food Inspector* Dasar, Pelatihan sanitasi dan higiene pangan serta Pelatihan HACCP

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja adalah:

- ☰ Pengawasan sarana produksi makanan yang dilakukan secara rutin oleh BBPOM di Bandung, Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Loka POM di Kabupaten Bogor meliputi sarana Industri Pangan Olahan MD dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Pada tahun 2020 jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 253 sarana, jika dilihat dari persentase cakupan pengawasan sarana produksi di wilayah Jawa Barat adalah sebesar 1%.



**GAMBAR 3.2
PENGAWASAN SARANA INDUSTRI PANGAN OLAHAN**

- ☰ Bimbingan Teknis E-Registrasi Pangan Olahan untuk Pelaku Usaha Pangan. Pelaksanaan bimbingan teknis ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha tentang registrasi pangan olahan dan memberikan pelayanan terkait proses registrasi pangan olahan kepada pelaku usaha terutama pelaku usaha yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diselenggarakan beberapa kali dalam tahun 2020.





GAMBAR 3.3
BIMTEK E REGISTRASI PANGAN OLAHAN

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjutan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Bandung pada tahun sebelumnya adalah:

- ☰ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui talkshow bekerjasama dengan radio, televisi dan wawancara dengan Koran antara lain bekerjasama dengan yang dilaksanakan tentang Cara Ritel Modern Yang Baik dan Cara Ritel yang baik untuk Pasar Tradisional , Webinar Keamanan Pangan untuk Generasi Emas. Bekerjasama dengan stake holder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE melalui webinar yang dilaksanakan tentang Cara Ritel Modern Yang Baik dan Cara Ritel yang baik untuk Pasar Tradisional, Webinar Keamanan Pangan untuk Generasi Emas. KIE melalui media sosial sebanyak 286 kali, KIE melalui media cetak Jabar Express sebanyak 2 kali. Dan KIE tokoh masyarakat pola lama sebanyak 13 kali, sedangkan pola baru sebanyak 21 kali
- ☰ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB yaitu sebanyak 253 sarana produksi yang diperiksa pada tahun 2020
- ☰ Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi ketentuan. yaitu sebanyak 366 sarana distribusi yang diperiksa pada tahun 2020
- ☰ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan) terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
- ☰ Melaporkan hasil evaluasi penandaan ke pusat untuk ditindaklanjuti ke produsen, yaitu sebanyak 562 label pangan.




H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2

3. PRESENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted yang memenuhi syarat tahun 2020 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji tahun 2020. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive tahun 2020. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; (2) Produk kadaluwarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.7.

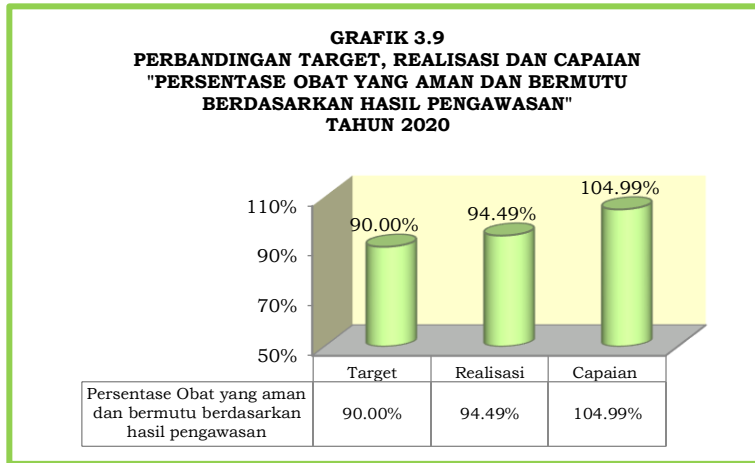
**TABEL 3.7
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”
TAHUN 2020**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%	94,49%	104,99%	Baik	



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sebesar 90,00%. Sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 544 sampel dengan rincian sebanyak 514 sampel memenuhi syarat dan 30 sampel tidak memenuhi

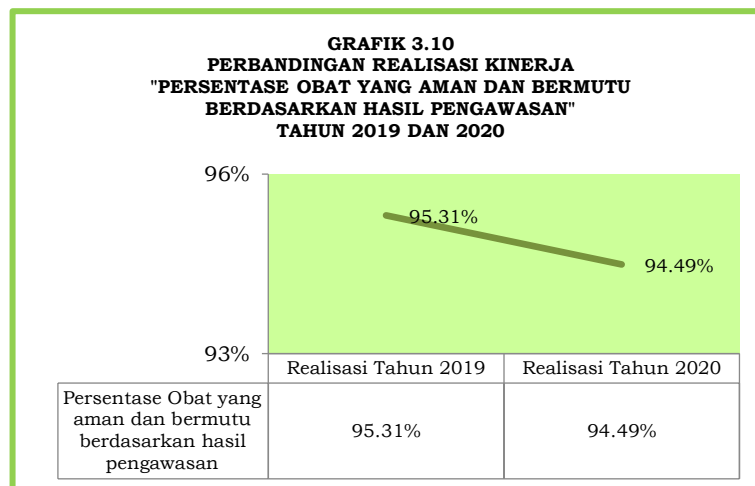


syarat, sehingga persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh sebesar 94,49%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut

diatas adalah sebesar **104,99%** dengan kriteria **Baik**. Pada tahun 2020, hasil pengujian Obat yang tidak memenuhi syarat (TMS) berasal dari TMS mutu pengujian sebanyak 23 sampel yang berasal dari 14 produk Obat Tradisional, 2 produk Kosmetik dan produk obat sebanyak 7 sampel. Parameter uji yang TMS meliputi TMS mengandung bahan kimia obat dan uji mikrobiologi (Obat tradisional), Zat aktif (Obat, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan).

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Indikator kegiatan ini merupakan indikator baru yang ada pada Renstra 2020 - 2024. Indikator “Obat yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan”

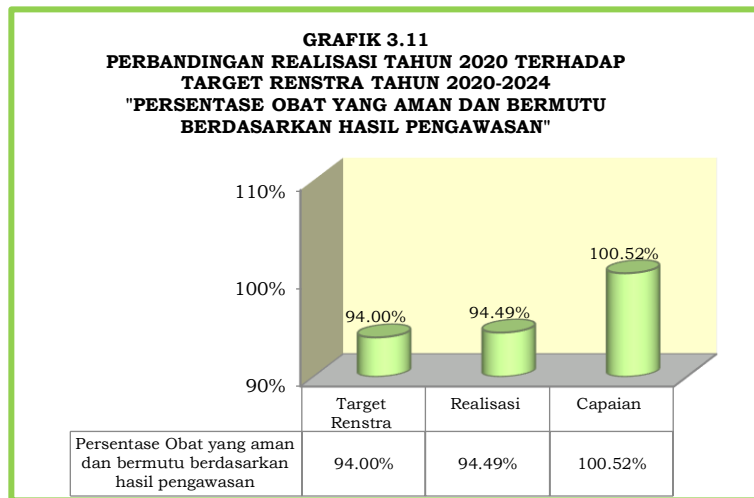


diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat pada tahun 2020 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji pada tahun 2020. Obat meliputi obat,

bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Apabila kita mengukur hasil realisasi tahun 2019 dengan menggunakan indikator tahun 2020, maka diperoleh realisasi sebesar 95,31%. Hal tersebut menunjukkan terjadinya penurunan capaian untuk indikator sasaran kegiatan ini.



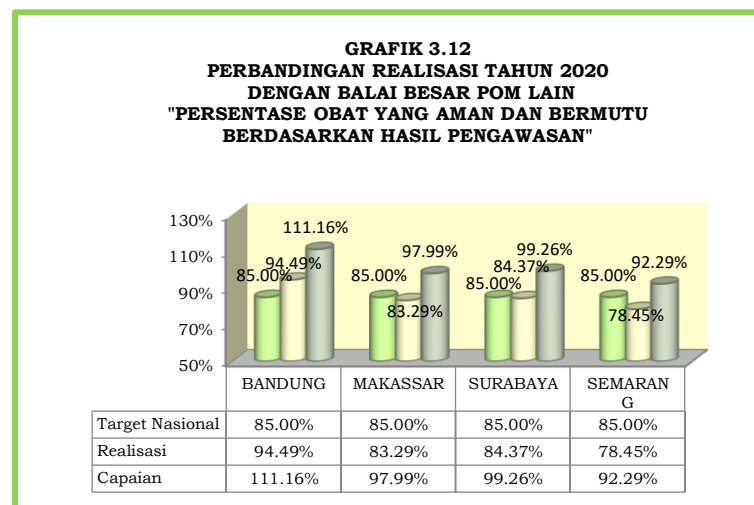
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 94 %. Jika nilai pencapaian sasaran pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka nilai

pencapaian sasaran tahun 2020 sudah melebihi target Rencana Strategis Tahun 2020-2024 (100,52%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.11.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Bandung (94,49%), Balai Besar POM di Surabaya (84,37%),

Balai Besar POM di Makassar (83,29%) dan Balai Besar POM di Semarang (78,45%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (85,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Makassar (111,16%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.12.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penurunan capaian kinerja sasaran ini disebabkan antara lain:

- Pada tahun 2020, terjadi peningkatan prosentase sampel obat targeted yang tidak memenuhi syarat dibandingkan tahun 2019. Hasil pengujian Obat yang



TMS berasal dari TMS mutu pengujian sebanyak 23 sampel yang berasal dari 14 sampel Obat Tradisional, 2 sampel Kosmetik dan sampel kasus obat sebanyak 7 sampel. Parameter uji yang TMS meliputi TMS mengandung bahan kimia obat dan cemaran mikroba (Obat tradisional), Zat aktif (Obat, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan). Sampel TMS sebagian besar merupakan sampel penelusuran kasus.

- ☸ Penurunan capaian sasaran kegiatan ini juga diakibatkan adanya kasus pada sarana produksi obat ilegal, yang hasil ujinya tidak memenuhi syarat. Selain itu, adanya pengaduan dari konsumen terkait sampel obat tradisional dan kosmetik, yang hasil pengujiannya juga tidak memenuhi syarat.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☸ Hasil pengujian sampel yang tidak memenuhi syarat akan dijadikan sebagai salah satu aspek pertimbangan dalam kajian resiko penyusunan prioritas pemeriksaan sarana.
- ☸ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, *Public Warning* Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui talkshow bekerjasama dengan radio, televisi dan wawancara dengan koran. Bekerjasama dengan stake holder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE melalui webinar.
- ☸ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.
- ☸ Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Obat serta masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan.
- ☸ Penerapan sanksi administratif terhadap sarana produksi dan distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) mulai dari peringatan, peringatan keras dan penghentian sementara kegiatan.
- ☸ Penerapan sanksi pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar.

F. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Berikut kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah:



- ✿ Pengambilan contoh sampel obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung, Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Loka POM di Kabupaten Bogor dilakukan tepat waktu dalam satu tahun periode yaitu sejumlah 2519 sampel. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.
- ✿ Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, dan kosmetik yang dilakukan secara rutin oleh BBPOM di Bandung, Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Loka POM di Kabupaten Bogor meliputi sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional, Industri Kosmetik, dan Industri Suplemen Kesehatan. Pada tahun 2020 jumlah sarana produksi yang diperiksa sejumlah 157 sarana, jika dilihat dari persentase cakupan pengawasan sarana produksi di wilayah Jawa Barat adalah sebesar 29,46%.
- ✿ Pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dilaksanakan dalam rangka pengawasan sediaan farmasi yang beredar di pasaran. Sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian meliputi, Pedagang Besar Farmasi, Instalasi Farmasi Pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Toko Obat, Klinik, Puskesmas, dan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, serta suplemen kesehatan. Pada tahun 2020 jumlah sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian yang diperiksa sejumlah 1139 sarana.



**GAMBAR 3.4
PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN**

- ✿ Adanya Layanan Informasi yang dilaksanakan secara langsung maupun melalui media elektronik dan media sosial. Serta KIE melalui media sosial, media cetak Jabar Express serta KIE tokoh masyarakat pola lama dan pola baru



☸ **TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA**

Tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya adalah sebagai berikut:

- ☸ Intensifikasi pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dalam pemenuhan CPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- ☸ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan setiap minggu
- ☸ Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Iklan Layanan Masyarakat (ILM).
- ☸ Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* Obat yang diterbitkan oleh Badan POM.
- ☸ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder (Dinas Kesehatan Kab./Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Obat.
- ☸ Pembinaan dan penyebaran informasi terhadap sarana distribusi Obat serta masyarakat tentang Obat yang memenuhi ketentuan.
- ☸ Penerapan sanksi, baik administratif atau pro justicia, terhadap sarana produksi dan distribusi yang memproduksi/mendistribusikan Obat Tanpa Ijin Edar (TIE)/ dilarang beredar.

☸ **ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.


4. PRESENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat pada tahun 2020 dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji pada tahun 2020. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap

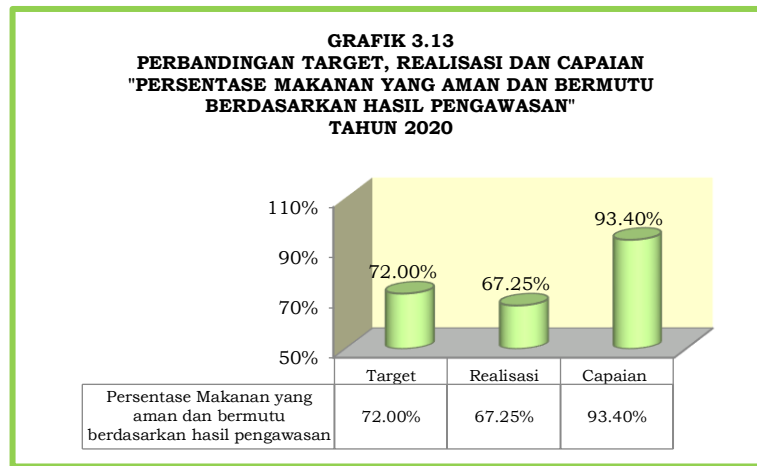


label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.8 .

**TABEL 3.8
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU
BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN”
TAHUN 2020**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Makanan Yang Aman Dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	72,00%	67,25%	93,40%	Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

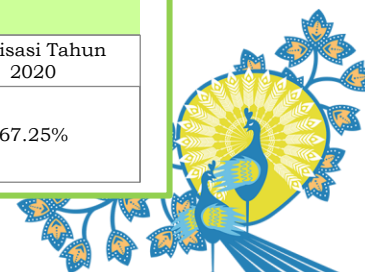
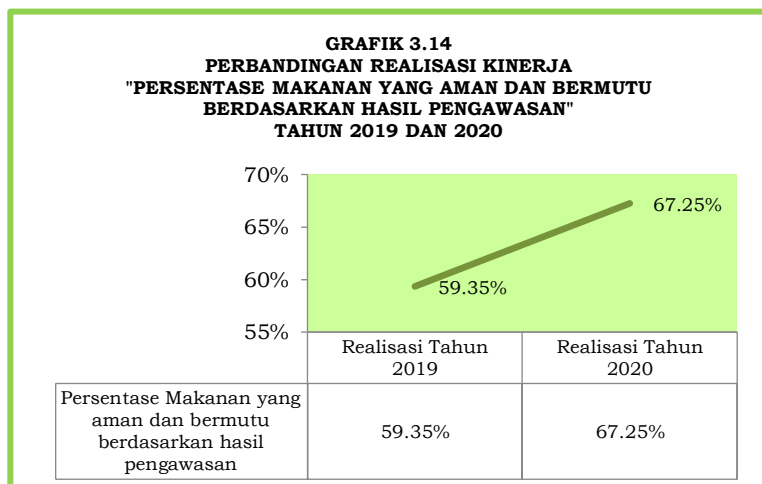


Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 72,00%. Persentase Makanan

yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2020 sebesar 67,25%, dengan rincian sebanyak 271 sampel targeted memenuhi syarat dan 132 sampel targeted tidak memenuhi syarat dari total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 403 sampel targeted. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **93,40%** dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

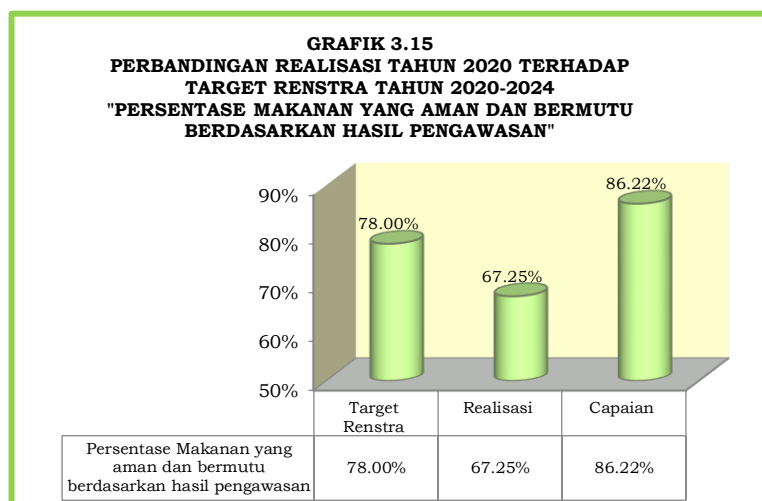
Indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator kinerja kegiatan yang baru ditetapkan pada Renstra 2020-2024. Pada tahun 2019 indikator kinerja utama ini diukur



untuk sampel makanan secara keseluruhan, baik sampel acak/random maupun sampel targeted sehingga capaian kinerja tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Akan tetapi jika dihitung berdasarkan definisi operasional yang sama maka persentase sampel makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2019 sebesar 59,35%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan persentase sampel makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan sebesar 7,89% dibandingkan dengan tahun 2019.

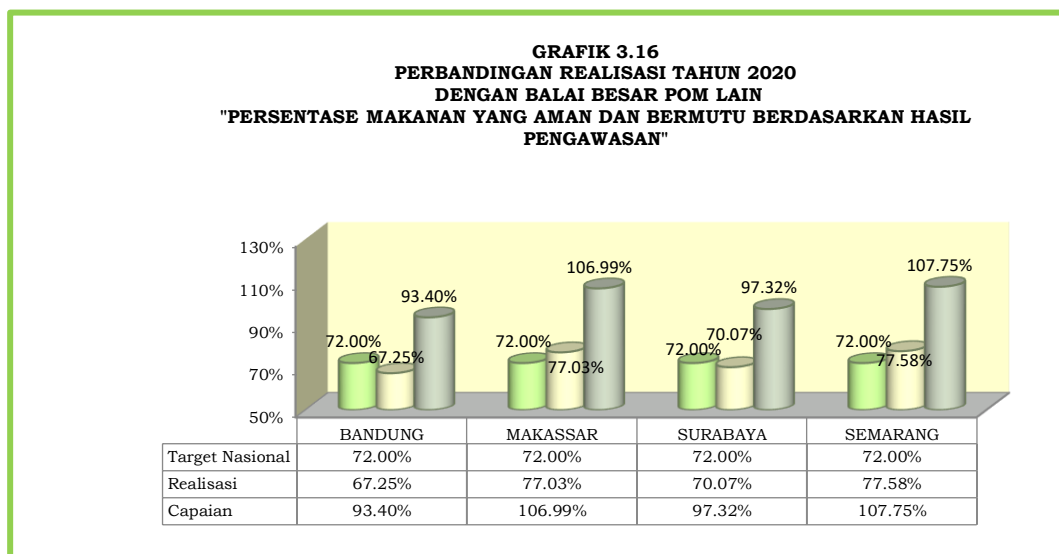
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 78,00%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 terhadap target tersebut, maka



capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 86,22%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.15.”

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dari yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Semarang (77,58%), Balai Besar POM di Makassar (77.03%), Balai Besar POM di Surabaya (70.07%) dan Balai Besar POM di Bandung (67.25%). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (72,00%), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Makassar (106,99%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.16.

E. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Meskipun terjadi peningkatan realisasi kinerja dibandingkan dengan tahun 2019 tetapi capaian kinerja masih belum berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 persentase sampel makanan yang disampling secara purposive/targeted, yang tidak memenuhi syarat masih tinggi. Pada tahun 2020 hasil pengujian sampel makanan yang TMS sebanyak 132 sampel (32,75%) dari total 403 sampel makanan yang diperiksa dan diuji. Hasil pengujian sampel makanan yang TMS tersebut, sebagian besar berasal dari sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dan sampel fortifikasi garam beryodium. Hasil pengujian sampel makanan tahun 2020 dijelaskan dalam gambar berikut:

Sampel-sampel tersebut TMS dengan parameter uji kimia dan mikrobiologi sebagai berikut:

**TABEL 3.9
PARAMETER UJI SAMPEL TMS**

JENIS SAMPEL	TMS PARAMETER UJI
PJAS	BTP Pemanis Siklamat, Bakteri E. Coli
Garam Konsumsi Beryodium	KIO3 yang substandar
Tepung Terigu	Vitamin B1, Vitamin B2, Asam Folat, Logam Mineral Fe dan Zn yang sub standar
Air Minum Isi Ulang	Bakteri Pseudomonas Aeruginosa

Hal ini menunjukkan masih kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Peningkatan realisasi kinerja indikator tersebut disebabkan oleh:

- ☛ Terdapat perbedaan persentase sampling acak dengan targeted antara tahun 2020 (80:20) dengan tahun 2019 (60:40). Pada tahun 2019 jumlah sampel targeted yang disampling sebanyak 278 sampel dari 1372 total sampel



makanan. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah sampel targeted sebanyak 403 dari 1015 total sampel makanan. Perubahan proporsi tersebut terutama pada jumlah sampling Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Pada Tahun 2019, PJAS disampling sebanyak 11 sampel, sedangkan tahun 2020 sebanyak 200 sampel, meningkat sangat signifikan. Hasil uji sampel PJAS tersebut sebagian besar memenuhi syarat (64%), sedangkan tahun 2019 sebesar 54,5%. Peningkatan hasil pengujian yang memenuhi persyaratan dari sampel PJAS berpengaruh pada peningkatan indikator sasaran kegiatan ini. Kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah dilaksanakan di Kabupaten Kuningan dan Indramayu, terdapat 16 sekolah yang diintervensi. Telah dilakukan Bimtek Keamanan Pangan dan Bimtek Piagam Bintang terhadap 16 sekolah. Sekolah sertifikasi Level 1 yang ditunjukkan dengan komitmen dari setiap sekolah.

- ☸ Terjadi peningkatan hasil uji yang memenuhi syarat pada sampel fortifikasi garam beryodium. Pada tahun 2020 hasil uji garam yang memenuhi syarat sebesar 67,5% (81 sampel dari 200 sampel), sedangkan pada tahun 2019 sebesar 45,45% (75 sampel dari 165 sampel). Hasil ini menunjukkan adanya peningkatan pemenuhan dari para pelaku industri garam.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- ☸ Pembinaan terhadap sarana distribusi makanan agar memenuhi pedoman Cara Retail Pangan yang Baik khususnya pasar tradisional dan dapat mengikuti Lomba Pasar Tingkat Nasional
- ☸ Melakukan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha produksi garam.
- ☸ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- ☸ Pelaksanaan kegiatan PJAS dilakukan sesuai dengan Juknis yang telah disusun.
- ☸ Peningkatan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi tentang peraturan, klarifikasi berita hoax terkait Obat dan makanan, Public Warning Obat dan makanan yang diterbitkan oleh Badan POM kepada masyarakat luas melalui media social (facebook, Instagram, Ig Live), media masa melalui talkshow bekerjasama dengan radia, televisi dan wawancara dengan koran. Bekerjasama dengan stake holder (instansi terkait, organisasi masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat) melaksanakan KIE melalui webinar.



**F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/
KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA**

Kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja adalah:

- ☰ Kepatuhan dari pelaku usaha produsen garam di wilayah Jawa Barat masih kurang sehingga pada tahun 2020 dilaksanakan kegiatan pendampingan terhadap produsen garam melalui kegiatan bimbingan teknis pelaku usaha garam konsumsi beryodium dan melakukan advokasi pengawasan pangan fortifikasi secara langsung di tempat produsen.



**GAMBAR 3.5
BIMBINGAN TEKNIS PELAKU USAHA GARAM**

- ☰ Kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah



Penandatanganan Komitmen Bimtek Keamanan Pangan Sekolah

**GAMBAR 3.6
KEGIATAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH**

- ☰ Kegiatan Desa Pangan Aman



Bimtek Komunitas Pelaku Usaha Pangan Desa Workshop Monitoring dan Evaluasi

**GAMBAR 3.7
KEGIATAN DESA PANGAN AMAN**



☪ Kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya



Bimtek Petugas Pasar Survei Pasar

GAMBAR 3.8
KEGIATAN PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

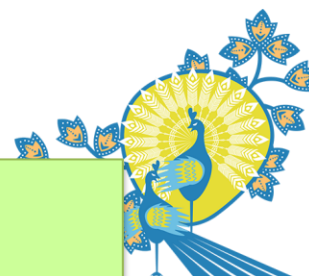
G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Tindaklanjut rekomendasi untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Bandung pada tahun sebelumnya adalah:

- ☪ Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang memenuhi syarat melalui penyebaran informasi yang intensif baik melalui sosialisasi langsung atau melalui media massa baik cetak maupun elektronik kepada masyarakat,
- ☪ Meningkatkan pembinaan terhadap sarana produksi makanan terkait pemenuhan CPPOB.
- ☪ Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor dan penjual retail produk makanan mengenai Makanan yang memenuhi syarat.
- ☪ Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan, khususnya dengan pihak sekolah untuk meningkatkan kesadaran para guru, orang tua murid, murid dan pedagang sekitar sekolah terhadap keamanan pangan sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.





**SASARAN
KEGIATAN
KE-2**

**MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT
TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN
MAKANAN WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yaitu : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Dari perhitungan indikator tersebut diperoleh capaian sebesar **93,54%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.9.

**TABEL 3.9
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-2
TAHUN 2020**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72,00	67,35	93,54%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			93,54%	BAIK	

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: (1) Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat; (2) Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan; dan (3) Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

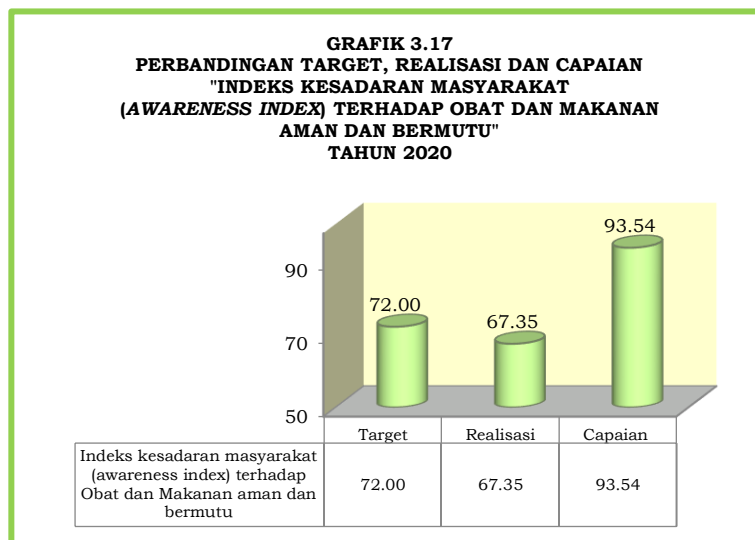
Interprestasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu mengacu pada skala 0-100 dengan kategori sebagai berikut:



TABEL 3.10
KATEGORI INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX)
TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU

SKOR	INTERPRESTASI
≤ 45,00	TIDAK BAIK
45,01 – 60,00	KURANG BAIK
60,01 – 75,00	CUKUP BAIK
75,01 – 90,00	BAIK
≥ 90,01	SANGAT BAIK

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020



Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 72,00. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Provinsi Jawa Barat sebesar 67,35 (Cukup Baik)

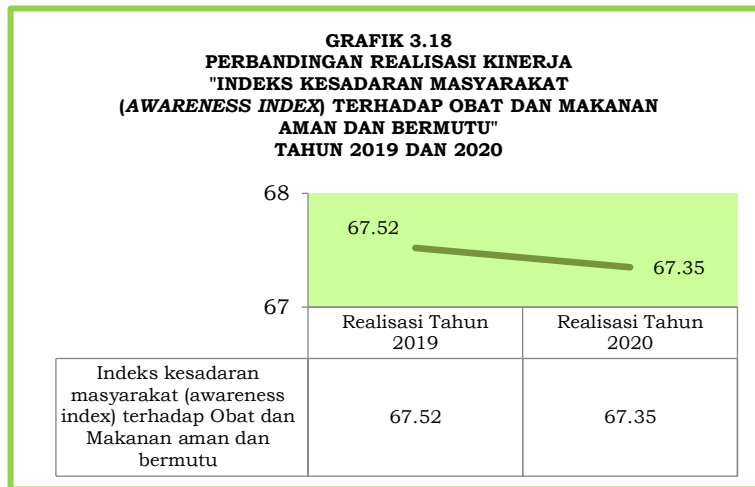
dibawah capaian indeks secara nasional (74,29). Dengan demikian nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar **93,54%** dengan kriteria **Baik**. Rincian indeks dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.11
HASIL SURVEY INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX)
TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU

INDEKS	PROVINSI JAWA BARAT	NASIONAL
INDEKS PENGETAHUAN	56,01(CUKUP BAIK)	69,07 (CUKUP BAIK)
INDEKS SIKAP	79,73 (BAIK)	80,90 (BAIK)
INDEKS PERILAKU	66,31(CUKUP BAIK)	72,88 (CUKUP BAIK)
INDEKS KESADARAN	67,35 (CUKUP BAIK)	74,29 (CUKUP BAIK)



B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

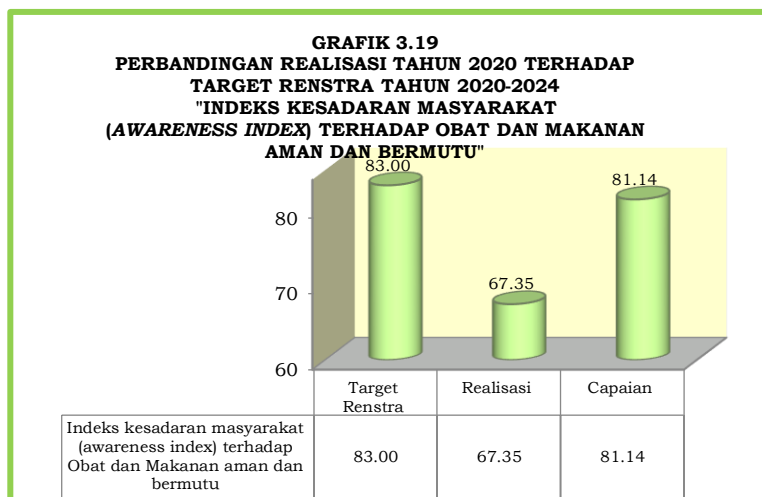


Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar 67,35 sedangkan pada tahun 2019 sebesar 67,52,

terdapat penurunan sebesar 0,17.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Target indikator tersebut yang ditetapkan pada akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 83,00. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka

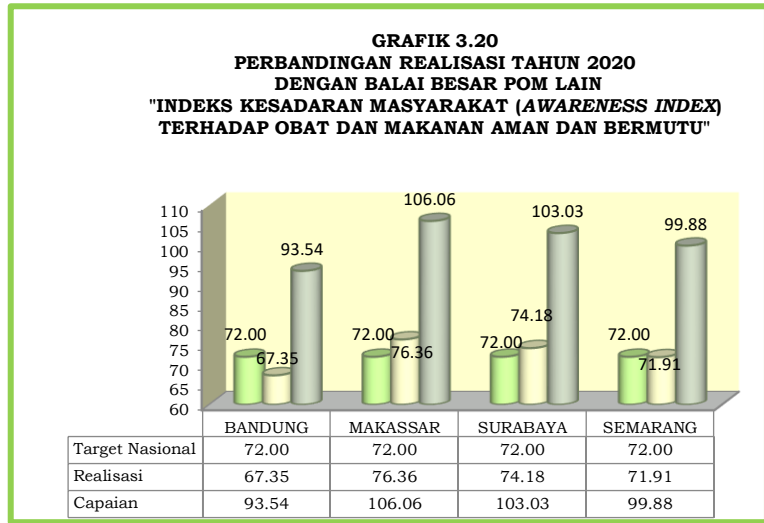


capaian kinerjanya sebesar 81,14% dengan kriteria **Cukup**.



☪ **PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL**

Realisasi kinerja dari Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu yang tertinggi secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Makassar (76,36), Balai Besar POM di



Surabaya (74.18), Balai Besar POM di Semarang (71,91) dan Balai Besar POM di Bandung (67.35). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (72,00), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Makassar (106,06%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.20.

☪ **ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 termasuk dalam kriteria Baik, artinya sudah adanya kesadaran masyarakat di Provinsi Jawa Barat mengenai obat dan makanan aman namun perlu ditingkatkan. Penyebab kegagalan capaian kinerja indikator tersebut, yaitu:

- ☪ Rendahnya indeks pengetahuan dan indeks perilaku masyarakat terhadap Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat.
- ☪ Persepsi masyarakat terhadap obat dan makanan masih dianggap seperti komoditi biasa pada umumnya yang tidak memerlukan perhatian lebih.
- ☪ Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang Obat dan Makanan

Alternative solusi yang telah dilakukan antar lain:

- ☪ Peningkatan aspek pengetahuan dan perilaku terkait Obat dan Makanan dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
- ☪ Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan KIE.
- ☪ Mengembangkan kegiatan KIE yang lebih variatif sesuai dengan karakteristik wilayah Jawa Barat.



- ☰ Mengoptimalkan peran media sosial media elektronik dan media cetak untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan

☰ **ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Kegiatan yang menunjang kegagalan pernyataan kinerja adalah:

- ☰ Kurangnya kegiatan KIE dan layanan informasi secara tatap muka dan melalui media cetak, karena adanya pandemik, kegiatan lebih banyak dialihkan dengan menggunakan media elektronik, sedangkan masyarakat di Provinsi Jawa Barat belum seluruhnya memiliki kemampuan untuk mengaksesnya.

☰ **TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA**

Tindaklanjut yang dilakukan berdasarkan rekomendasi sebelumnya:

- ☰ Peningkatan aspek pengetahuan dan perilaku terkait Obat dan Makanan dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
- ☰ Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan KIE.
- ☰ Mengembangkan kegiatan KIE yang lebih variatif sesuai dengan karakteristik wilayah Jawa Barat.
- ☰ Mengoptimalkan peran media sosial untuk menyebarkan informasi terkait obat dan makanan
- ☰ Mengembangkan metode dan sarana untuk melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
- ☰ Meningkatkan kompetensi petugas agar dapat melakukan pengembangan metode dan sarana melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

☰ **ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

**SASARAN
KEGIATAN
KE-3**





**MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI
BANDUNG**

KE-3
Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 3 (tiga) indikator yaitu: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil



survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM yang dilakukan pada akhir tahun anggaran. Dari perhitungan ketiga indikator diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **104,24%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.12.

**TABEL 3.12
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE 3
TAHUN 2020**


INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,00	90,82	109,42%	Baik	
2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71,00	75,43	106,24%	Baik	
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88,5	85,91	97,07%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			104,24%	BAIK	

1. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indeks kepuasan pelaku usaha merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/ pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/coaching clinic, konsultasi, focus group discussion (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survey ini adalah: (1). Aspek bimbingan dan pembinaan; (2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan; (3). Aspek penanganan saran dan masukan; (4). Aspek manfaat; (5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan; dan (6). Aspek pengetahuan dan pemahaman. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.13.

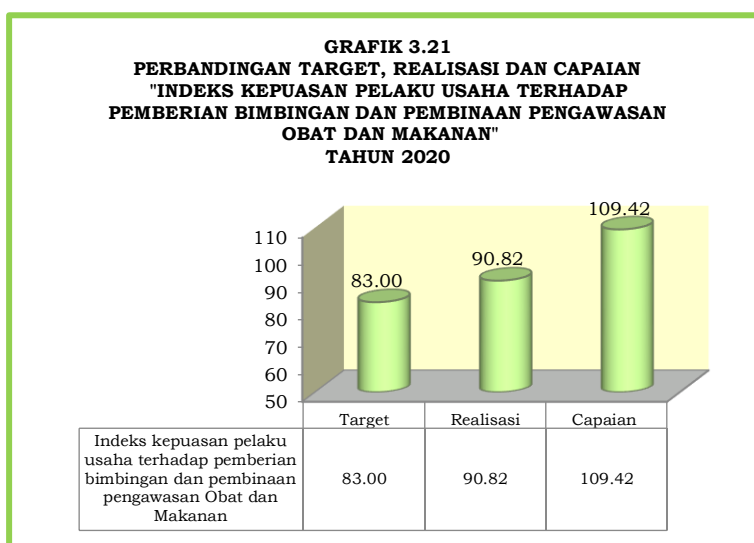


TABEL 3.13
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN
PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,00	90,82	109,42%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 83,00. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi



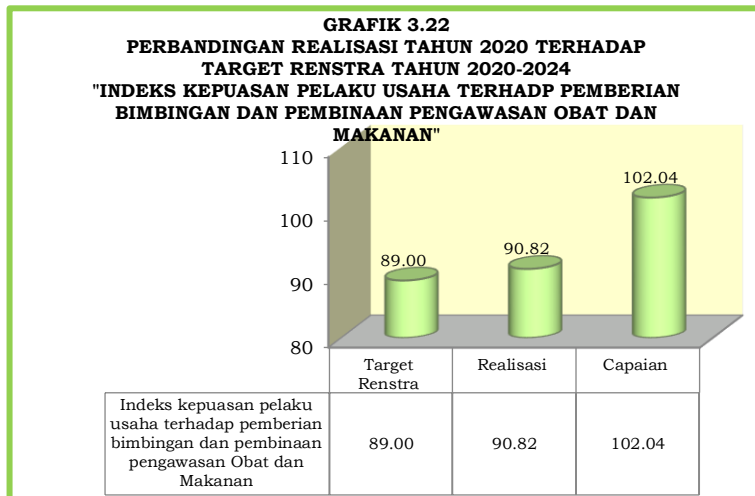
Jawa Barat sebesar 90,82 di atas capaian indeks secara nasional (86,81). Dengan demikian nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar **109,42%** dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Indikator Kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan baru ditetapkan pada tahun 2020 sehingga belum dapat dibandingkan.



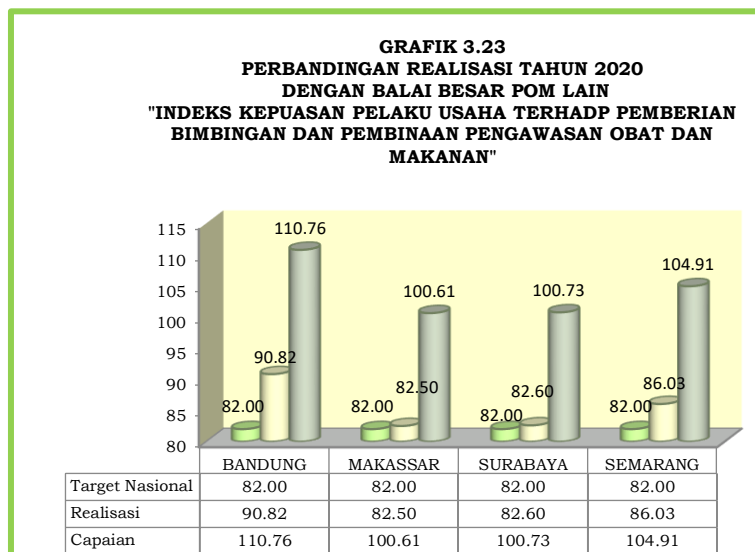
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Pada tahun 2020, target indikator tersebut yang ditetapkan pada akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 89,00. Jika capaian kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka

capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar **102,04%** dengan kriteria **Baik**.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Bandung (90.82), Balai Besar POM di

Semarang (86.03), Balai Besar POM di Surabaya (82,60) dan Balai Besar POM di Makassar (82,50). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (82,00), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Makassar (110,76%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.23.



**E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/
PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH
DILAKUKAN PADA TAHUN 2021**

Penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator tersebut, yaitu:

- ☰ Layanan Informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran Obat dan Makanan
- ☰ Bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait Obat dan Makanan yang dialihkan dari luring menjadi daring pada masa pandemic Covid-19.

Alternative solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja, antar lain:

- ☰ Bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait Obat dan Makanan lebih fokus pada materi yang berdampak langsung pada percepatan perijinan/sertifikasi pelaku usaha.
- ☰ Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi diperoleh hasil bahwa pelaku usaha yang terlibat proses registrasi di Badan POM merasakan manfaat bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh petugas BBPOM Di Bandung. Petugas akan terus meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih responsif dan dapat menyampaikan informasi dengan lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh pelaku usaha. BBPOM Di Bandung juga akan selalu berkoordinasi dengan petugas Badan POM agar proses pendaftaran terutama untuk pelaku UMKM dapat terlaksana dengan cepat dan tepat.

**F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan, yaitu:

- ☰ Layanan Informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran Obat dan Makanan melalui tatap muka, whatsapp Kabayan, Telepon, email, media social dll.



**GAMBAR 3.9
LAYANAN INFORMASI**



- ☰ Bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait Obat dan Makanan yang dialihkan dari luring menjadi daring pada masa pandemic Covid-19.
- ☰ Pada bulan Maret dan bulan November dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelayanan Prima E-Registration Pangan Olahan terpadu dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM dengan metode kolaborasi daring dan luring. Dalam kegiatan ini pelaku usaha memperoleh pendampingan khusus sehingga dapat mempercepat proses pendaftaran. Dari kegiatan tersebut diperoleh 7 (tujuh) izin edar produk terbit dan 22 (dua puluh dua) akun perusahaan disetujui dan 12 (dua belas) pengajuan produk yang masuk ke tahap pengajuan untuk berpotensi akan selesai. Kegiatan ini diutamakan untuk diikuti oleh pelaku UMKM yang seringkali merasa kesulitan terkait pendaftaran melalui e-registration.
- ☰ Pada bulan Agustus dilaksanakan Bimbingan Teknis CPPOB untuk 40 pelaku usaha UMKM. Di dalam kegiatan ini diberikan materi tentang Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, Cara Pembuatan SOP dan E-Registrasi Pangan Olahan.



**GAMBAR 3.10
BIMBINGAN TEKNIS CPPOB**

- ☰ Pada bulan November dan Desember dilaksanakan pula pendampingan untuk para pelaku usaha yaitu Desk CAPA Bagi Sarana Produksi. Pada kegiatan ini mengundang pelaku usaha yang sedang dalam tahap penyelesaian CAPA.



**GAMBAR 3.11
DESK CAPA**




G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

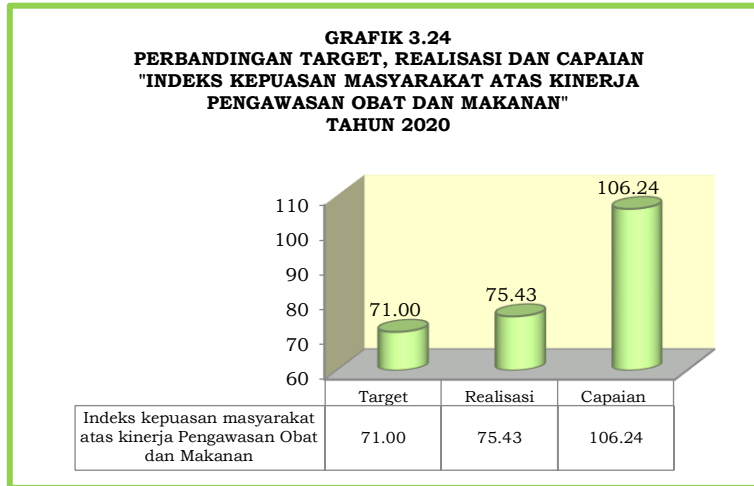
Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *reability*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu: (1). Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*); dan (2). Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.14.

TABEL 3.14
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71,00	75,43	106,24%	Baik	



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020



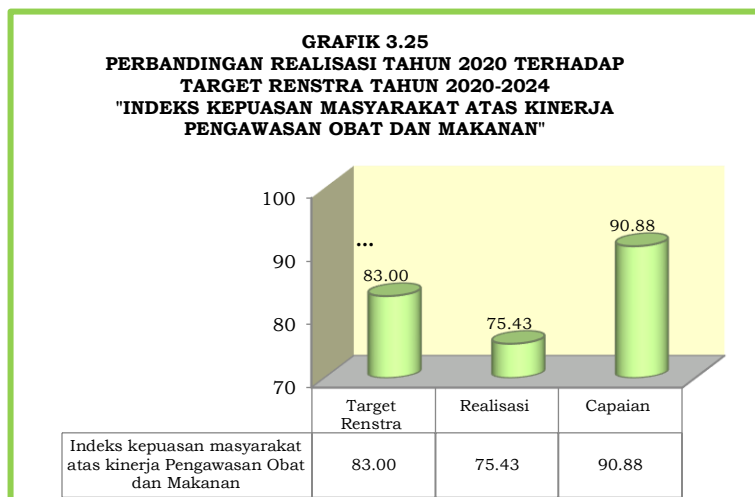
Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 71. Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat sebesar 75,43 diatas

capaian indeks secara nasional (72,54). Dengan demikian nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar **106,24%** dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat baru ditetapkan pada tahun 2020 sehingga belum dapat dibandingkan.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



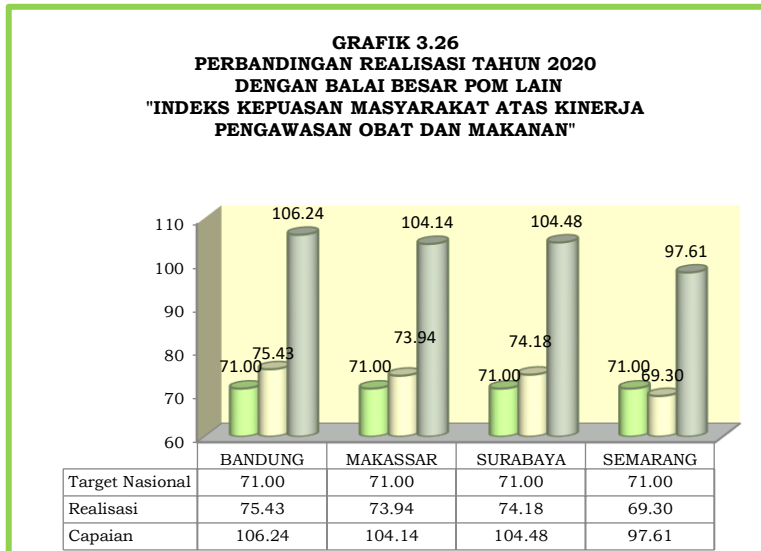
Pada tahun 2020, target indikator tersebut yang ditetapkan pada akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 83,00. Jika capaian kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka

capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar **90,88%** dengan kriteria **Baik**.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL

Realisasi kinerja dari Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Bandung (75,43), Balai Besar POM di Surabaya (74,18), Balai Besar POM di Makassar (73,94) dan Balai Besar POM di Semarang (69,30).



(73,94) dan Balai Besar POM di Searang (69,30). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional(71,00), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Bandung (106,24%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.26.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator tersebut, yaitu:

- ☰ Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
- ☰ Pengawasan Pre Market serta Bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait Obat dan Makanan
- ☰ Pengawasan Post Market melalui kegiatan Inspeksi terhadap sarana produksi, pelayanan dan distribusi Obat dan Makanan
- ☰ Meningkatnya kegiatan KIE yang diselenggarakan bersama Tokoh Masyarakat maupun yang dilakukan melalui media sosial pada masa pandemic covid-19.

Alternative solusi yang telah dilakukan, antar lain:

- ☰ Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
- ☰ Meningkatkan pengawasan PreMarket serta Bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait Obat dan Makanan
- ☰ Meningkatkan pengawasan Post Market melalui kegiatan Inspeksi terhadap sarana produksi, pelayanan dan distribusi Obat dan Makanan



- ☰ Melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan KIE.
- ☰ Mengembangkan kegiatan KIE sesuai dengan karakteristik wilayah Jawa Barat.

**F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan, yaitu:

- ☰ Layanan Informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran Obat dan Makanan, Layanan Pengujian Pihak Ketiga dan Pengaduan Konsumen melalui tatap muka, whatsapp Kabayan, Telepon, email, media social dll



**GAMBAR 3.12
LAYANAN INFORMASI**

- ☰ Bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait Obat dan Makanan yang dialihkan dari luring menjadi daring pada masa pandemic Covid-19. Kegiatan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Bagi Pelaku Usaha UMKM Pangan yang dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting.



**GAMBAR 3.13
BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PELAKU USAHA**



- ☰ Pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung.
- ☰ Inspeksi terhadap sarana produksi, pelayanan dan distribusi Obat dan Makanan



Pengawasan Distribusi Vaksin Covid19 Pengawasan Sarana Produksi Pangan

**GAMBAR 3.14
INSPEKSI TERHADAP SARANA**

- ☰ Kegiatan KIE yang diselenggarakan bersama Tokoh Masyarakat maupun yang dilakukan melalui media sosial pada masa pandemic covid-19



Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pola lama dengan Tokoh Masyarakat

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pola baru dengan Tokoh Masyarakat



KIE melalui IG Live Kelom Geulis tentang Pangan Aman

KIE melalui Infografis tentang Obat dan Makanan

**GAMBAR 3.15
KEGIATAN KIE**

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



3. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM


Indeks kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Pada tahap interpretasi, untuk memudahkan penafsiran dan mengacu pada pengelompokan kinerja unit pelayanan berdasarkan PemanPAN dan RB Nomo 14 Tahun 2017, indeks yang diperoleh dikelompokkan sebagai berikut:

TABEL 3.15
NILAI KONVERSI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

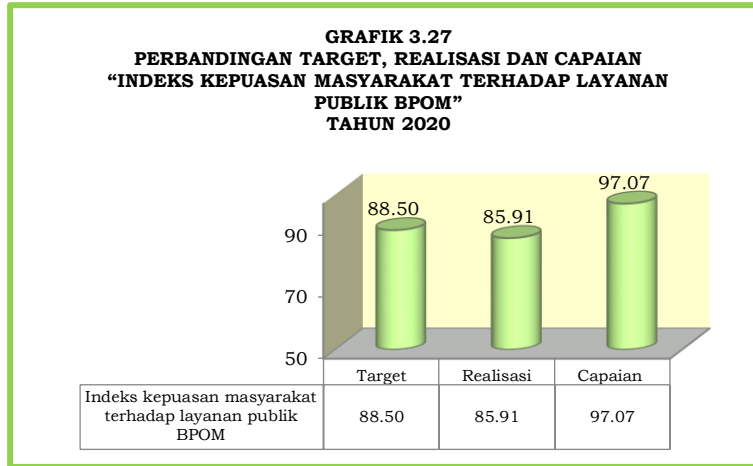
Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.15

TABEL 3.16
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM”
TAHUN 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	88,5	85,91	97,07%	Baik	



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020



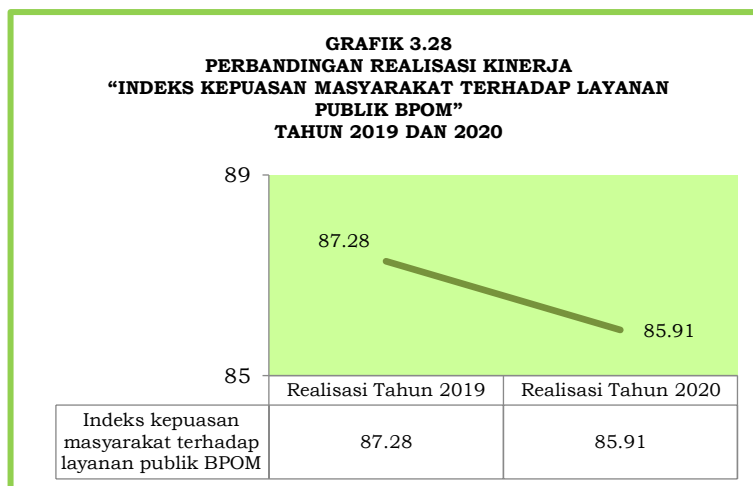
Pada 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 88,5. Hasil survey dengan jumlah responden sebanyak 201 menunjukkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan

publik BPOM di Provinsi Jawa Barat sebesar 85,91 (Baik) dibawah capaian indeks secara nasional sebesar 88,50 (Baik). Dengan demikian nilai pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebesar **97,07%** dengan kriteria **Baik**. Dengan rincian indeks per unsur pelayanan publik sebagai berikut:

**TABEL 3.17
PENILAIAN
"INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM" PER
JENIS DAN UNSUR PELAYANAN TAHUN 2020**

JENIS PELAYANAN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	NILAI PER LAYANAN
PENGUJIAN	91,03	92,31	86,32	89,74	89,74	92,31	93,59	88,46	87,18	90,08
SKI/SKE	100,00	100,00	97,22	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	94,14
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN	80,82	82,35	84,41	85,22	84,86	88,71	91,76	87,54	84,14	85,53

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019



Capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 (85,91) lebih kecil dibandingkan capaian tahun 2019 (**87,28**). Secara rinci



perbandingan penilaian per unsur pelayanan tahun 2019 dan 2020 sebagaimana table berikut.

**TABEL 3.18
PERBANDINGAN PENILAIAN
“INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM”
PER UNSUR PELAYANAN TAHUN 2019 DAN 2020**

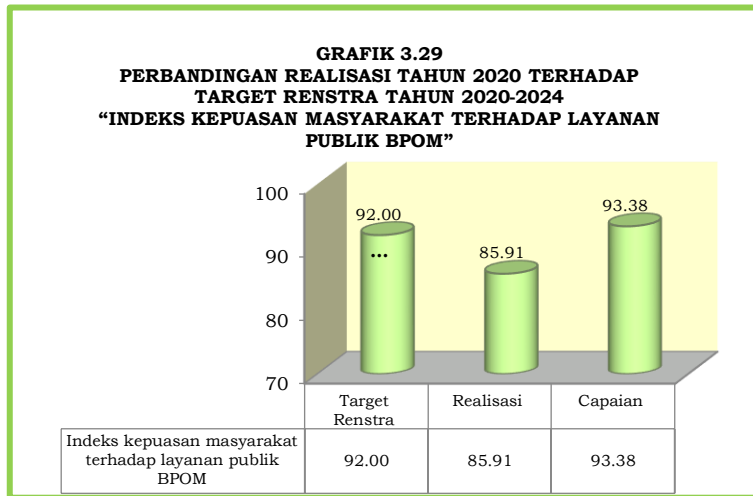
UNSUR PELAYANAN		2019	2020	NAIK/TURUN
U1	Persyaratan	86,42	81,67	-4,75
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	83,06	83,17	0,11
U3	Waktu Penyelesaian	83,33	84,66	1,33
U4	Biaya/Tarif	87,50	85,57	-1,93
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	82,93	85,24	2,31
U6	Kompetensi Pelaksana	89,98	88,97	-0,41
U7	Perilaku Pelaksana	92,07	91,87	-0,20
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	96,77	87,65	-9,12
U9	Sarana dan Prasarana	84,01	84,41	0,40
TOTAL		87,28	85,91	-1,37

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Pada tahun 2020, target indikator tersebut yang ditetapkan pada akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 92,00. Jika capaian kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian pada sebesar **93,38%** dengan kriteria **Baik**.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Makassar (93,31), Balai Besar POM di Surabaya (91,50), Balai Besar POM di Semarang

(88,11) dan Balai Besar POM di Bandung (85,91). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (86,00), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Makassar (108,50%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Penyebab keberhasilan capaian kinerja indikator tersebut, yaitu:

- ☰ Meningkatkan mutu pelayanan publik Balai Besar POM di Bandung, antara lain adanya beberapa inovasi terkait pelayanan publik antara lain LACAK, fasilitasi mesin EDC untuk pembayaran billing pengujian pihak ketiga, serta layanan Informasi dan pengaduan konsumen yang diberikan melalui berbagai media yaitu tatap muka, whatsapp Kabayan dan Sipetrik, telpon, email, media social lainnya, adanya maklumat pelayanan dll.
- ☰ Meningkatkan kompetensi SDM terkait pelayanan publik Balai Besar POM di Bandung.
- ☰ Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik Balai Besar POM di Bandung, misalnya menyediakan materi pendukung dalam bentuk leaflet, banner, poster dan dokumen elektronik lainnya.
- ☰ Kondisi pandemi sangat mempengaruhi kualitas layanan publik yang diberikan BBPOM Di Bandung. Beberapa layanan tetap diberikan tentunya dengan berbagai penyesuaian dan inovasi. Konsultasi dan pemberian layanan secara insentif dilakukan melalui media sosial dan media lainnya.

Alternative solusi yang akan dilakukan pada tahun 2021, antar lain:

- ☰ Pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Publik



- ☰ Melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan masukan responden Balai Besar POM di Bandung.
- ☰ Peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, sosialisasi atau webinar/seminar

**F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

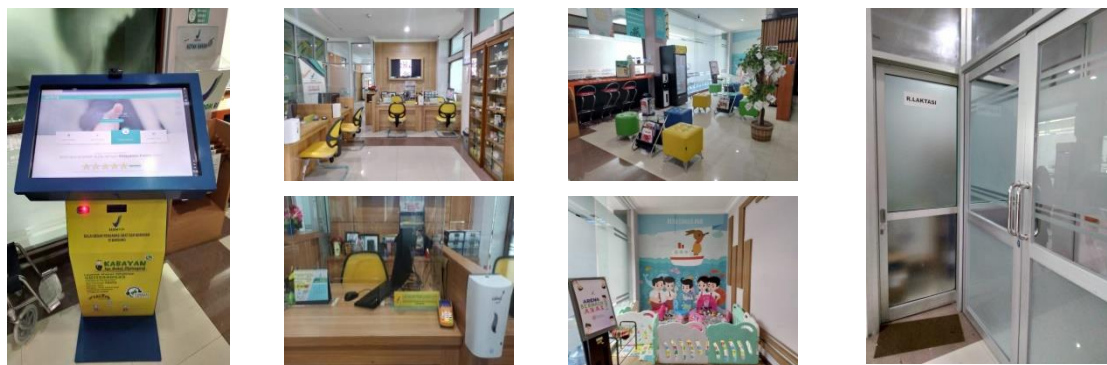
Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan, yaitu:

- ☰ Kegiatan Pelayanan publik Balai Besar POM di Bandung, antara lain adanya beberapa inovasi terkait pelayanan publik antara lain LACAK, fasilitasi mesin EDC untuk pembayaran billing pengujian pihak ketiga, serta layanan Informasi dan pengaduan konsumen yang diberikan melalui berbagai media yaitu tatap muka, whatsapp Kabayan dan Sipetrik, telpon, email, media sosial lainnya, adanya maklumat pelayanan dll.



**GAMBAR 3.16
KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK**

- ☰ Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik Balai Besar POM di Bandung.



**GAMBAR 3.17
SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK**



G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA








Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

**SASARAN
KEGIATAN
KE-4**

**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN
OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK
DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 6 (enam) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keenam indikator diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **104,66%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.19.

**TABEL 3.19
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-4
TAHUN 2020**


INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	87,00%	96,85%	111,32%	Sangat Baik	
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,90%	51,89%	91,20%	Baik	
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	86,51%	101,78%	Baik	
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%	56,59%	113,18%	Sangat Baik	
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76,00%	73,69%	96,96%	Baik	
6. Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	3,7	4,2	113,51%	Sangat Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			104,66%	BAIK	



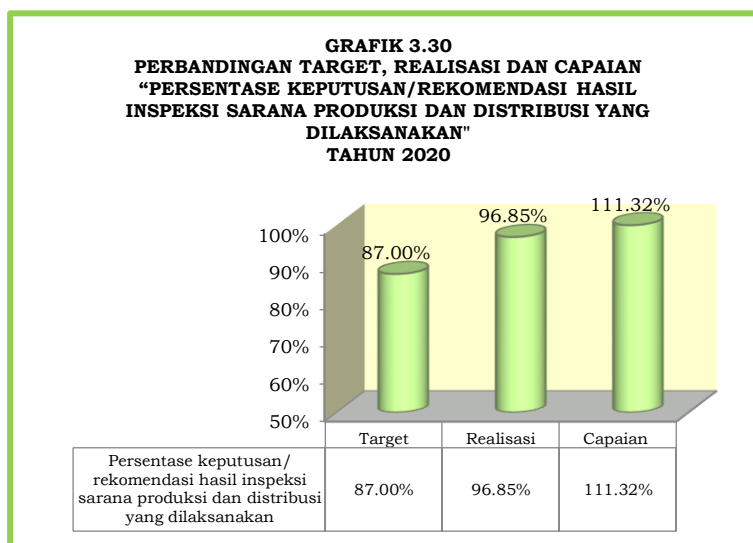
1. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT, persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT, persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT) s.d triwulan n.

TABEL 3.20
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI
DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN”
TAHUN 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.	87,00%	96,85%	111,32%	Sangat Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020



Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 87,00%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada

tahun 2020 sebesar 96,85%. Dengan rincian persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang

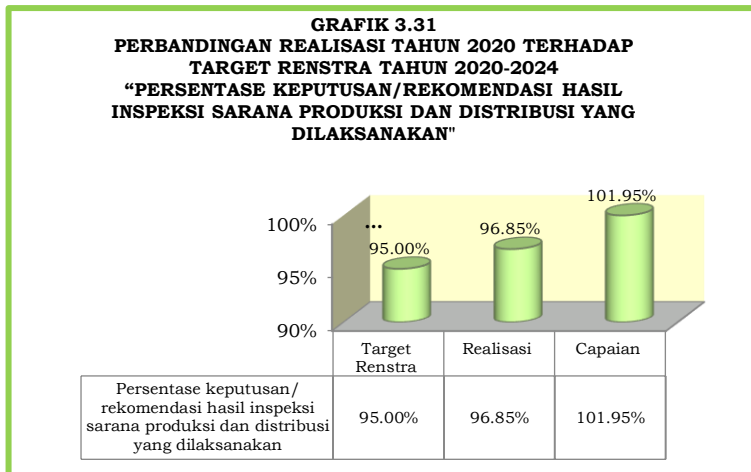


ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%; persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain sebesar 87,42%; dan persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT sebesar 100%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **111,32%** dengan kriteria **Sangat Baik**.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan baru ditetapkan pada tahun 2020 sehingga belum dapat dibandingkan.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan sebesar 95,00%. Jika dihitung terhadap target tersebut maka capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar

101,95% dengan kriteria **Baik**.



E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Bandung (96,85), Balai Besar POM di

Surabaya (88,22), Balai Besar POM di Semarang (81,57) dan Balai Besar POM di Makassar (63,70). Target nasional tidak ditetapkan, sehingga capaian kinerja terhadap target nasional tidak dapat diukur. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.32.

F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kebahagiaan capaian indikator ini disebabkan oleh:

- ☪ Pada tahun 2020, tindak lanjut dari UPT lain atas rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai Besar POM di Bandung melebihi target. Berdasarkan data tahun 2020, target persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain ditetapkan sebesar 48%, sedangkan realisasi pada tahun 2020 sebesar 87,42%.
- ☪ Walaupun dalam kondisi wabah/pandemi penyakit, rekomendasi secara konsisten dapat diterbitkan secara tepat waktu oleh petugas Balai Besar POM di Bandung, Loka POM di Kota Tasikmalaya, dan Loka POM di Kabupaten Bogor.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain :

- ☪ Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- ☪ Pemberian apresiasi kepada pelaku usaha atas perbaikan dari hasil inspeksi.



- ☰ Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.
- ☰ Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan selama wabah/pandemic dengan metode virtual.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindaklanjut yang direncanakan, antara lain:

- ☰ Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan dilakukan setiap bulan, serta dilaporkan melalui Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Inspeksi Tahun 2020
- ☰ Pembahasan Evaluasi Capaian DAK Non Fisik 2020 dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Kefarmasian pada 15 Desember 2020 secara virtual.


F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

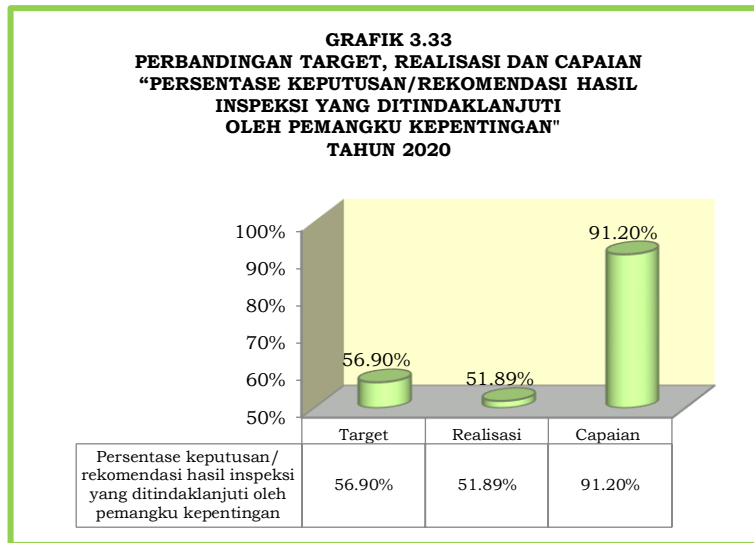
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diukur rata-rata jumlah persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor s.d tahun berjalan.

**TABEL 3.21
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG
DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN”
TAHUN 2020**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,90%	51,89%	91,20%	Baik 



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

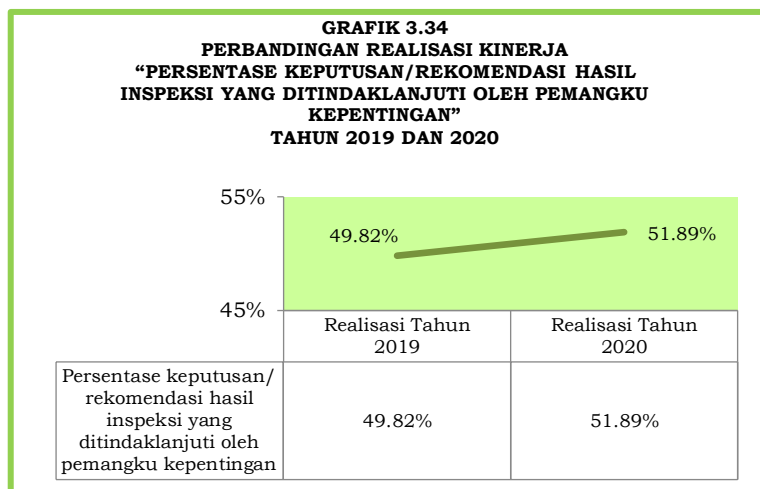


Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 56,90%. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada

tahun 2020 sebesar 51,89%. Dengan rincian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebesar 38,66% dan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebesar 65,12%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **91,20%** dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

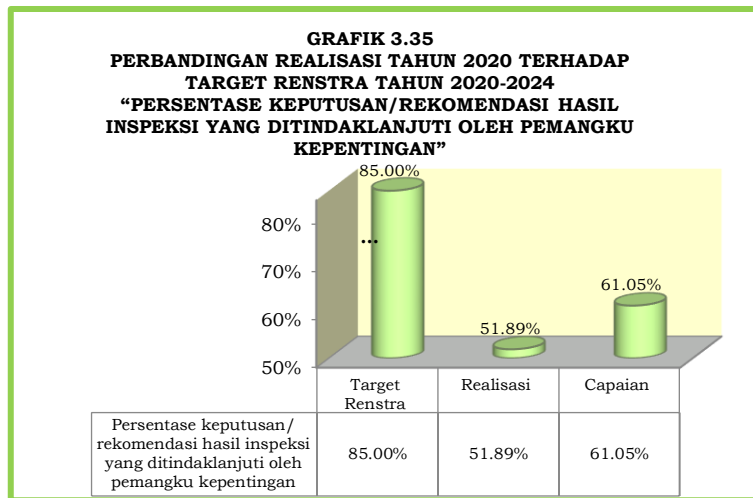
Pada tahun 2020, capaian realisasi meningkat menjadi 51,89% dibandingkan tahun sebelumnya (49,82%). Namun, jika dilihat dari capaian indikator, pada tahun 2020 mengalami penurunan



dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terdapat peningkatan target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis tersebut.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

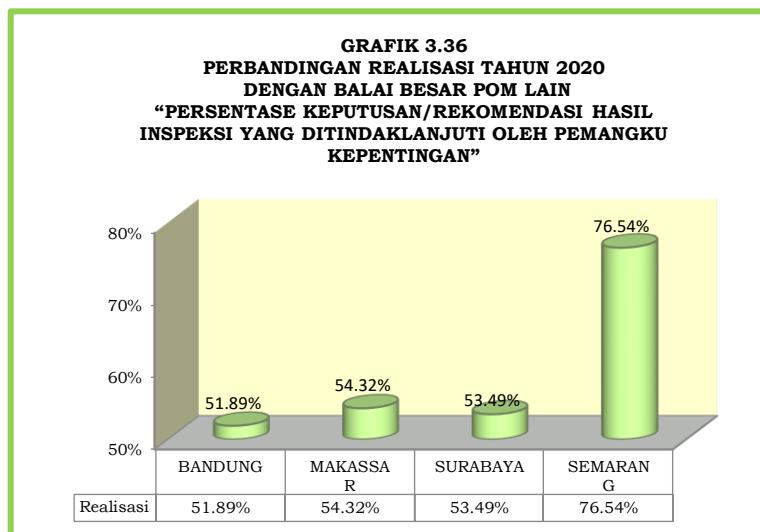


Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 85,00%. Jika dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 61,05% pada

tahun 2020.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL

Realisasi kinerja dari Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Semarang (76,54%), Balai Besar POM di



Makassar (54,32%), Balai Besar POM di Surabaya (53,49%) dan Balai Besar POM di Bandung (51,89%). Target nasional tidak ditetapkan, sehingga capaian kinerja terhadap target nasional tidak dapat diukur. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.36.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kegagalan capaian indikator ini disebabkan oleh:

- ☛ Kurangnya respon sarana terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan



- ☰ Meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk sarana yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga rekomendasi yang diterbitkan lebih banyak.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- ☰ Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan kepada pelaku usaha
- ☰ Meningkatkan monitoring pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☰ Melakukan pertemuan intensif dengan pemangku kepentingan melalui Kegiatan Penguatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan Bersama Pimpinan Daerah dan Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan.

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindaklanjut yang direncanakan, antara lain:

- ☰ Pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan dilakukan setiap bulan, serta dilaporkan melalui Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Seksi Inspeksi Tahun 2020
- ☰ Pembahasan Evaluasi Capaian DAK Non Fisik 2020 dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Sarana Kefarmasian pada 15 Desember 2020 secara virtual.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.


3. PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diukur dengan membandingkan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d triwulan n. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: (1). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; (2). Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; (3). Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; (4). Surat



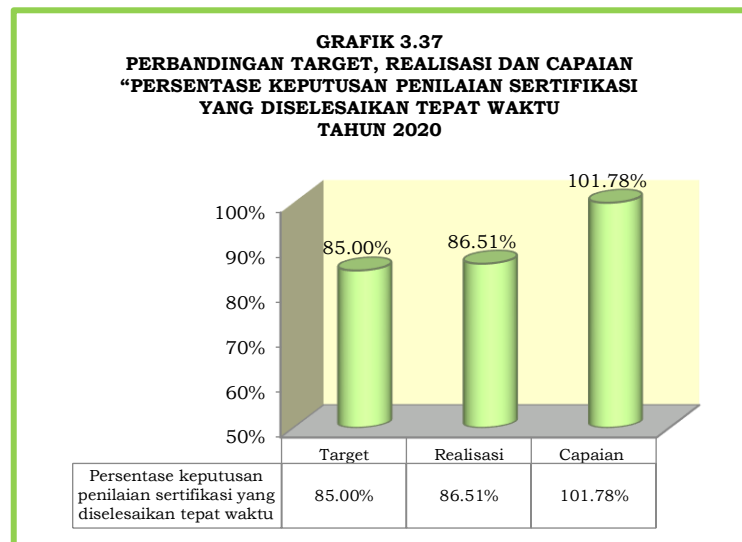
rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; (5). Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; (6). Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olah; (7). Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.

**TABEL 3.22
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI
YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU”
TAHUN 2020**

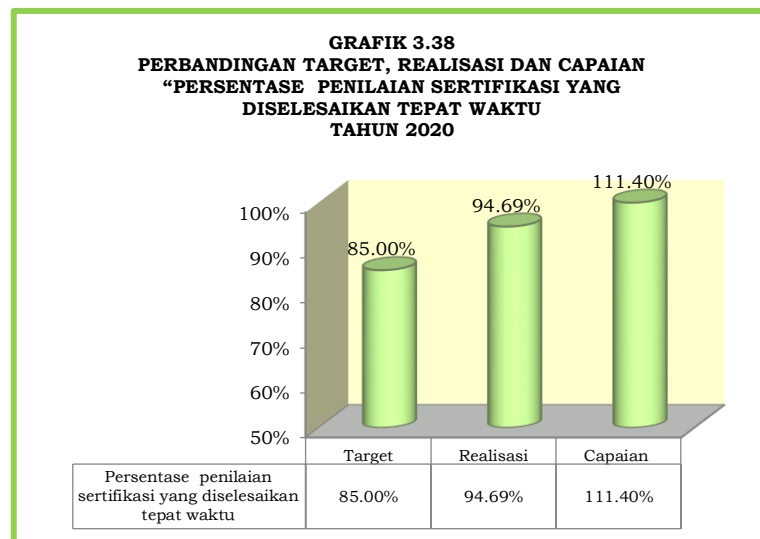
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00%	86,51%	101,78%	Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

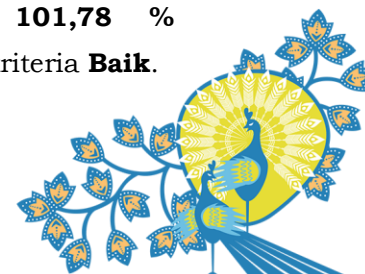
Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 85%. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 sebesar 86,51%. Dengan rincian jumlah keputusan penilaian



sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 2.020 keputusan dan jumlah permohonan penilaian sertifikasi

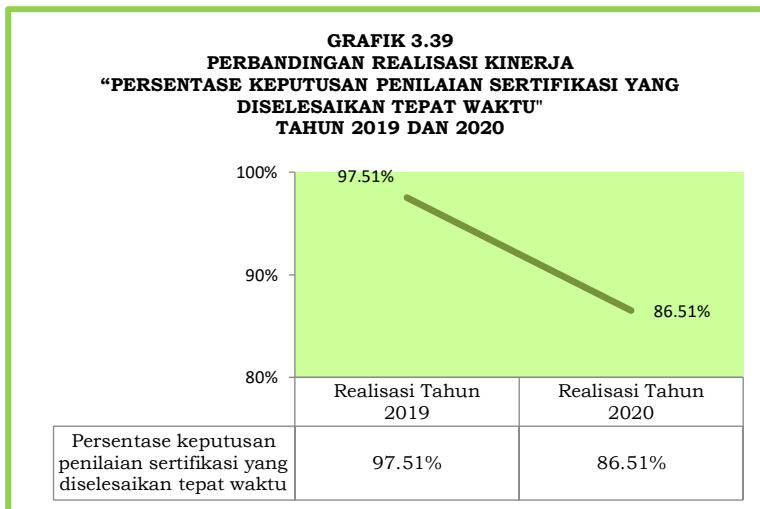


(termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 2.335 permohonan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **101,78 %** dengan kriteria **Baik**.



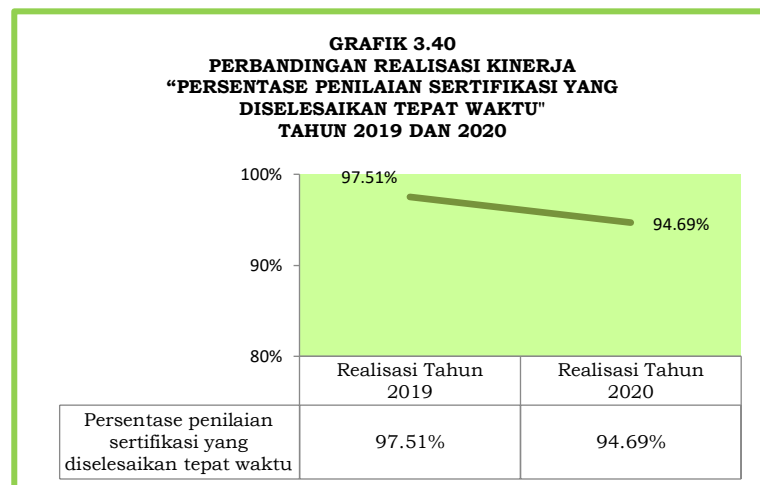
Keputusan penilaian sertifikasi yang dikeluarkan dapat berupa surat hasil pemeriksaan sarana (surat TMK) dan rekomendasi (setelah MK). Persentase capaian sebesar 102% perhitungannya hanya berdasarkan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan tepat waktu dan bukan jumlah total keputusan penilaian sertifikasi. Apabila perhitungannya termasuk penilaian surat TMK maka persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2020 sebesar 94,69% Dengan rincian jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 2.211 keputusan dan jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) sebanyak 2.335 permohonan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 111,40% , kriteria **Sangat Baik**. Perbandingan target dan realisasinya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019



Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2020 adalah 86,51% sedangkan tahun 2019 adalah 97,51% maka penurunannya sebesar 11%.

keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung berdasarkan

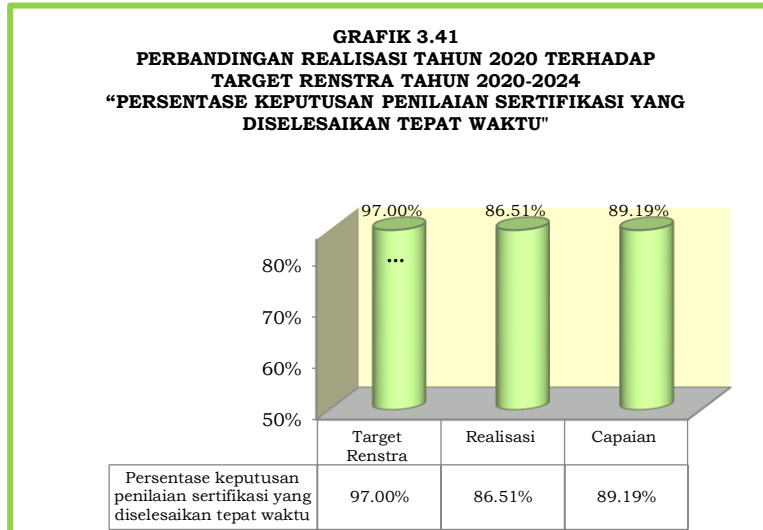


Jika persentase penilaian sertifikasi yang dikeluarkan pada tahun 2020 maka realisasinya adalah sebesar 94,69%. Sedangkan realisasi tahun 2019 adalah 97,51% maka



penurunannya sebesar 2,82%

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 97,00%. Jika capaian kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka

capaian kerjanya sebesar 89,19% dengan kriteria **Baik**. Namun jika menggunakan hasil perhitungan total keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan menjumlahkan seluruh hasil penilaian sertifikasi yang dikeluarkan pada tahun 2020 (94,69%) maka nilai pencapaian sarannya sebesar 97,62%, Kriteria **Baik**.

E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Semarang (99,07%), Balai Besar POM di Surabaya (98,65%), Balai Besar POM di Makassar (96,43%) dan Balai

Besar POM di Bandung (86,51%). Target nasional tidak ditetapkan, sehingga capaian kinerja terhadap target nasional tidak dapat diukur. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.43.



**F. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN ATAS PENINGKATAN KINERJA
SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu tahun 2020 memenuhi target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal berikut:

- ✎ Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memudahkan pelaku usaha khususnya di bidang Obat dan Makanan dalam memenuhi persyaratan administrasi dalam rangka sertifikasi terkait perizinan usaha yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh 92andemi *Online Single Submission* (OSS) berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Import (API).
- ✎ Adanya kebijakan Badan POM dalam penerapan CPOTB bertahap, memudahkan pelaku usaha obat tradisional yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dalam memenuhi persyaratan teknis dalam CPOTB.
- ✎ Keterbukaan dan kemudahan akses informasi bagi seluruh pelaku usaha khususnya terkait persyaratan dan prosedur sertifikasi baik melalui media elektronik dan nonelektronik yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung.
- ✎ Adanya aplikasi e-bpom yang memfasilitasi layanan proses perizinan eksportasi yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung semakin stabil, selain itu kompetensi dan komitmen SDM evaluator yang tinggi sehingga dapat melakukan evaluasi sesuai dengan persyaratan dan memenuhi timeline yang telah ditetapkan.
- ✎ Berbagai Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen di Bidang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung secara rutin berdampak pada peningkatan pemahaman dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai peraturan yang berlaku.
- ✎ Penyelenggaraan desk CAPA secara rutin pada dua bulan terakhir sehingga kendala-kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam rangka pemenuhan CAPA-nya lebih diminimalisir hal ini berdampak pada pencapaian jumlah rekomendasi yang dikeluarkan semakin meningkat
- ✎ Peningkatan kompetensi dan komitmen SDM Balai Besar POM di Bandung dalam kegiatan sertifikasi sehingga sarana produksi dan sarana distribusi yang mengajukan permohonan dalam rangka sertifikasi dapat memenuhi



ketentuan dan dapat diselesaikan sesuai timeline yang telah ditetapkan. Meskipun jumlah SDM sangat kurang dibandingkan dengan beban kerjanya.

- ☰ Pendampingan registrasi melalui online dengan petugas sertifikasi.
- ☰ Walaupun terjadi 93andemic Covid 19, kegiatan sertifikasi tetap berjalan secara optimal karena audit / pemeriksaan sarana dilakukan secara daring (*online*) dan *onsite*.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- ☰ Meningkatkan kompetensi SDM sesuai dengan standar kompetensi teknis yang dipersyaratkan melalui pelatihan/*workshop*/bimtek/diseminasi/webinar mengenai CPPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- ☰ Meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan melalui Bimtek/Sosialisasi/Diseminasi/Penggalangan Komitmen/pendampingan dan desk CAPA.
- ☰ Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi.
- ☰ Meningkatkan sarana dan prasarana kerja pendukung pelaksanaan kegiatan sertifikasi.
- ☰ Peningkatan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya ungkit kegiatan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan.
- ☰ Melakukan kegiatan proaktif jemput bola terhadap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan produksi.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kondisi pandemi yang terjadi sejak akhir triwulan I tahun 2020 menyebabkan pelaksanaan kegiatan sertifikasi/audit sarana baik produksi maupun distribusi yang dilakukan secara onsite menjadi berkurang. Namun kegiatan sertifikasi harus tetap berjalan seiring dengan jumlah permohonan pemeriksaan sarana yang terus bertambah. Sesuai dengan arahan kedeputian II dan Kedeputusan III, untuk pemeriksaan sarana produksi dan distribusi dapat dilakukan secara on desk atau online selama pandemi berlangsung. Pada pelaksanaannya, dengan memperhatikan kondisi peta penyebaran Covid-19 di Jawa Barat yang masih tinggi maka Balai Besar POM di Bandung Di Bandung melakukan pemeriksaan dalam rangka sertifikasi secara online dan atau on site. Pemilihan dan penentuan sarana mana yang online dan sarana mana yang onsite adalah ditentukan berdasarkan pertimbangan lokasi dan golongan industri yang mengajukan permohonan. Sarana UMKM diutamakan untuk diaudit secara on site dengan memperhatikan protokol kesehatan, hal ini dilakukan karena terkadang pelaku usaha UMKM belum terpapar dan kurang memahami prinsip GMP



(CPPOB/CDPOB/CPKB/CPOTB). Dari hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sertifikasi secara online dan on site, masing-masing cara audit tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari pihak pelaku usaha merasa lebih baik saat dilakukan pemeriksaan secara online karena sedang dalam masa pandemi namun di sisi lain audit onsite lebih jelas karena pelaku usaha dapat langsung berkonsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk produksi dan produk yang dihasilkan kepada petugas dan petugas dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan sehingga tidak terjadi salah persepsi yang pada akhirnya antara petugas dan pelaku usaha mendapatkan persepsi yang sama.

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja di tahun 2020 adalah :

- ☰ Bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait Obat dan Makanan yang dialihkan dari luring menjadi daring pada masa pandemic Covid-19.
- ☰ Pada bulan Maret dan bulan November dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelayanan Prima E-Registration Pangan Olahan terpadu dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan Badan POM dengan metode kolaborasi daring dan luring. Dalam kegiatan ini pelaku usaha memperoleh pendampingan khusus sehingga dapat mempercepat proses pendaftaran. Dari kegiatan tersebut diperoleh 7 (tujuh) izin edar produk terbit, 22 (dua puluh dua) akun perusahaan disetujui dan 12 (dua belas) pengajuan produk yang masuk ke tahap pengajuan untuk berpotensi akan selsai. Kegiatan ini diutamakan untuk diikuti oleh pelaku UMKM yang seringkali merasa kesulitan terkait pendaftaran melalui e-registration.
- ☰ Pada bulan Agustus dilaksanakan Bimbingan Teknis CPPOB untuk 40 pelaku usaha UMKM. Di dalam kegiatan ini diberikan materi tentang Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, Cara Pembuatan SOP dan E-Registrasi Pangan Olahan.
- ☰ Di akhir triwulan IV yaitu di bulan November dan Desember dilaksanakan pula pendampingan untuk para pelaku usaha yaitu Desk CAPA Bagi Sarana Produksi. Pada kegiatan ini mengundang pelaku usaha yang sedang dalam tahap penyelesaian CAPA.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode sebelumnya adalah:

- ☰ Meningkatkan kompetensi petugas melalui pelatihan, workshop atau bimtek mengenai CPPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
- ☰ Meningkatkan kompetensi evaluator SKE.



- ☰ Meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam hal regulasi ekspor.
- ☰ Meningkatkan monitoring CAPA sebagai bentuk tindaklanjut pengawasan.

Upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja sesuai tindak lanjut yang direncanakan tahun sebelumnya, antara lain:

- ☰ Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikuti pelatihan dan diseminasi yang diselenggarakan oleh Badan POM dan Balai Besar POM di Bandung antara lain : Updating Isu Seputar Toll Manufacturing Kosmetika, Sosialisasi Hasil Workshop Fasilitator e-Registration Pangan Olahan dan e-Sertifikasi CPOTB Bertahap, Bimbingan Teknis Inspektur CPOTB Lanjutan, Pelatihan Inspektur CPKB Junior, Webinar Sosialisasi Registrasi Pangan Olahan.
- ☰ Meningkatkan pemahaman pelaku usaha melalui Kegiatan pelayanan prima dan bimbingan teknis e-registration pangan olahan yang diselenggarakan pada tanggal 04-05 Maret 2020 bertempat di Hotel El Royal Bandung dengan peserta sebanyak 45 pelaku usaha di Provinsi Jawa Barat dan 15 pelaku usaha diantaranya adalah UMKM binaan dari Balai Besar POM di Bandung. Pada kegiatan ini menerbitkan sebanyak 6 (enam) nomor izin edar MD, 15 (lima belas) akun perusahaan disetujui dan 12 (dua belas) pengajuan produk yang masuk ke tahap pengajuan untuk berpotensi akan selsai. Menyusul dilaksanakan kembali bimbingan teknis e-registration pangan olahan yang diselenggarakan pada tanggal 18 November 2020 bertempat di Hotel Aston Pasteur Bandung dengan peserta luring sebanyak 20 pelaku usaha dan daring sebanyak 100 pelaku usaha. Pada bimtek kedua ini menerbitkan 1 nomor izin edar MD dan 7 akun perusahaan disetujui.
- ☰ Meningkatkan kompetensi SDM dengan mengadakan diseminasi yang diselenggarakan oleh Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM di Bandung diikuti oleh petugas di Bidang Pemeriksaan. Adapun materi yang dibahas adalah Updating Isu Seputar Toll Manufacturing Kosmetika, Sosialisasi Hasil Workshop Fasilitator e-Registration Pangan Olahan dan e-Sertifikasi CPOTB Bertahap, Bimbingan Teknis Inspektur CPOTB Lanjutan, Pelatihan Inspektur CPKB Junior, Webinar Sosialisasi Registrasi Pangan Olahan.
- ☰ Meningkatkan pemahaman pelaku usaha melalui Kegiatan Bimtek CPPOB untuk Pelaku Usaha UMKM Pangan yang diikuti sebanyak 40 UMKM secara Zoom Meeting yang diselenggarakan pada Bulan Agustus 2020. Pada kegiatan ini pelaku usaha diberikan materi tentang CPPOB, Cara Pembuatan SOP dan Tata Cara E-registrasi Pangan. Selain itu, dilaksanakan juga sesi monitoring dan desk CAPA untuk pelaku usaha yang masih dalam proses penyelesaian CAPA.
- ☰ Meningkatkan monitoring CAPA sebagai bentuk tindaklanjut pengawasan dengan cara membuat tabel monitoring surat masuk beserta progresnya.



- ☰ Selain monitoring CAPA yang dilakukan oleh masing-masing petugas, pada tahun 2020 juga diadakan kegiatan Desk CAPA sebanyak 2 kali pertemuan yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting. Dari kegiatan desk capa tersebut, 3 rekomendasi dapat diterbitkan dari Desk CAPA I dan 1 rekomendasi dari Desk CAPA II. Untuk sarana yang lain masih melanjutkan proses CAPA dan sudah berprogress.

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada setiap triwulan, diperoleh hasil bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan hasil Baik. Kendala-kendala yang ada masih dapat diatasi oleh para petugas. Terkait audit dalam rangka sertifikasi, perlu dilakukan desk CAPA secara berkala agar penyelesaian CAPA dari para pelaku usaha dapat segera terpenuhi. Dengan demikian, rekomendasi dapat segera diterbitkan dan pelaku usaha dapat melanjutkan proses pendaftaran produk untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM.

Adapun Rekomendasi yang belum dilaksanakan pada TW 4 (Kendala dan Permasalahan).

- ☰ Upaya peningkatkan kompetensi evaluator SKE belum dilaksanakan karena belum adanya kegiatan dari BPOM terkait updating informasi maupun regulasi tentang SKE yang melibatkan BBPOM Di Bandung.
- ☰ Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha dalam hal regulasi ekspor melalui pemberian informasi kepada pelaku usaha terkait regulasi ekspor.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA


Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

4. PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun n dengan Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada tahun n.

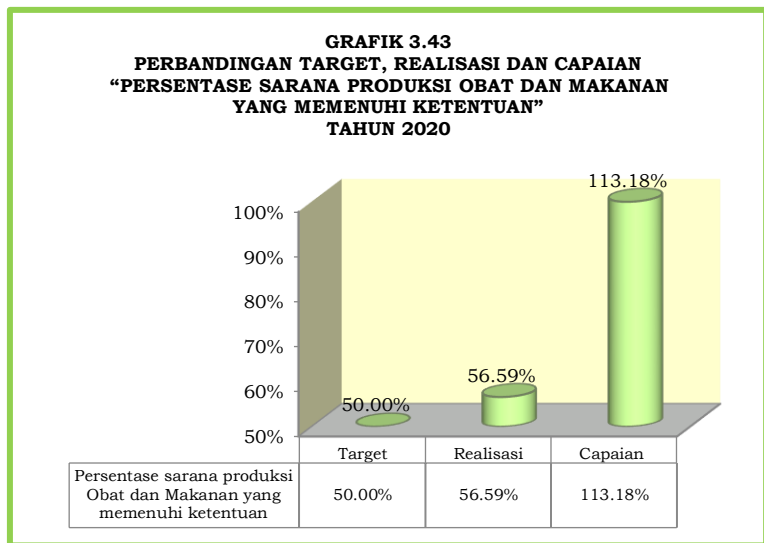


TABEL 3.23
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TAHUN 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%	56,59%	113,18%	Sangat Baik	

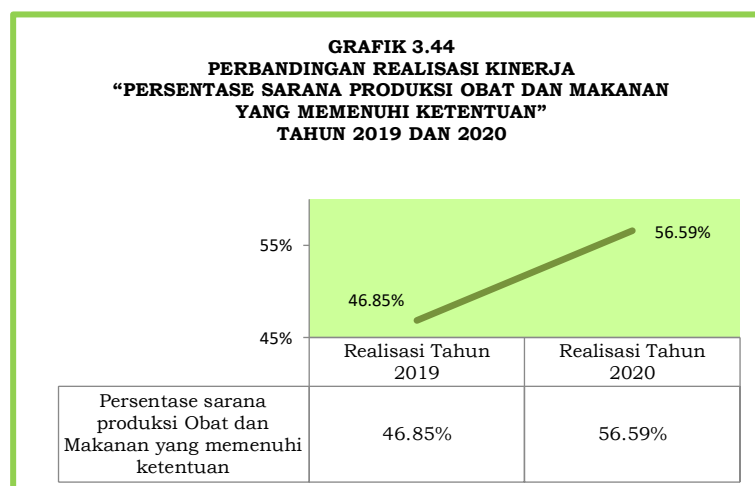
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

Target penetapan kinerja tahun 2020 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 50%. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 sebesar 56,69%.



Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **113%** dengan kriteria **Sangat Baik**. Dengan rincian jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 232 sarana dan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa sebanyak 410 sarana.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 TERHADAP TAHUN 2019

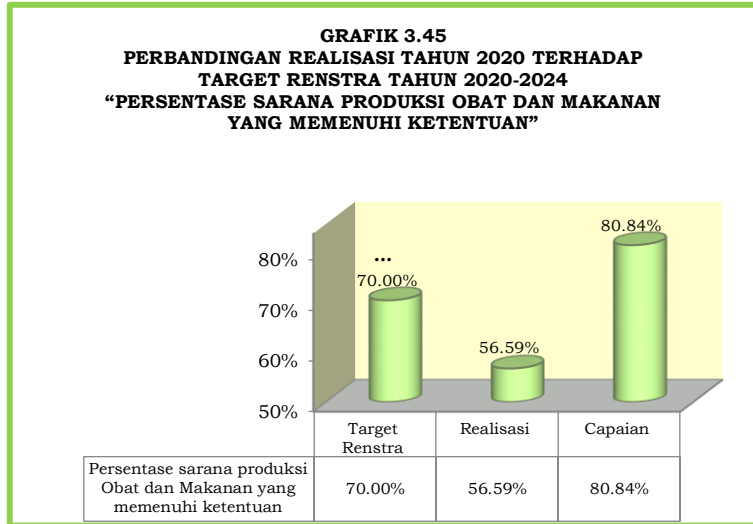


Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 adalah 56,59% sedangkan tahun 2019 adalah 46,85% maka terjadi



peningkatan sebesar 9,74%

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

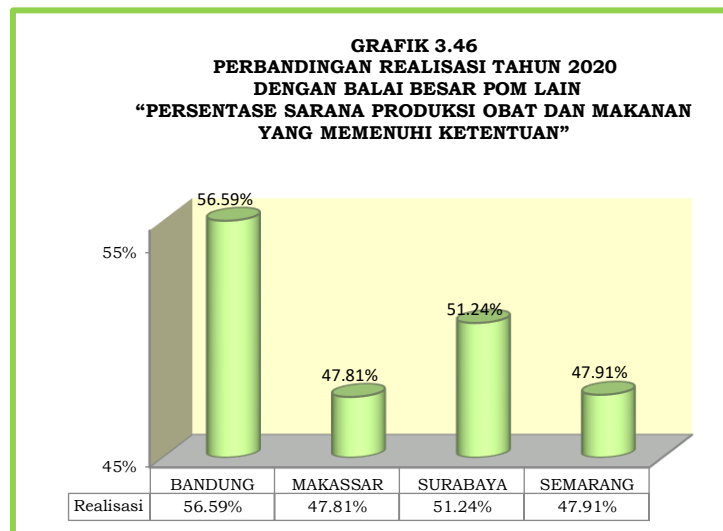


Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 70,00%. Jika capaian kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kerjanya

sebesar 80,84% dengan kriteria **Cukup**.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL

Realisasi kinerja dari Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan secara berturut-turut yaitu : Balai Besar POM di Bandung (56,59%), Balai Besar POM di Surabaya (51,24%), Balai Besar POM di Semarang (47,91%) dan



Balai Besar POM di Makassar (47,81%). Target nasional tidak ditetapkan, sehingga capaian kinerja terhadap target nasional tidak dapat diukur. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.46.



**E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/
PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH
DILAKUKAN**

Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan oleh:

- ☰ Berdasarkan pemeriksaan pemenuhan aspek CPPOB oleh sarana produksi makanan pada tahun 2020, terdapat sarana yang memenuhi ketentuan sebanyak 83 sarana dari 198 sarana yang diperiksa. Terjadi peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap aspek fisik bangunan, sanitasi, hygiene karyawan dan tindakan pengawasan.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang harus dilakukan dalam rangka mempertahankan capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain :

- ☰ Hasil pemeriksaan sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) akan dijadikan sebagai salah satu aspek pertimbangan dalam kajian resiko penyusunan prioritas pemeriksaan sarana.
- ☰ Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☰ Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.
- ☰ Menyediakan pelayanan *help desk* untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi

F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan tindaklanjut pada tahun 2020 sebagai berikut:

- ☰ Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi terhadap perencanaan yang dibuat pada awal tahun.
- ☰ Telah dilakukan Bimbingan Teknis Inspeksi dan Sanitasi Pangan pada tanggal 7 – 11 Desember 2020.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA


Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



5. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

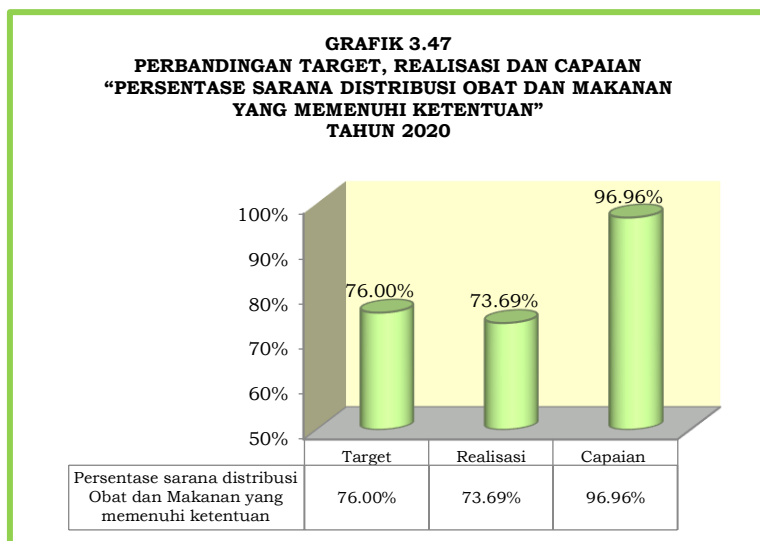
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun n dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa pada tahun n.

TABEL 3.24
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
YANG MEMENUHI KETENTUAN”
TAHUN 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	76,00%	73,69%	96,96%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

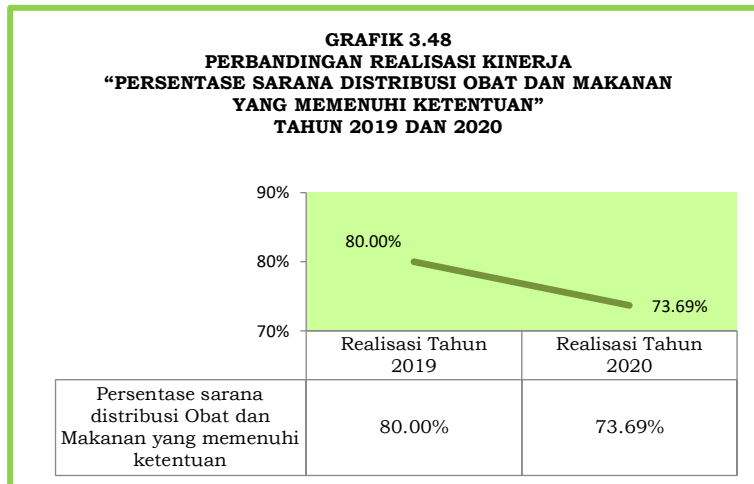
Target tahun 2020 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 76%. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 sebesar 73,69%. Dengan demikian



persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **96,96%** dengan kriteria **Baik**. Dengan rincian jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebanyak 1109 sarana dan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa sebanyak 1505 sarana.



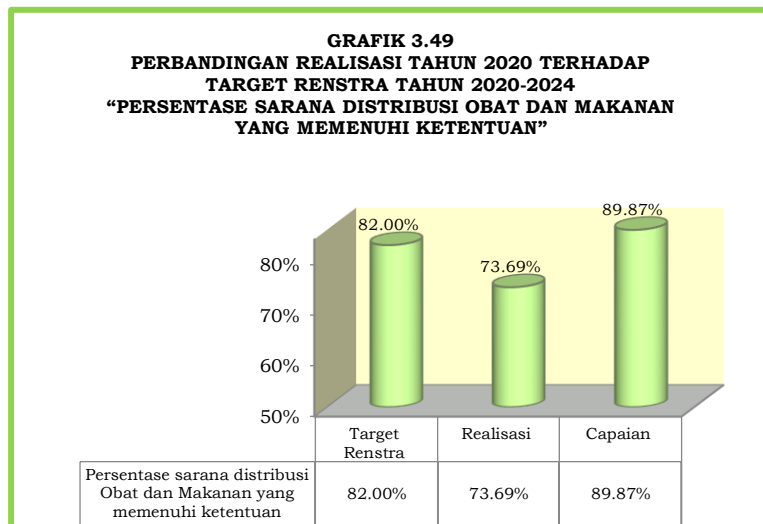
B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 TERHADAP TAHUN 2019



Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2020 adalah 73,69% sedangkan tahun 2019 adalah 80,00% maka terjadi penurunan sebesar 6,31%.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

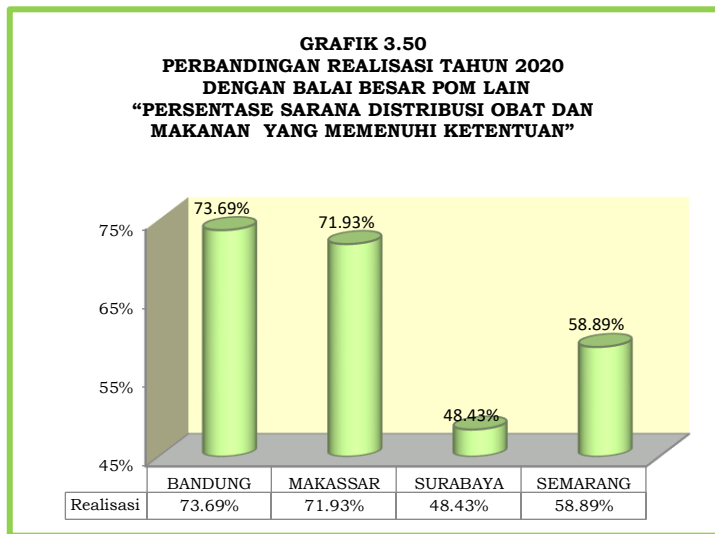
Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 82%. Jika dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 89.87% dengan kriteria Baik.



Perlu peningkatan capaian pada tahun selanjutnya untuk mencapai target akhir renstra yang ditetapkan.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Bandung (73,69%), Balai Besar POM di Makassar (71,93%), Balai Besar POM di Semarang (58,89%) dan Balai Besar

POM di Semarang (58.89%). Target nasional tidak ditetapkan, sehingga capaian kinerja terhadap target nasional tidak dapat diukur. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.51.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kegagalan capaian indikator ini disebabkan oleh:

- ☛ Selama wabah/pandemi penyakit, pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan tidak bisa optimal dibandingkan tahun sebelumnya.
- ☛ Siklus pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian ke setiap sarana relative lama sehingga kesadaran akan pemenuhan ketentuan relative rendah.

Terkait hal tersebut diatas, maka alternatif solusi yang telah dilakukan dalam rangka memperbaiki capaian kinerja indikator kegiatan tersebut antara lain:

- ☛ Hasil pemeriksaan sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) akan dijadikan sebagai salah satu aspek pertimbangan dalam kajian resiko penyusunan prioritas pemeriksaan sarana.
- ☛ Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan.
- ☛ Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.
- ☛ Menyediakan pelayanan *help desk* untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana distribusi.



F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA (INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL)

Berdasarkan evaluasi sebelumnya, telah dilakukan tindak lanjut pada tahun 2020 sebagai berikut:

- ☰ Telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian rekomendasi secara berkala berdasarkan rekomendasi periode sebelumnya.
- ☰ Melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat dan Organisasi Profesi untuk meningkatkan kesadaran penanggung jawab pengelola obat di sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian dalam pemenuhan pedoman teknis pengelolaan obat yang baik.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

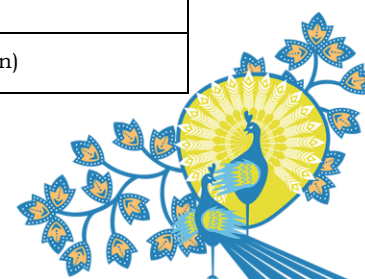
Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.3.

6. INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG

Penilaian kinerja internal Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang dilakukan terhadap 6 (enam) aspek, terdiri atas: (1) Kebijakan pelayanan; (2) Profesionalisme SDM; (3) Sarana Prasarana; (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik; (5) Konsultasi dan Pengaduan; serta (6) Inovasi. Indeks Pelayanan Publik merupakan hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.092.1.2.03.20.111 Tahun 2020. Penilaian kinerja internal UPP di lingkungan BPOM dilaksanakan pada Bulan Juli sampai dengan Agustus 2020.


**TABEL 3.25
KATEGORI NILAI KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK**

RANGE NILAI	KATEGORI	MAKNA
0 - 1.00	F	Gagal
1.01 - 1.50	E	Sangat Buruk
1.51 - 2.00	D	Buruk
2.01 - 2.50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2.51 - 3.00	C	Cukup
3.01 - 3.50	B-	Baik (Dengan Catatan)

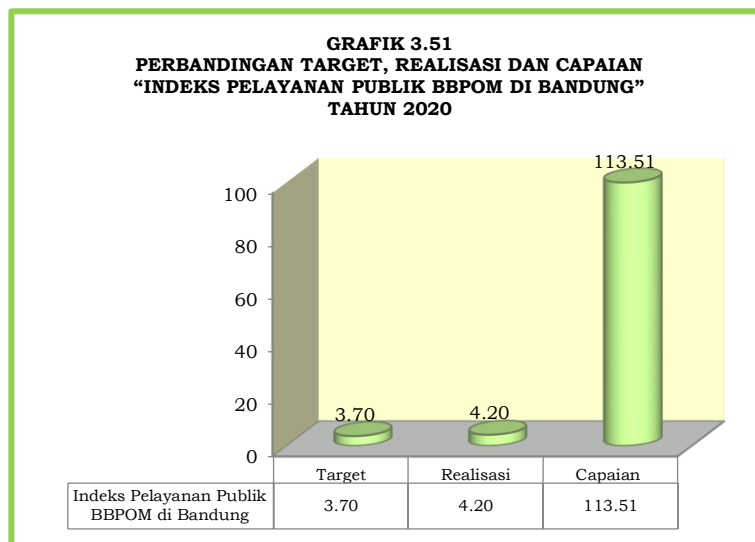


3.51 – 4.00	B	Baik
4.01 – 4.50	A-	Sangat Baik
4.51 – 5.00	A	Pelayanan Prima

TABEL 3.26
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	3,7	4,2	113,51%	Sangat Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

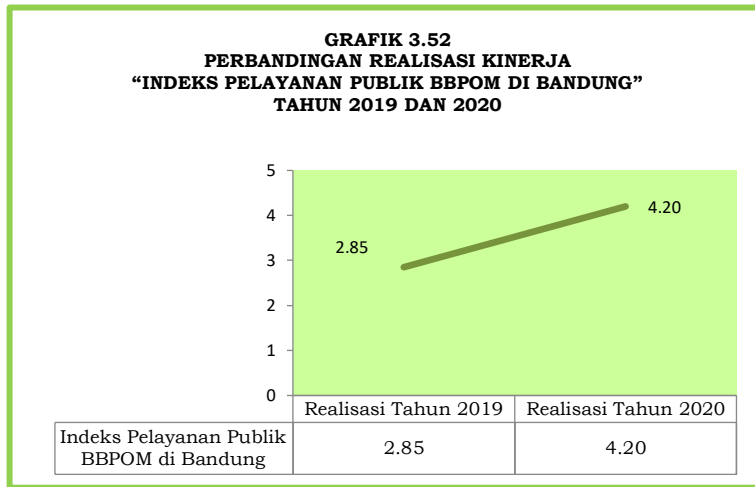


Target indikator tersebut yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 3,7, dengan realisasi sebesar 4,2 (Sangat Baik) diatas rata-rata IPP Unit Kerja Pusat BPOM sebesar 4,14 (Sangat Baik) dan rata-rata IPP UPT BPOM sebesar 4,00

(Baik). Dengan demikian persentase capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas sebesar **113,51%** dengan kriteria **Sangat Baik**.

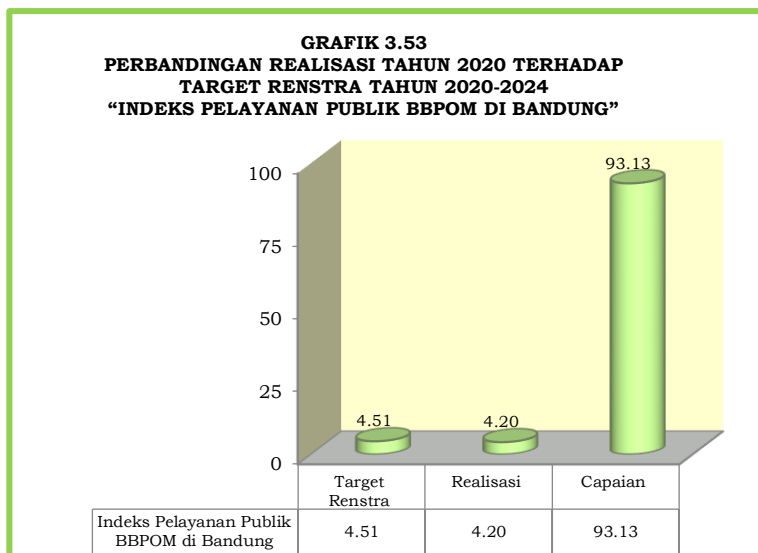


B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019



Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung pada tahun 2020 adalah 4,20 sedangkan tahun 2019 adalah 2,85 maka terjadi peningkatan sebesar 1.35.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

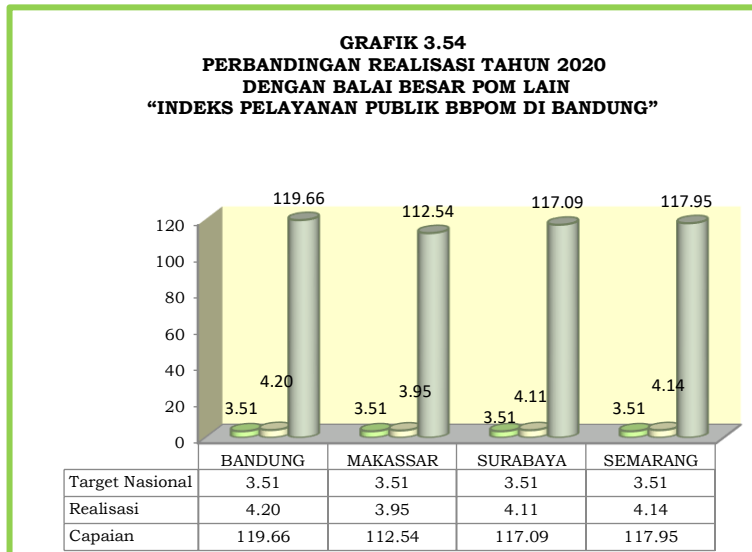


Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 4.51. Jika dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 93,13% dengan kriteria Baik.

Perlu peningkatan capaian pada tahun selanjutnya untuk mencapai target akhir renstra yang ditetapkan.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Bandung (4,20), Balai Besar POM di Semarang (4,14), Balai Besar POM di Surabaya (4,11) dan Balai Besar POM di

Makassar (3,95). Jika realisasi kinerja indikator tersebut dibandingkan terhadap target nasional (3,51), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Bandung (119,66%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.54.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG AKAN DILAKUKAN PADA TAHUN 2021

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran pada triwulan IV disebabkan antara lain oleh:

- ☰ Peningkatan sarana dan prasarana ruang pelayanan publik. Ruang pelayanan publik telah terintegrasi satu pintu untuk seluruh layanan yang terdiri dari; (1) Layanan Informasi; (2) Layanan Pengujian; (3) Layanan Pengaduan; dan (4) Layanan Sertifikasi. Selain itu, ruang tunggu dilengkapi dengan free coffee, akses wifi gratis, kantin kejujuran, kotak saran, media cetak/media siar (TV), area bermain anak, ruang ibu menyusui dan berbagai akomodasi untuk penyandang disabilitas.
- ☰ Adanya maklumat pelayanan dan maklumat kebijakan standar pelayanan publik dan penerapan inovasi pelayanan publik di lingkungan BBPOM di Bandung yang telah disosialisasikan kepada seluruh masyarakat antara lain: melalui aplikasi SIPETA (Sistem Informasi Pelayanan Tamu) yang dapat diakses oleh seluruh tamu BBPOM di Bandung dan spanduk di depan kantor BBPOM di Bandung dan penerapannya dilakukan secara konsisten serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- ☰ Beberapa inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh BBPOM di Bandung antara lain : (1) layanan permohonan pemeriksaan sarana oleh



Balai (PSB) melalui : bit.ly/psbbandung; (2) layanan pengaduan dan informasi melalui program “KABAYAN” (Kepala Balai Melayani); (3) Aplikasi “LACAK” untuk layanan pengujian pihak ketiga; (4) formulir pengaduan melalui aplikasi SIPETA; (5) Program “KELOM GEULIS” (Kenalan Dengan BBPOM di Bandung Berbagi Edukasi Dan Layanan Informasi, Sae Pisan) melalui IG Live dan IG Radio. Seluruh inovasi pelayanan publik BBPOM di Bandung telah disosialisasikan melalui media sosial dan WAG Mal Pelayanan Publik Kota Bandung.

- ☰ Pada masa pandemik Covid-19, BBPOM di Bandung tetap menyelenggarakan berbagai kegiatan antara lain: Bimbingan Teknis Penerapan CPPOB Pada UMKM secara daring, Audit PSB baik secara onsite dengan adaptasi kebiasaan baru dan audit secara daring, serta penerbitan SKE 1 HK (SLA 2 HK).

Alternatif solusi yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, yaitu:

- ☰ Membuat standar pelayanan publik yang lebih berdampak pada masyarakat maupun pelaku usaha, mensosialisasikannya dan melaksanakannya secara konsisten.
- ☰ Petugas pelayanan publik diberikan pelatihan terkait peningkatan teknis maupun sosio kultural sehingga semakin meningkat kompetensi dan pemahaman tentang pembangunan budaya kerja yang baik dan berdaya saing.
- ☰ Sarana prasarana yang lebih ditingkatkan lagi yaitu terkait akses pemberian informasi yang lebih mudah, cepat dan terjangkau sebagai contoh pengadaan call centre.
- ☰ Sistem informasi yang diberikan pada masyarakat lebih beragam baik melalui media cetak maupun elektronik. Penyebaran bahan-bahan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) baik melalui media cetak maupun elektronik lebih intensif. Pemberdayaan system informasi yang sudah ada seperti subsite Balai dibuat lebih informatif dan komunikatif.
- ☰ Sarana konsultasi dan pengaduan disamping diselenggarakan secara langsung juga dilakukan secara online/ daring dan diinformasikan kepada masyarakat secara lebih intensif. Kotak saran selain langsung juga bisa disampaikan secara digital.
- ☰ Inovasi-inovasi terkait pelayanan publik yaitu pelayanan pengujian (aplikasi LACAK), pemberian informasi dan pengaduan (KABAYAN) dan layanan sertifikasi SKE (Surat Keterangan Ekspor) pelaksanaannya secara konsisten dan update.



F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja BBPOM di Bandung pada periode sebelumnya adalah:

- ☰ Secara konsisten melaksanakan maklumat pelayanan dan maklumat kebijakan standar pelayanan publik dan penerapan inovasi pelayanan publik di lingkungan BBPOM di Bandung, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- ☰ Melakukan inovasi pelayanan publik lainnya terutama untuk peningkatan profesionalisme SDM pelayanan publik.

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- ☰ Meningkatkan subsite Balai Besar POM di Bandung sehingga lebih informatif dan komunikatif
- ☰ Peningkatan sarana prasana/ fasilitas di ruang dan area layanan publik dalam hal kelengkapan, kemudahan, kenyamanan dan keamanannya yaitu ruang pelayanan terpadu, area parkir, toilet, loket layanan, wifi, kantin, AC dan lain-lain.
- ☰ Layanan konsultasi dan pengaduan selain diberikan di loket pelayanan juga diberikan secara online via whatsapp yaitu KABAYAN (kepala Balai melayani), WA grup pengujian dan via email bbpombandungpsb@gmail.com untuk pengiriman permohonan audit PSB (pemeriksaan sarana balai).
- ☰ Petugas pelayanan publik mengikuti berbagai pelatihan teknis maupun sosio kultural untuk meningkatkan kompetensinya sehingga pemberian informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha lebih cepat, akurat dan update.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



**SASARAN
KEGIATAN
KE-5**

**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI,
INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar **100,94%** dengan kriteria **Baik**. Hasil Selengkapny dapat dilihat pada tabel 3.43.



TABEL 3.27
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-5
TAHUN 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,43	90.70	103,74%	Baik	
2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16,00	16,00	100,00%	Baik	
3. Jumlah desa pangan aman	6,00	6,00	100,00%	Baik	
4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2,00	2,00	100,00%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100,94%	BAIK	

1. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Beberapa jenis Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi: (a) KIE melalui media cetak dan elektronik; (b) KIE langsung ke masyarakat; dan (c) KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria: (a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima; (c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; (d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Pengolahan data kuesioner KIE dilakukan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan Badan POM yang dilakukan setiap semester.

Penetapan hasil pengukuran indikator tersebut pada triwulan II, III DAN IV berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM Nomor : B-HM.11.02.2.25.07.20.381 Tanggal 8 Juli 2020 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 2 tahun 2020, B-HM.11.02.2.25.10.20.617 tanggal 10 Oktober 2020 tentang tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 3 tahun 2020 dan HM.11.02.25.252.01.21.13 Tanggal 06 Januari 2021 tentang Indeks Efektivitas KIE




Obat dan Makanan Triwulan 4 tahun 2020. Pengukuran indikator tersebut menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4(empat) aspek KIE yang terdiri dari: (1) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE; (2) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima; (3) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan (4) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan. Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2020 sebagai berikut:

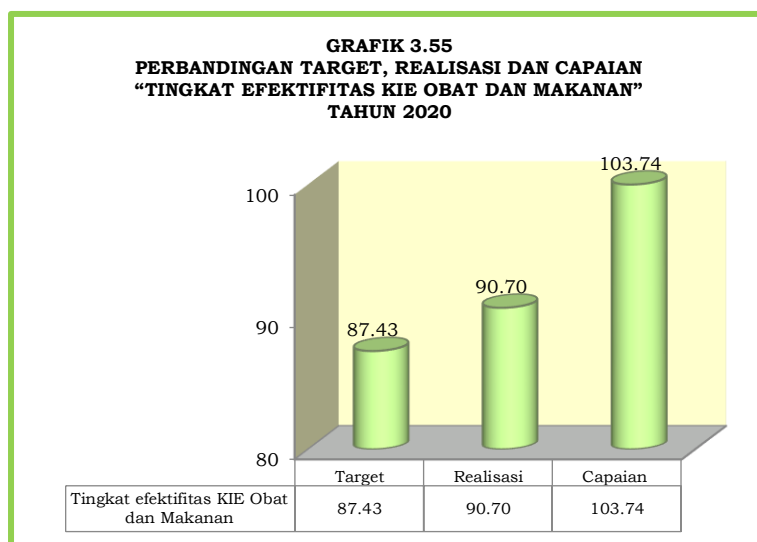
**TABEL 3.28
KATEGORI PENILAIAN
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2020**

SKOR INDEKS 100	INTERPRESTASI EFEKTIFITAS
<65.00	Kurang Efektif
65.01 - 75.00	Cukup Efektif
75.01 - 85.00	Efektif
85.01 - 95.00	Sangat Efektif
95.01 - 100	Sangat Efektif Sekali

**TABEL 3.29
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”
2020**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,43	90.70	103,74%	Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020



Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2020 adalah sebesar 87,43. Realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan tahun 2020 sebesar 90.70 (Sangat Efektif)



dibawah nilai pada tingkat nasional sebesar 92,06 (Sangat Efektif). Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar **103,47%** dengan kriteria **Baik**. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

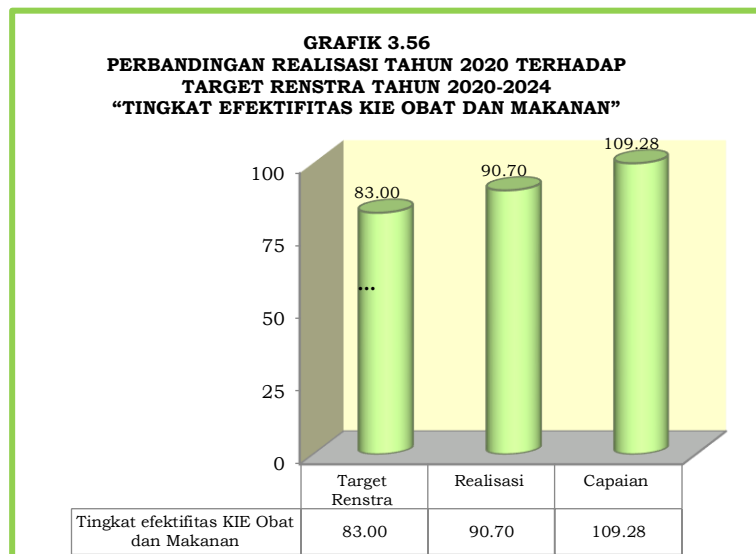
**TABEL 3.30
REALISASI
“TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2020**

UNIT KERJA/ REALISASI	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TAHUN 2020
BBPOM di Bandung	91,80	91,88	91,58	91.73
Loka POM di Kota Tasikmalaya	91,38	87,97	90,46	89.94
Loka POM di Kab. Bogor	91,23	88,91	91,11	90.45
TRIWULAN II	91,47			
TRIWULAN III		90,53		
TRIWULAN IV			90,70	
TAHUN 2020				90.70

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Indikator tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat baru ditetapkan pada tahun 2020 sehingga belum dapat dibandingkan.

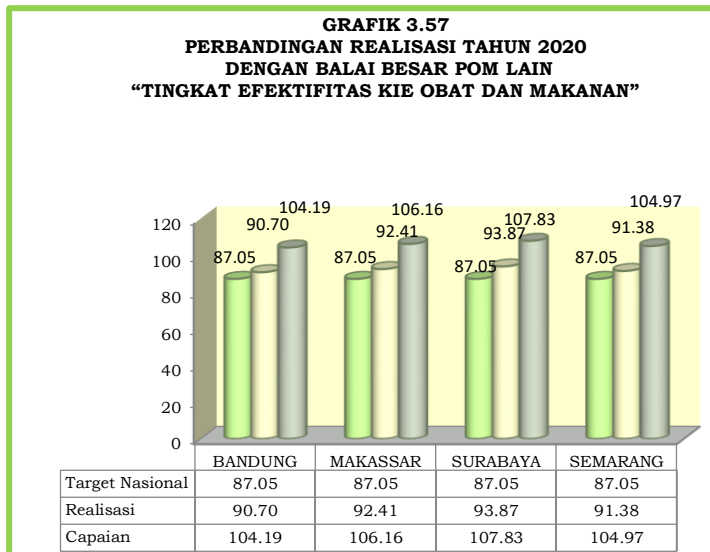
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 83. Jika dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 109,28% dengan kriteria Baik.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan secara berturut-turut yaitu: Balai Besar POM di Surabaya (93,87), Balai Besar POM di Makassar (92,41), Balai Besar POM di Semarang (91,38) dan Balai Besar POM di Bandung (90,70). Jika realisasi kinerja indikator

tersebut dibandingkan terhadap target nasional (87,05), maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Surabaya (107,83%%). Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.57.

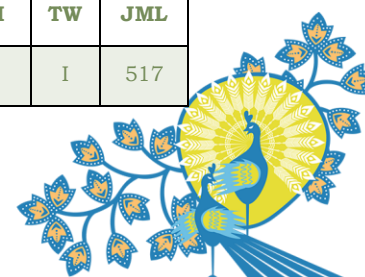
E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran disebabkan antara lain oleh:

- ☛ Kebijakan pemerintah selama masa awal pandemik Covid 19 berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *Work From Home* (WFH). Kebijakan ini menyebabkan pembatasan pelayanan informasi melalui loket ULPK. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan inovasi merubah layanan informasi tatap muka menjadi layanan informasi secara daring dengan membuat layanan informasi melalui whatsapp “KABAYAN” (Kepala Balai Melayani). Inovasi ini terbukti dapat meningkatkan jumlah layanan informasi. Pada triwulan III jumlah layanan informasi yg dilaporkan pada aplikasi simpellpk.pom.go.id sebanyak 841 pada triwulan IV menjadi 722. Jumlah layanan informasi melalui Whatsapp, medsos dan email hampir 2 kali lipat dibandingkan jumlah layanan informasi secara konvensional atau melalui tatap muka dan telepon.

TABEL 3.31
LAYANAN INFORMASI TAHUN 2020

NO	BULAN	WA	EMAIL	MEDSOS	LANGSUNG	TELPON	JUMLAH	TW	JML
1	JANUARI	0	0	0	141	53	194	I	517



NO	BULAN	WA	EMAIL	MEDSOS	LANGSUNG	TELPON	JUMLAH	TW	JML
2	PEBRUARI	0	0	0	120	42	162		
3	MARET	41	8	0	82	30	161		
4	APRIL	52	0	3	2	5	62		
5	MEI	52	29	10	2	9	102	II	433
6	JUNI	124	14	5	112	14	269		
7	JULI	121	18	4	116	22	281		
8	AGUSTUS	131	16	25	36	48	256	III	841
9	SEPTEMBER	130	24	9	108	33	304		
10	OKTOBER	117	16	25	85	5	248		
11	NOVEMBER	114	24	36	104	0	278	IV	725
12	DESEMBER	117	6	23	53	0	199		
	JUMLAH	999	155	140	961	261	2516		2516

- ☪ KIE dilakukan melalui media sosial ditingkatkan facebook, Instagram, dengan program *one day one post* serta program 'KELOM GEULIS' (Kenalan Dengan BBPOM di Bandung Berbagi Edukasi Dan Layanan Informasi, Sae Pisan) melalui IG Live dan IG Radio.
- ☪ KIE kepada masyarakat luas dilakukan dengan tatap muka dilakukan dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan
- ☪ KIE secara dilaksanakan secara daring meliputi Webinar Keamanan Pangan untuk Generasi Emas dan Webinar Sosialisasi SAKA POM dan pengenalan Aplikasi Pramuka SAPA. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama lintas sector terkait Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kwarda Provinsi Jawa Barat, Kwarda Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
- ☪ KIE di Loka POM di Kota Tasikmalaya melalui media sosial seperti facebook, Instagram dan twitter ditingkatkan. Adanya program IG Live "NYARITA" yang dilaksanakan tiap 1 bulan sekali meningkatkan cakupan masyarakat penerima informasi.
- ☪ KIE di Loka POM di Kota Tasikmalaya juga dilakukan secara daring melalui program WARTA (Webinar Loka POM di Kota Tasikmalaya) antara lain KIE Keamanan Pangan Ritel di Era New Normal, Webinar CPOTB untuk Tenaga Teknis Kefarmasian dan Sosialisasi Peraturan Badan POM No. 4 Tahun 2018

Alternatif solusi yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, yaitu:

- ☪ Selama masa pandemi KIE dapat dilakukan dengan berbagai cara secara daring maupun luring.



- ☰ KIE secara daring dapat dilakukan melalui media sosial berupa instgram, facebook, youtube
- ☰ KIE dapat dilaksanakan melalui media cetak/radio/televisi untuk memperluas cakupan masyarakat.
- ☰ Kegiatan KIE dapat dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, dengan sudah adanya persetujuan EUA vaksin COVID-19
- ☰ Melakukan inovasi program KIE sesuai karakteristik masyarakat Jawa Barat sehingga informasi dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat

F. EVALUASI DAN ANALISIS TERKAIT TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Rekomendasi untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BBPOM di Bandung pada periode sebelumnya adalah:

- ☰ Pelayanan informasi melalui media komunikasi lebih ditingkatkan, bukan hanya melalui infografis juga melakukan *Ig Live*, Webinar serta *talkshow* melalui radio.
- ☰ Ketersediaan Balai Besar POM di Bandung untuk hadir di Mall pelayanan terpadu yang akan ada di Kota Bandung, diharapkan akan meningkatkan efektifitas KIE Obat dan Makanan.
- ☰ Ketersediaan Loka POM di Kota Tasikmalaya untuk hadir di Mall Pelayanan Terpadu yang akan ada di Kota Tasikmalaya, diharapkan akan meningkatkan efektifitas KIE Obat dan Makanan.

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- ☰ Melaksanakan KIE melalui Instagram, Facebook dan Youtube tentang issue obat dan makanan, issue Kesehatan dan informasi lainnya melalui program *one day one post*.
- ☰ Melaksanakan KIE melalui *Ig Live* dengan program Kelom Geulis (Kenalan dengan BBPOM Bandung Berbagi Edukasi dan Layanan Informasi Sae Pisan)
- ☰ Melaksanakan KIE melalui radio bekerjasama Sonora dan Pikiran Rakyat FM serta melalui media cetak bekerjasama dengan Jabar Express
- ☰ Melaksanakan webinar Keamanan Pangan untuk Generasi Emas bekerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- ☰ Melaksanakan webinar Sosialisasi SAKA POM dan Perkenalan Aplikasi Pramuka SAPA bekerjasama Kwarda dan Kwardcab se_Jawa Barat.
- ☰ Melaksanakan KIE dengan Tokoh Masyarakat secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan



- ☰ Melakukan webinar Keamanan Pangan bekerjasama dengan Aprindo bagi ritel modern, bekerjasama dengan PD Pasar bagi komunitas pasar, organisasi masyarakat pramuka.
- ☰ Melaksanakan KIE melalui IG Live dengan program “NYARITA”
- ☰ Melaksanakan KIE secara daring melalui program WARTA (Webinar Loka POM di Kota Tasikmalaya) antara lain KIE Keamanan Pangan Ritel di Era New Normal, Webinar CPOTB untuk Tenaga Teknis Kefarmasian dan Sosialisasi Peraturan Badan POM No. 4 Tahun 2018

Rekomendasi yang tidak dapat dilaksanakan:

- ☰ Mall pelayanan terpadu di kota Bandung, belum dapat terlaksana dikarenakan sarana mall masih dalam taraf pembangunan.
- ☰ Mall Pelayanan Terpadu di Kota Tasikmalaya belum dapat terlaksana dikarenakan sarana mall masih dalam taraf pembangunan (surat permohonan keikutsertaan sudah disampaikan).

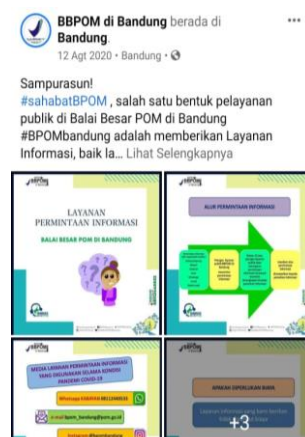
G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan, yaitu:

- ☰ KIE melalui Instagram, Facebook dan Youtube tentang issue obat dan makanan, issue Kesehatan dan informasi lainnya melalui program *one day one post*.



KIE melalui media social Youtube



KIE melalui media social Facebook

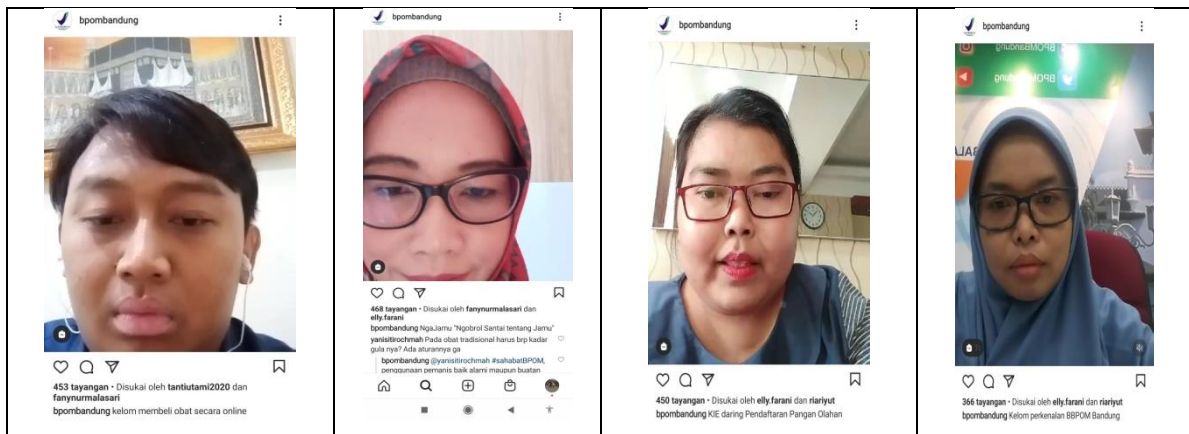




KIE melalui media sosial Instagram KIE melalui media sosial Instagram

**GAMBAR 3.18
MEDIA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)**

🏠 KIE melalui *Ig Live* dengan program Kelom Geulis (Kenalan dengan BBPOM Bandung Berbagi Edukasi dan Layanan Informasi Sae Pisan)



**GAMBAR 3.19
KIE MELALUI IG LIVE**

🏠 KIE melalui radio bekerjasama Sonora, Pikiran Rakyat FM melalui media cetak bekerjasama dengan Jabar Express





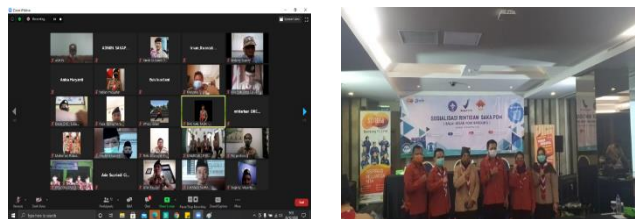
GAMBAR 3.20
KIE MELALUI RADIO DAN MEDIA CETAK

- ☪ Webinar Keamanan Pangan untuk Generasi Emas bekerjasama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



GAMBAR 3.21
KEGIATAN WEBINAR KEAMANAN PANGAN

- ☪ Webinar Sosialisasi SAKA POM dan Perkenalan Aplikasi Pramuka SAPA bekerjasama Kwarda dan Kwardcab se_Jawa Barat.



GAMBAR 3.22
WEBINAR BEKERJASAMA DENGAN STAKEHOLDER

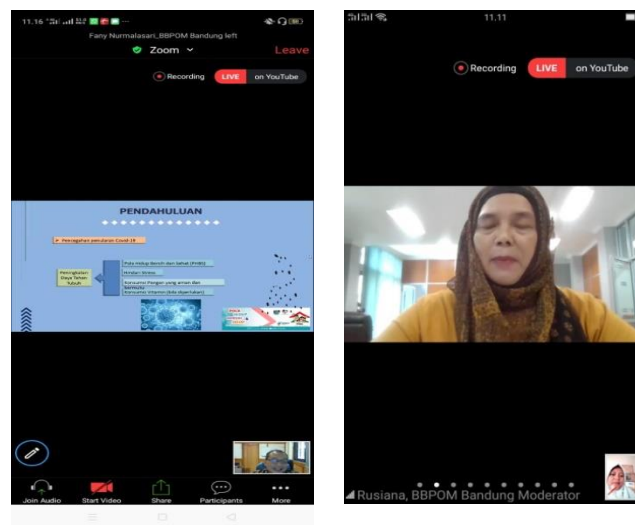
- ☪ KIE dengan Tokoh Masyarakat secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol Kesehatan





GAMBAR 3.23
KIE DENGAN TOKOH MASYARAKAT

- ☪ Webinar Keamanan Pangan bekerjasama dengan Aprindo bagi ritel modern, bekerjasama dengan PD Pasar bagi komunitas pasar, organisasi masyarakat pramuka



GAMBAR 3.24
WEBINAR BERKERJASAMA DENGAN STAKEHOLDER

- ☪ KIE melalui Ig Live dengan program “NYARITA”
- ☪ Webinar Keamanan Pangan Ritel di Era New Normal bekerja sama dengan APRINDO
- ☪ Webinar CPOTB untuk Tenaga Teknis Kefarmasian dalam rangka menyiapkan SDM unggul di bidang usaha obat tradisional bekerjasama dengan PAFI (Persatuan Ahli Farmasi Indonesia) Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran



- ☰ Webinar Sosialisasi Peraturan Badan POM No. 4 Tahun 2018 sebagai langkah pembinaan sarana pelayanan kefarmasian bekerjasama dengan IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran


H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

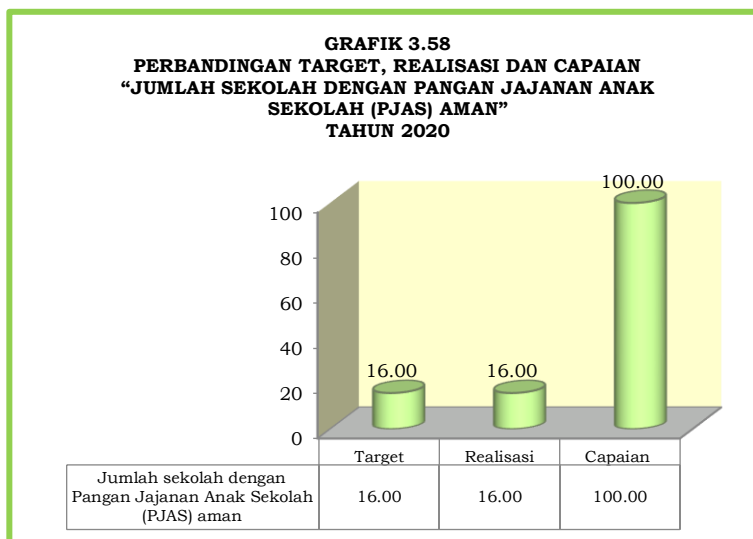
2. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman diukur berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Petunjuk Teknis Piagam Bintang Keamanan Pangan.

**TABEL 3.32
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN”
TAHUN 2020**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16,00	16,00	100,00%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020



Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2020 adalah 16 sekolah. Realisasi jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman tahun 2020 sebanyak 16 sekolah. Dengan



demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah sebesar **100%** dengan kriteria **Baik**.

Tahap kegiatan PJAS yang dilaksanakan pada adalah Advokasi dengan lintas sector, Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah, Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan, Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan di Sekolah dan Workshop Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan di 16 sekolah di Kabupaten Kuningan dan Indramayu. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan PJAS dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 3.33
PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN PJAS
TAHUN 2020**

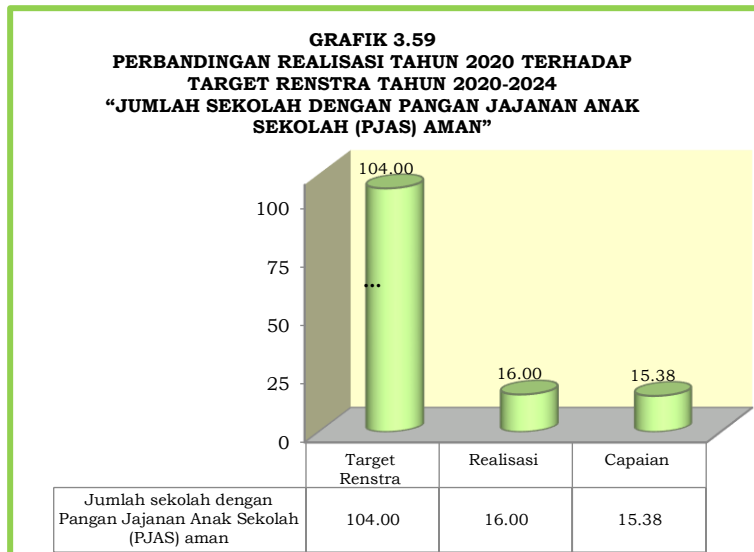
KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1 Adokasi Lintas Sektor PJAS	20	20				20
2 Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	20			20		20
3 Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan	15			15		15
4 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah						
🏠 Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah	5				5	5
🏠 Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah	5				5	5
🏠 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level 1	15				15	15
TOTAL SKOR	80	20	0	35	20	80

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Indikator Jumlah Sekolah Dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di Provinsi Jawa Barat tidak ditetapkan pada tahun 2019 sehingga belum dapat dibandingkan.



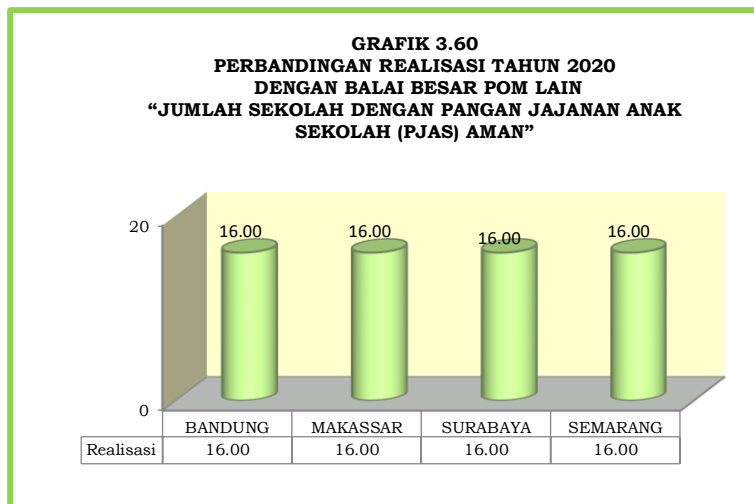
C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 104 sekolah. Jika dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 15,38% Pada

tahun 2020, terjadi penurunan target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang seharusnya 20 sekolah diturunkan menjadi 16 sekolah yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2020, disebabkan adanya pemotongan anggaran. Namun kekurangan target di tahun 2020 sebanyak 4 (empat) sekolah akan menjadi target tambahan di tahun berikutnya.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman sebagai berikut: Balai Besar POM di Bandung (16), Balai Besar POM di Makassar (16), Balai Besar POM di Surabaya (16) dan

Balai Besar POM di Makassar (16).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG AKAN DILAKUKAN PADA TAHUN 2021

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran disebabkan antara lain oleh:



- ☰ Kebijakan pemerintah selama masa pandemik Covid 19, salah satunya adalah physical distancing/sosial distancing dan adanya pembatasan social skala besar (PSBB) sudah diperlonggar sehingga tahapan kegiatan PJAS (Bimtek Kader Keamanan Pangan) bisa dilaksanakan secara tatap muka.
- ☰ Tahapan kegiatan PJAS yang melibatkan banyak orang sudah bisa dilaksanakan dengan tetap melaksanakan protocol kesehatan.
- ☰ Kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Kuningan dilaksanakan pada tanggal 15 - 16 September 2020 yang diikuti oleh 26 peserta terdiri dari 21 peserta dari 11 Sekolah (guru dan pengelola kantin), 2 peserta dari Dinas Kesehatan dan 3 peserta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Indramayu dilaksanakan pada tanggal 24 - 25 September 2020 yang diikuti oleh 14 peserta terdiri dari 10 peserta dari 5 sekolah (guru dan pengelola kantin), 2 peserta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan 2 peserta dari Dinas Kesehatan.
- ☰ Kegiatan PJAS secara tatap muka diikuti oleh setiap sekolah walaupun dalam kondisi tidak ada kegiatan Belajar-Mengajar dan tidak ada kegiatan di kantin sekolah (tutup).

Alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun 2021 adalah:

- ☰ Kegiatan PJAS tetap dilakukan secara daring dan luring dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah daerah setempat terkait pandemi Covid-19.

F. EVALUASI DAN ANALISIS TERKAIT TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA TRIWULAN SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pada periode sebelumnya adalah:

- ☰ Melakukan perubahan pelaksanaan intervensi PJAS terhadap sekolah dengan Pola Baru.
- ☰ Melaksanakan tahapan kegiatan Intervensi PJAS dengan menerapkan standar protocol Kesehatan yang ketat.

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- ☰ Pelaksanaan Tahapan PJAS berupa Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan standar protocol Kesehatan yang ketat.

Rekomendasi yang tidak dapat dilaksanakan pada triwulan IV:

- ☰ Melakukan perubahan pelaksanaan intervensi PJAS terhadap sekolah secara luring belum dapat dilaksanakan karena masih adanya pembatasan oleh



Pemerintah Daerah setempat sehingga sekolah dan juga kantin sekolah belum dibuka Kembali.

**G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

- ☰ Kegiatan audiensi dan advokasi dengan lintas sektor



**GAMBAR 3.25
AUDIENSI DAN ADVOKASI DENGAN LINTAS SEKTOR**

- ☰ Kegiatan Bimtek Keamanan Pangan dan Piagam Bintang Keamanan Pangan



3

**GAMBAR 3.26
KEGIATAN BIMTEK KEAMANAN PANGAN DAN
PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN**

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.


3. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Jumlah desa pangan aman diukur berdasarkan jumlah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa, dan mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain). Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembentukan Desa Pangan Aman: (1) Advokasi

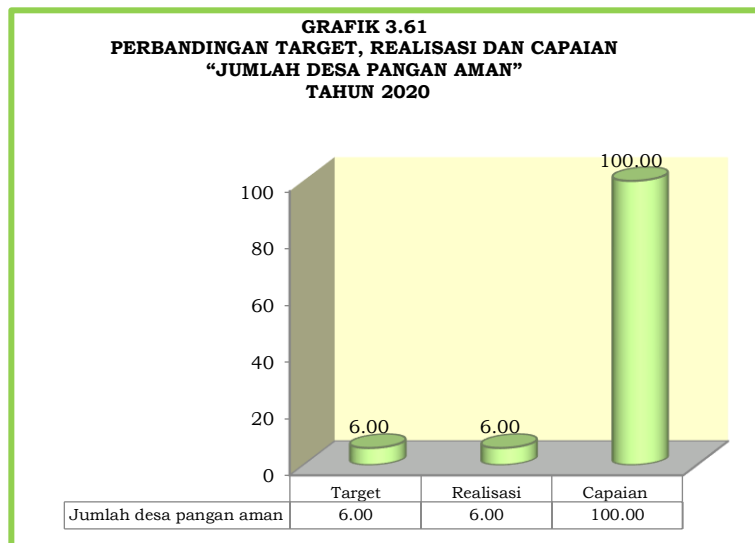


Kelembagaan Desa; (2) Bimtek Kader Pembentukan Desa Pangan Aman; (3) Bimtek Komunitas; (4) Fasilitasi Keamanan Pangan; (5) Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan; (6) Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Desa Pangan; (7) Lomba Desa; dan (8) Pengawalan. Desa yang diintervensi meliputi 3 desa di Kabupaten Kuningan yaitu Desa Cilimus Kecamatan Cilimus, Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar dan Desa Sukaraja Kecamatan Ciawigebang merupakan lokus stunting sedangkan 3 Desa dari Kabupaten Indramayu yaitu Desa Rambatan Kulon Kecamatan Lohbener, Desa Jangga Kecamatan Losarang dan Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandang Haur merupakan lokus stunting.

**TABEL 3.34
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH DESA PANGAN AMAN”
TAHUN 2020**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Jumlah desa pangan aman	6,00	6,00	100,00%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

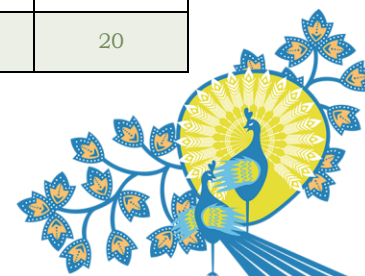


Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2020 adalah 6 desa. Realisasi jumlah desa pangan aman tahun 2020 sebanyak 6 desa. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut adalah

sebesar **100%** dengan kriteria **Baik**. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 3.35
PROGRESS PELAKSANAAN DESA PANGAN AMAN
TAHUN 2020**

KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRESS (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1 Adokasi Kelembagaan Desa	20	2		18		20

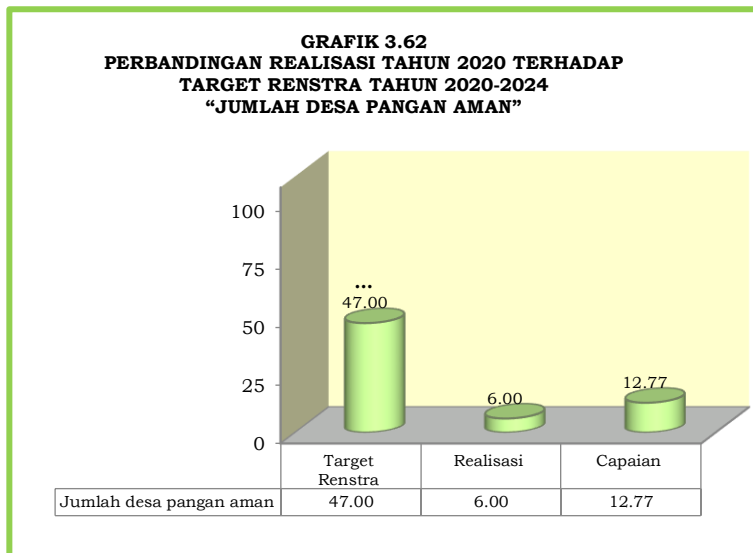


KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRESS (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
2	Pengadaan gimmick, rapid test kit dll	5	4	1		5
3	Pengawasan	10			10	10
4	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15	11	4		15
5	Bimtek Komunitas	15		14	1	15
6	Fasilitasi Keamanan Pangan	10			10	10
7	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10		7	3	10
8	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10			10	10
9	Lomba Desa Pangan Aman	5			5	5
TOTAL SKOR		100	17	0	44	39

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Indikator Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2020 sebanyak 6 desa lebih besar dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 5 desa.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

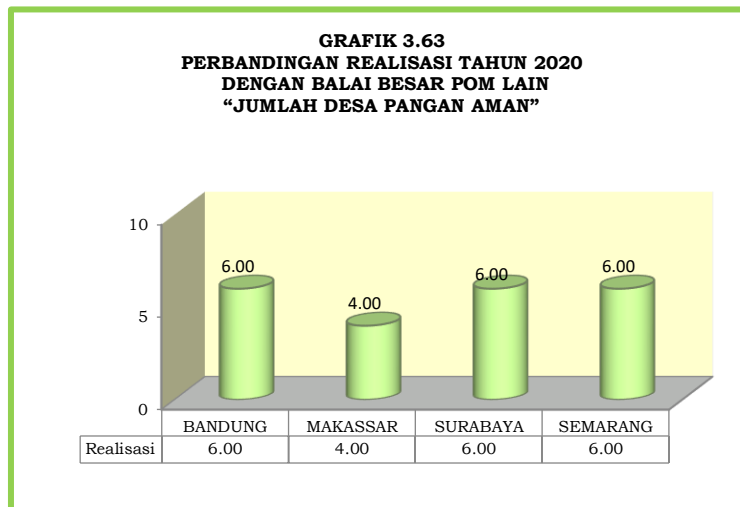


Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 47 Desa. Jika dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 12,77% Pada tahun 2020, terjadi

penurunan target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang seharusnya 9 desa diturunkan menjadi 6 desa yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2020, disebabkan adanya pemotongan anggaran. Namun kekurangan target di tahun 2020 sebanyak 2 desa akan menjadi target tambahan di tahun berikutnya.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja dari Jumlah desa pangan aman sebagai berikut : Balai Besar POM di Bandung (6), Balai Besar POM di Makassar (4), Balai Besar POM di Surabaya (6) dan Balai Besar POM di Makassar (6).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran disebabkan antara lain oleh:

- ☛ Kebijakan pemerintah selama masa pandemik Covid 19, salah satunya adalah physical distancing/social distancing dan adanya pembatasan sosial skala besar (PSBB) sudah diperlonggar dengan adaptasi kebiasaan baru (AKB) sehingga tahapan kegiatan Desa Paman dapat dilaksanakan.
- ☛ Tahapan kegiatan Desa Paman yang melibatkan banyak orang dapat dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan.

Alternatif solusi yang dilakukan pada tahun 2020 adalah:

- ☛ Melaksanakan kegiatan desa pangan aman dengan tetap mengikuti protokol Kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan/*handsanitizer* pada kegiatan antara lain:
 - a. Advokasi Keamanan Pangan dengan lintas sektor
 - b. Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)
 - c. Bimtek komunitas desa dan Komunitas Pelaku Usaha Pangan Desa (PUPD)
 - d. Fasilitasi Keamanan Pangan yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Desa, Sanitarian serta petugas Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)/ *District Food Inspector* (DFI) dari Dinas Kesehatan.
 - e. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan berupa sampling dan uji cepat menggunakan Rapid Test Kit.



- f. Monitoring dan Evaluasi dengan lintas sektor untuk melihat keberhasilan program keamanan pangan desa serta merencanakan tindaklanjut program keamanan pangan desa.
 - g. Lomba Desa Pangan Aman
- ☰ Target Kabupaten dan Desa yang tidak dapat dilaksanakan di tahun 2020 karena pemotongan anggaran dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2021

F. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pada periode sebelumnya adalah:

- ☰ Melaksanakan kegiatan Advokasi Keamanan Pangan dengan lintas sector, Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD), Bimtek komunitas desa dan Komunitas Pelaku Usaha Pangan Desa (PUPD) , Fasilitasi Keamanan Pangan; Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan dan Pengawasan pada masing – masing desa target serta melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Desa Pangan dan Lomba Desa dengan tetap maematuhi protokol Kesehatan.
- ☰ Tahapan kegiatan Desa Paman selanjutnya terhadap 6 desa target bisa diselesaikan tepat waktu.

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindaklanjut pada tahun 2020 sebagai berikut:

- ☰ Melaksanakan kegiatan desa pangan aman dengan tetap mengikuti protokol Kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan/*handsanitizer* pada kegiatan antara lain:
 - a. Advokasi Keamanan Pangan dengan lintas sektor
 - b. Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)
 - c. Bimtek komunitas desa dan Komunitas Pelaku Usaha Pangan Desa (PUPD)
 - d. Fasilitasi Keamanan Pangan yang dilakukan oleh Kader Keamanan Pangan Desa, Sanitarian serta petugas Penyuluh Keamanan Pangan (PKP)/ *District Food Inspector* (DFI) dari Dinas Kesehatan.
 - e. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan berupa sampling dan uji cepat menggunakan Rapid Test Kit.
 - f. Monitoring dan Evaluasi dengan lintas sektor untuk melihat keberhasilan program keamanan pangan desa serta merencanakan tindaklanjut program keamanan pangan desa.
 - g. Lomba Desa Pangan Aman





**G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

🕌 Kegiatan Audiensi dan Advokasi dengan lintas sektor terkait



**GAMBAR 3.27
AUDIENSI DAN ADVOKASI DENGAN LINTAS SEKTOR**

🕌 Kegiatan Bimtek Kader Keamanan Pangan



**GAMBAR 3.28
BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN**

🕌 Bimtek Komunitas Desa Dan Pelaku Usaha Pangan Desa



**GAMBAR 3.29
BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA**

🕌 Fasilitasi Keamanan Pangan



**GAMBAR 3.30
KEGIATAN FASILITASI KEAMANAN PANGAN**



☰ Workshop Monitoring dan Evaluasi Keamanan Pangan



**GAMBAR 3.31
WORSHOP MONEV KEAMANAN PANGAN**


H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

4. JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA

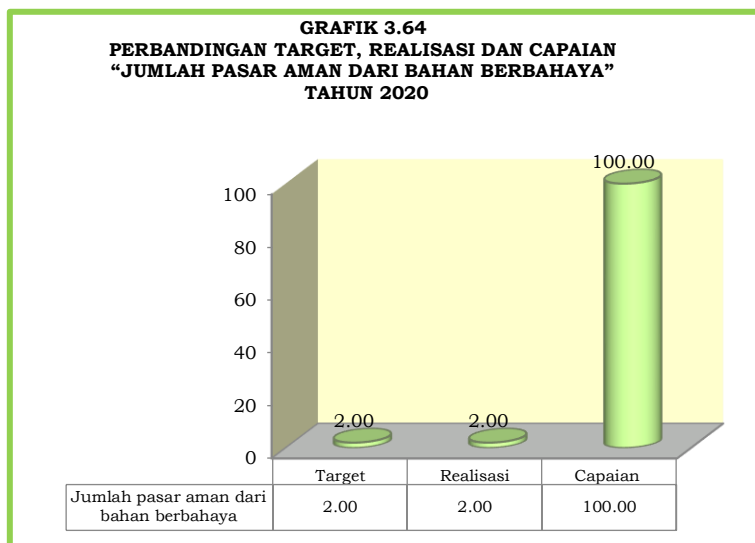
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya diukur berdasarkan jumlah pasar yang mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya, mengalami penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pasar yang mendapat intervensi adalah Pasar Bangkir di Kabupaten Indramayu dan Pasar Desa Cilimus di Kabupaten Kuningan

**TABEL 3.36
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA”
TAHUN 2020**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100,00%	Baik	



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020



Target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini pada tahun 2020 adalah 2 pasar. Realisasi jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2020 sebanyak 2 pasar. Dengan demikian persentase capaian target

indikator sasaran tersebut adalah sebesar **100%** dengan kriteria **Baik**. Secara rinci progress pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 3.37
PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN PANGAN AMAN
DARI BAHAN BERBAHAYA
TAHUN 2020

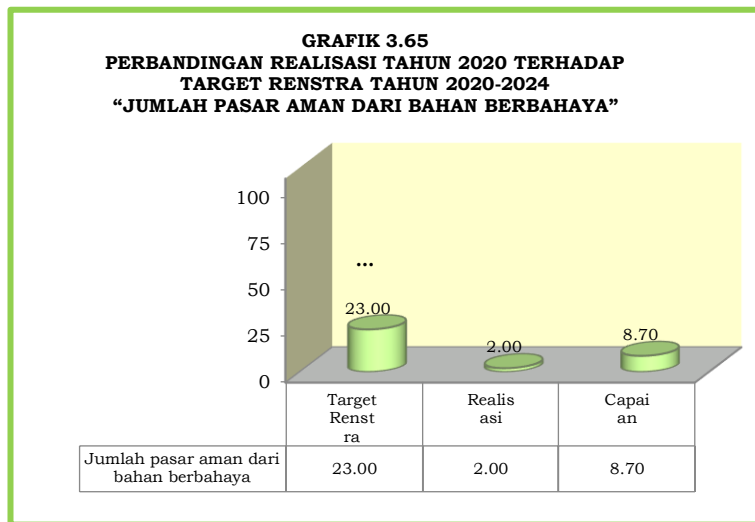
	KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	PROGRES (CAPAIAN DJA)				TOTAL PROGRESS
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Adokasi	30	12		18		30
2	Survey Pasar	5			5		5
3	Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15			15		15
4	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar	20			10		10
5	Penyuluhan	5			5		5
6	Kampanye	5			5		5
7	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20				20	20
8	Lomba Pasar Aman	10				10	10
TOTAL SKOR		100	12	0	58	30	100



B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Indikator jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di Provinsi Jawa Barat tahun 2020 sebanyak 2 pasar lebih besar dibanding dengan tahun 2019 sebanyak 1 pasar.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

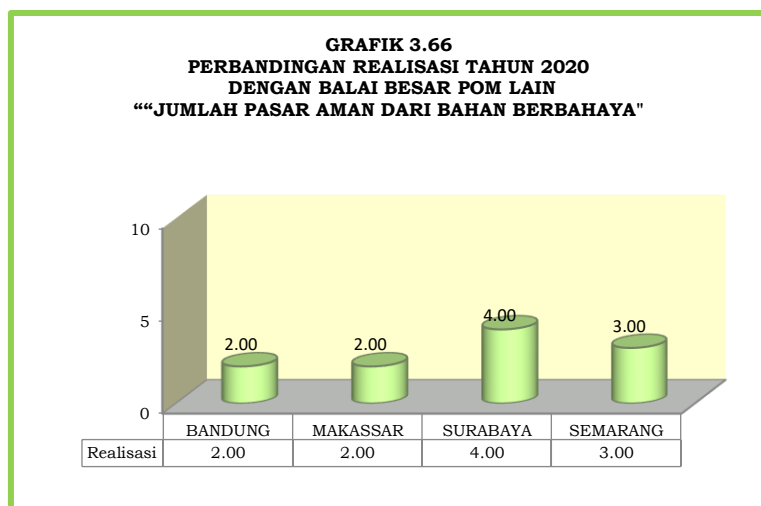


Target akhir periode Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan adalah sebesar 23 pasar. Jika dihitung terhadap target tersebut, maka

capaian kinerja sebesar 8,70% Pada tahun 2020, terjadi penurunan target Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang seharusnya 4 pasar diturunkan menjadi 2 pasar yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2020, disebabkan adanya pemotongan anggaran. Namun kekurangan target di tahun 2020 sebanyak 2 pasar akan menjadi target tambahan di tahun berikutnya.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL

Realisasi kinerja dari Jumlah desa pangan aman dari bahan berbahaya sebagai berikut: Balai Besar POM di Bandung (2), Balai Besar POM di Makassar (2), Balai Besar POM di Surabaya (4) dan



Balai Besar POM di Semarang (3).

**E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/
PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH
DILAKUKAN**

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran disebabkan antara lain oleh:

- ☰ Kebijakan pemerintah selama masa pandemik Covid 19, salah satunya adalah physical distancing/social distancing. Adanya pembatasan social sekala besar (PSBB) sudah diperlonggar sehingga tahapan kegiatan Pasar Aman bisa dilaksanakan. Dimana kegiatan Pasar Aman dilaksanakan di pasar tradisional yang melibatkan banyak orang, dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan.
- ☰ Tahapan kegiatan Pasar Aman yang sudah dilaksanakan hingga TW IV meliputi survei pasar, bimbingan teknis bagi pengelola pasar, monitoring dan evaluasi tahap I dan tahap II, penyuluhan dan kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya bagi komunitas pasar di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu dengan progress 100%.
- ☰ Tahapan kegiatan Pasar Aman yang bisa dilaksanakan pada TW IV meliputi monitoring dan evaluasi di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu dengan progress 20%. Lomba pasar aman dari bahan berbahaya dengan progress 10%.

Alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun 2021 adalah:

- ☰ Kegiatan audiensi ke pemerintah daerah, pemilihan pasar, juknis pelaksanaan sekiranya segera dikeluarkan. Oleh karena kondisi masih pandemi Covid-19, maka tahapan kegiatan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti kebijakan Pemerintah daerah setempat.

**F. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA TRIWULAN
SEBELUMNYA**

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pada periode sebelumnya adalah:

- ☰ Pelaksanaan tahapan kegiatan Pasar Aman akan dilaksanakan dengan menerapkan standar protocol Kesehatan yang ketat sehingga terlaksana 100%.
- ☰ Melakukan koordinasi intensif dengan stakeholder untuk melakukan intervensi ke pedagang, pembeli di pasar, sehingga pasar yang diintervensi bisa menerapkan secara mandiri program pasar aman dari bahan berbahaya



serta dapat direplikasi oleh pasar lainnya di Kabupaten setempat dan bisa masuk nominasi Lomba Pasar Aman 2020.

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- ☰ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pasar Aman di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan standar protocol Kesehatan yang ketat.
- ☰ Kegiatan monev Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu dilaksanakan secara tatap muka dengan menerapkan standar protocol Kesehatan yang ketat. Melalui tahap monev ini, petugas pengelola pasar diharapkan dapat melakukan pengawasan secara mandiri terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan test kit.

**F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

- ☰ Kegiatan audiensi dan advokasi dengan lintas sektor



**GAMBAR 3.32
AUDIENSI DAN ADVOKASI DENGAN LINTAS SEKTOR**

- ☰ Kegiatan Bimtek Petugas Pasar



**GAMBAR 3.33
KEGIATAN BIMTEK PETUGAS PASAR**

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.






**SASARAN
KEGIATAN
KE-6**

**MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN
PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun. Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh hasil rata-rata capaian sebesar **109%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 3.38
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6
TAHUN 2020**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	82,00%	89,75%	109,45%	Baik	
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	82,0%	88,60%	108,05%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			108,75%	BAIK	

1. PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR


Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Obat dikali 100%. Sedangkan persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Obat dikali 100%.

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa

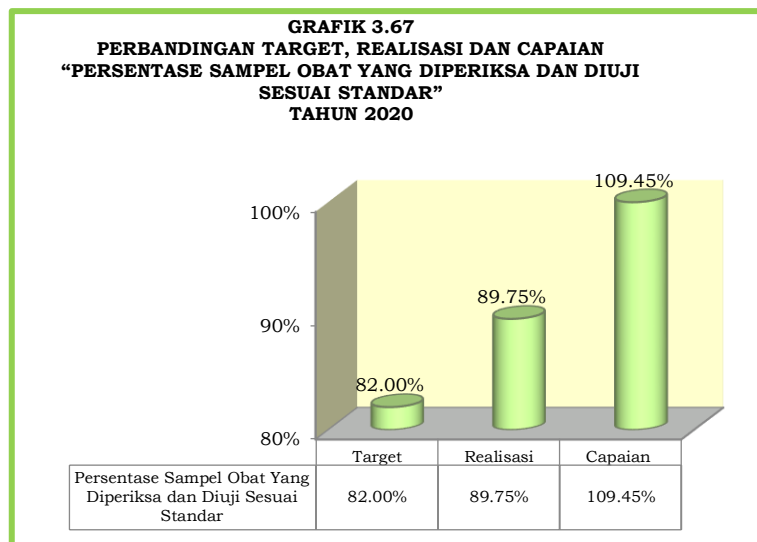


meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

**TABEL 3.39
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TAHUN 2020**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	82,00%	89,75%	109,45%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020



Pada tahun 2020, jumlah sampel obat yang disampling sebanyak 2520 sampel dengan rincian jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 2520 sampel (100,04%) dan jumlah sampel Obat yang

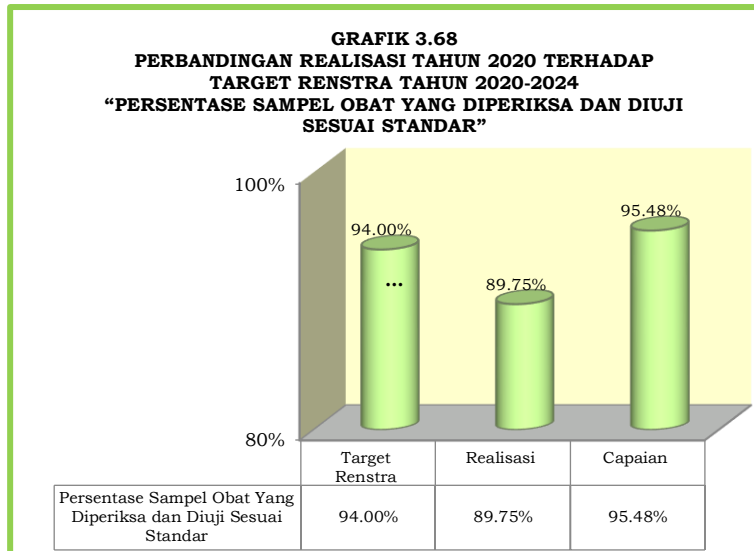
diuji sesuai standar sebanyak 1999 sampel (79,5%). Dari data tersebut, diperoleh nilai persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 89,75%. Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **109,45%** dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator kinerja kegiatan yang baru ditetapkan pada tahun 2020 sehingga realisasi kinerja tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

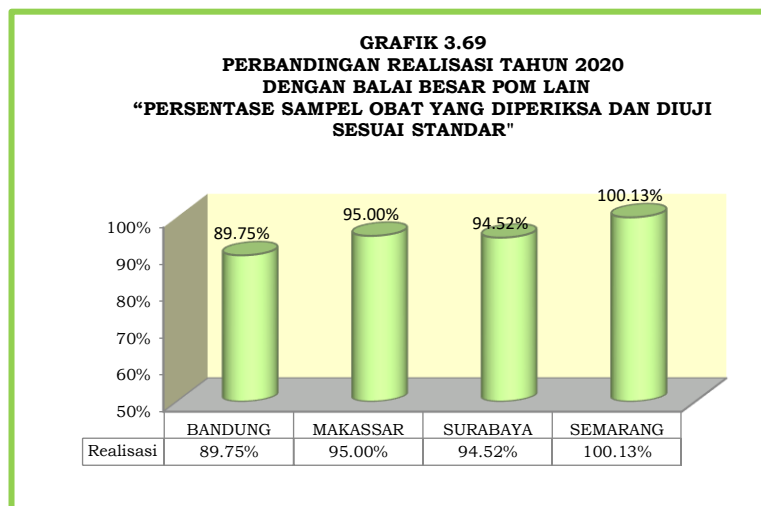


Pada tahun 2020, target indikator sasaran tersebut yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 94%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja

sebesar 95,48% Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.68.

E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL

Realisasi kinerja dari Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut: Balai Besar POM di Semarang (100,13%), Balai Besar POM di



Makassar (95,00%), Balai Besar POM di Surabaya (94,52%) dan Balai Besar POM di Bandung (89,75). Realisasi kinerja tersebut tidak dapat dibandingkan dengan target nasional karena tidak ditetapkan.

D. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Kebhasilan pencapaian indikator ini pada tahun 2020 disebabkan oleh:



- ☰ Dengan adanya kondisi pandemi Covid 19 pada tahun 2020, telah dilakukan refokusing anggaran untuk mengatasi pandemi Covid 19. Salah satunya dengan dilakukan penurunan jumlah sampel Obat yang diuji yang diperiksa dan diuji sebanyak 25%. Penurunan jumlah target ini, sejalan dengan perubahan sistem kerja, yaitu adanya sistem *work from home*. Pengaturan sistem kerja ini diatur sedemikian rupa sehingga jam kerja tetap efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan ini.
- ☰ Dukungan dari tersedianya sarana dan prasarana penunjang berperan besar dalam peningkatan capaian sasaran kegiatan ini.
- ☰ Target yang ditetapkan utk sampel yang diperiksa adalah 100% dan realisasinya sebesar 100,04% (2520 sampel dari 2519 sampel yang ditargetkan). Sedangkan untuk sampel yang diuji, target yang ditetapkan 64%, namun realisasinya mencapai 79,45% (1999 sampel dari 2516 sampel yang diuji). Dari uraiannya ini terlihat bahwa sampel yang diuji capaiannya jauh melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian ini apabila kita analisis diakibatkan oleh adanya perubahan strategi dalam pengujian sampel. Hal – hal yang dilakukan antara lain adalah pembuatan tim-tim kecil dalam proses pengujian, penjadwalan yang lebih ketat dan pengaturan penggunaan alat uji yang lebih baik.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2020, antara lain:

- ☰ Koordinasi sampling dan pengujian yang lebih baik melalui pembuatan whatsapp grup (WAG), sehingga tidak terjadi penumpukan pengujian pada saat bersamaan.
- ☰ Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.
- ☰ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- ☰ Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat meningkat.

E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/ KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

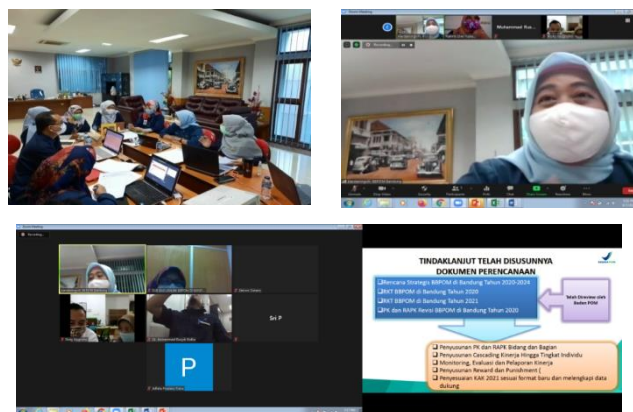


- ☰ Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi. Pelatihan ini melibatkan narasumber dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Perguruan Tinggi, Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia, Penyedia Alat Laboratorium.



**GAMBAR 3.34
BIMBINGAN TEKNIS INTERNAL LABORATORIUM**

- ☰ Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan secara rutin. Rapat Money Kinerja Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung dan dihadiri oleh seluruh Bidang/Bagian/Loka POM yang diselenggarakan secara Luring dan Daring.



**GAMBAR 3.35
MONEV KEGIATAN**



F. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

- ☰ Telah dilakukan penyesuaian jam kerja dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja yang direncanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kerja Balai Besar POM di Bandung sehingga target tahun 2020 dapat tercapai dengan optimal. Dengan penyesuaian ini, dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga pengujian dapat berjalan efisien dan efektif.
- ☰ Telah dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian melalui pelatihan atau bimbingan teknis internal di pengujian kimia, yaitu laboratorium mikrobiologi 28 September - 2 Oktober 2020, laboratorium kosmetik 28 September -2 Oktober 2020, laboratorium obat tradisional dan suplemen kesehatan 19-23 Oktober 2020 serta laboratorium obat 2-6 Nopember 2020. Dengan adanya pelatihan ini terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari personel penguji.
- ☰ Telah dilakukan peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel obat maupun pengujian obat sehingga pemeriksaan dan pengujian Obat dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

2. PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR


Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan cara menjumlahkan persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar kemudian dibagi 2 (dua). Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar adalah jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi Jumlah target sampel Makanan dikali 100%. Sedangkan persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar adalah jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel Makanan dikali 100%.

Definisi operasional sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor



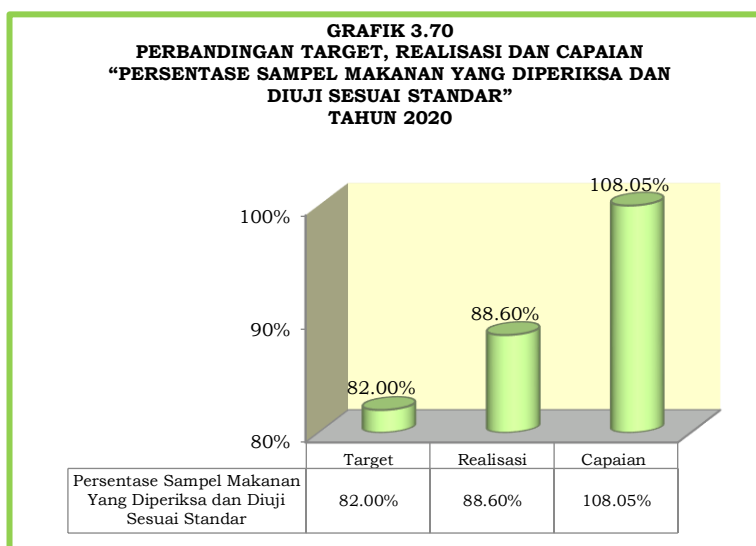
izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

TABEL 3.40
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA
DAN DIUJI SESUAI STANDAR”
TAHUN 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	82,0%	88,60%	108,05%	Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 82%. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 88,60%, dengan rincian jumlah



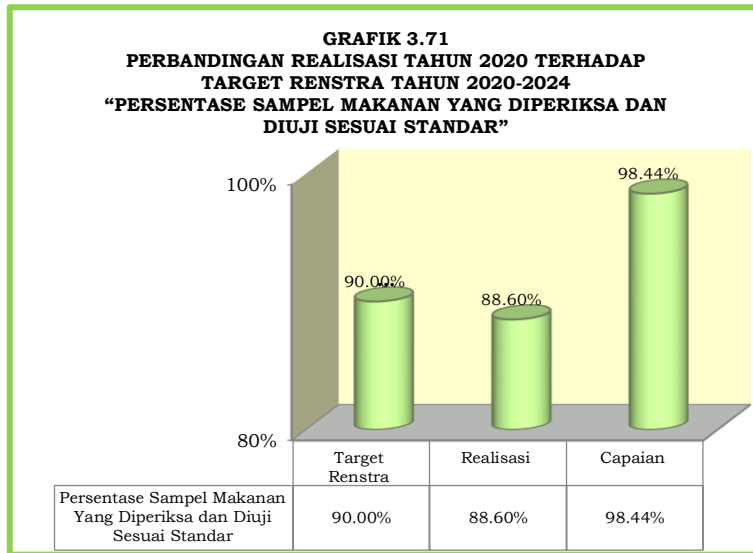
sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebesar 100% (sebanyak 1015 sampel dibandingkan terhadap jumlah target sampel Makanan sebanyak 1015 sampel) dan jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar sebesar 77,20% (sebanyak 782 sampel dibandingkan terhadap jumlah sampel Makanan yang diuji sebanyak 1013 sampel). Dengan demikian nilai pencapaian sasaran indikator tersebut adalah sebesar **108,05%** dengan kriteria **Baik**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator kinerja kegiatan yang baru ditetapkan pada tahun 2020 sehingga realisasi kinerja tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

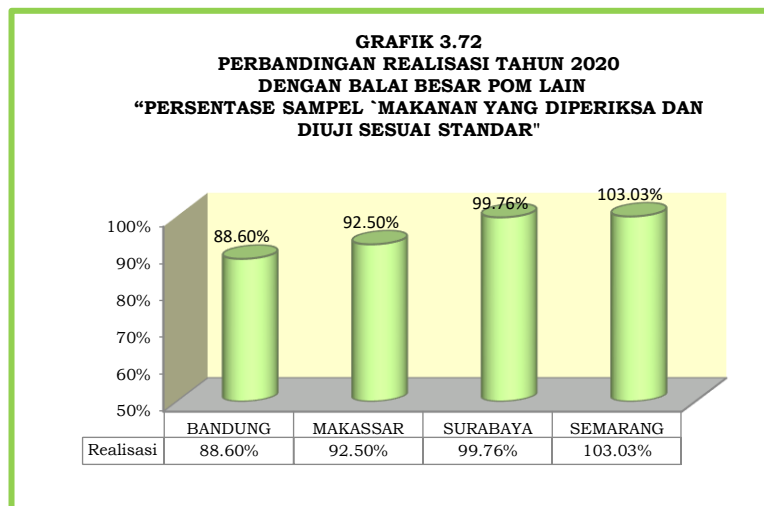


Pada tahun 2020, target indikator sasaran tersebut yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 90%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja

sebesar 98,44% Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.70.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL

Realisasi kinerja dari Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut: Balai Besar POM di Semarang (100,03%), Balai Besar POM di



Surabaya (99,76%), Balai Besar POM di `Makassar (92,50%) dan Balai Besar POM di Bandung (88,60%). Realisasi kinerja tersebut tidak dapat dibandingkan dengan target nasional karena tidak ditetapkan.

E. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Keberhasilan pencapaian pada tahun 2020 ini disebabkan oleh:



- ☰ Dengan adanya kondisi pandemi Covid 19 pada tahun 2020, telah dilakukan refokusing anggaran untuk mengatasi pandemi Covid 19. Salah satunya dengan dilakukan penurunan jumlah sampel Makanan yang diuji yang diperiksa dan diuji sebanyak 25%, semula 1353 menjadi 1015 sampel. Penurunan jumlah target ini, sejalan dengan perubahan sistem kerja, yaitu adanya sistem *work from home*. Pengaturan sistem kerja ini diatur sedemikian rupa sehingga jam kerja tetap efektif dan efisien. Hal ini ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan ini.
- ☰ Dukungan dari tersedianya sarana dan prasarana penunjang berperan besar dalam peningkatan capaian sasaran kegiatan ini.
- ☰ Target yang ditetapkan utk sampel yang diperiksa adalah 100% dan realisasinya sebesar 100% (1015 sampel dari 1015 sampel yang ditargetkan). Sedangkan untuk sampel yang diuji, target yang ditetapkan 64%, namun realisasinya mencapai 77,10% (782 sampel dari 1013 sampel yang diuji). Dari uraiannya ini terlihat bahwa sampel yang diuji capaiannya jauh melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian ini apabila kita analisis diakibatkan oleh adanya perubahan strategi dalam pengujian sampel. Hal –hal yang dilakukan antara lain adalah pembuatan tim-tim kecil dalam proses pengujian, penjadwalan yang lebih ketat dan pengaturan penggunaan alat uji yang lebih baik. Pencapaian ini apabila kita analisis diakibatkan oleh adanya perubahan strategi dalam pengujian sampel. Hal –hal yang dilakukan antara lain adalah pembuatan tim-tim kecil dalam proses pengujian, penjadwalan yang lebih ketat dan pengaturan penggunaan alat uji yang lebih baik.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2020, antara lain:

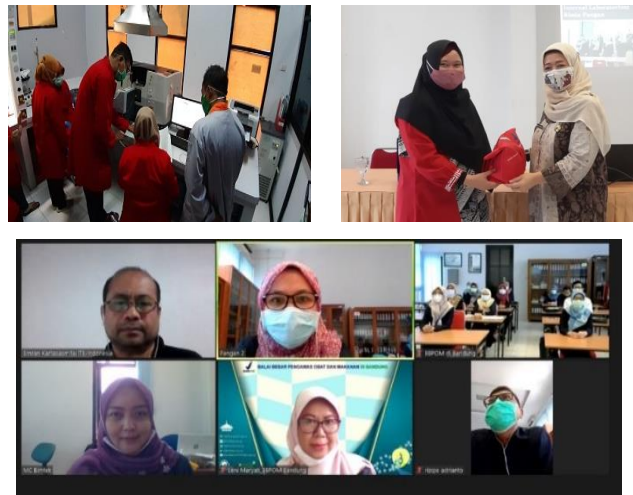
- ☰ Koordinasi sampling dan pengujian yang lebih baik, sehingga tidak terjadi penumpukan pengujian pada saat bersamaan.
- ☰ Pembuatan jadwal untuk proses pengujian dan penggunaan alat uji yang lebih tepat, sehingga lebih efisien dan efektif.
- ☰ Peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian melalui pelatihan atau webinar sesuai perkembangan terkini, baik dari segi kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial.
- ☰ Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat meningkat.



**F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/
KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA**

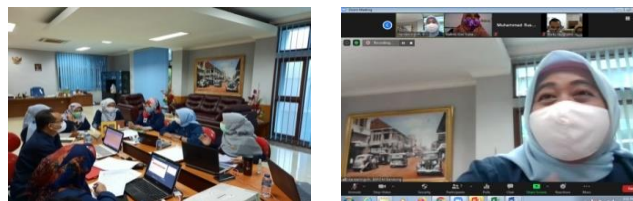
Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

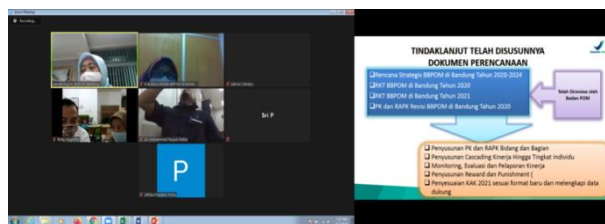
- ☪ Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung adalah peningkatan kompetensi dan kapabilitas personel melalui pelatihan, kalibrasi/verifikasi peralatan laboratorium, jaminan mutu hasil pengujian melalui uji profisiensi dan uji kolaborasi, validasi dan verifikasi metode analisa serta akreditasi laboratorium.
- ☪ Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Pangan. Pelatihan ini melibatkan narasumber dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Perguruan Tinggi, Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia, Penyedia Alat Laboratorium.



**GAMBAR 3.36
BIMIBINGAN TEKNIS LABORATORIUM PANGAN**

- ☪ Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan secara rutin. Rapat Monev Kinerja Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung dan dihadiri oleh seluruh Bidang/Bagian/Loka POM yang diselenggarakan secara Luring dan Daring.





GAMBAR 3.37
MONEV KINERJA BULANAN

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

- ☪ Laboratorium pengujian merupakan salah satu sub sistem operasi POM yang mempunyai peran sangat strategis melakukan pengujian terhadap produk yang disampling berdasarkan risiko untuk mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Terdapat lima komponen utama yang menentukan hasil pengujian, yaitu alat uji/alat ukur, personel, metode, bahan baku pembanding dan bahan/reagen. Dalam rangka mendukung terlaksananya efektivitas pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung maka Laboratorium Balai Besar POM di Bandung harus handal dengan dilengkapi oleh alat laboratorium yang lengkap, sehingga seluruh parameter uji kritis yang ditetapkan dalam standar pedoman sampling dan timeline telah sesuai dengan pedoman/SOP yang telah ditetapkan.
- ☪ Telah dilakukan penyesuaian jam kerja dengan tetap memperhatikan pemenuhan target kinerja yang direncanakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kerja Balai Besar POM di Bandung sehingga target tahun 2020 dapat tercapai dengan optimal. Dengan penyesuaian ini, dilakukan penjadwalan pengujian dan pemakaian alat uji, sehingga pengujian dapat berjalan efisien dan efektif.
- ☪ Telah dilakukan peningkatan kompetensi SDM dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengujian melalui pelatihan atau bimbingan teknis internal di pengujian laboratorium pangan pada tanggal 23 November – 27 November 2020 Dengan adanya pelatihan ini terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari personel penguji.
- ☪ Telah dilakukan peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik pemeriksaan sampel obat maupun pengujian obat sehingga pemeriksaan dan pengujian Obat dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.
- ☪ Ketersediaan prasarana laboratorium yang memadai merupakan salah satu modal untuk membangun infrastruktur laboratorium yang nyaman dan kondusif untuk proses pengujian yang efektif dan efisien. Kualitas infrastruktur harus memenuhi berbagai syarat, baik secara fungsi, kelayakan maupun kesesuaian dengan standar GLP. Pada tahun 2020 Balai Besar POM



di Bandung telah melakukan renovasi pada sebagian laboratorium yaitu laboratorium mikrobiologi. Renovasi belum dilakukan secara menyeluruh terhadap laboratorium yang ada di Balai Besar POM di Bandung. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif melalui pembuatan masterplan dalam rangka pemenuhan standar GLP. Dengan adanya masterplan tersebut pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Pembuatan Masterplan ini sudah dialokasikan pada tahun anggaran 2021.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



SASARAN KEGIATAN KE-7

MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

KE-7

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) yaitu persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung. Dari perhitungan 1 (satu) indikator tersebut, diperoleh capaian sebesar **84,23%** dengan kriteria **Cukup**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.41.

TABEL 3.41
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-7
TAHUN 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74,00%	62,33%	84,23%	Cukup	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			84,23%	CUKUP	

PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang



dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: (a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan); (b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)); (c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) dan (d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

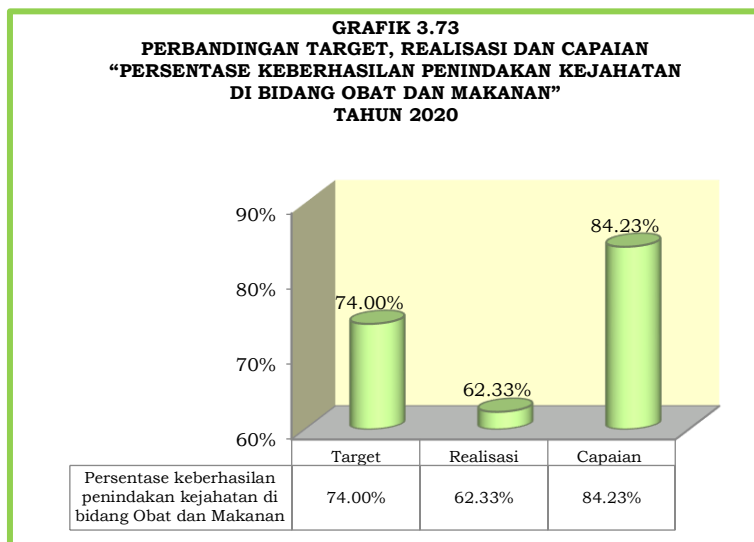
Cara untuk menghitung persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
- b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020



Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran kegiatan ini adalah sebesar 74,00%. Realisasi kinerja untuk sasaran kegiatan ke-7 sebesar 62,33% sehingga capaian indikator sasaran kegiatan ke-7 sebesar **84,23%**

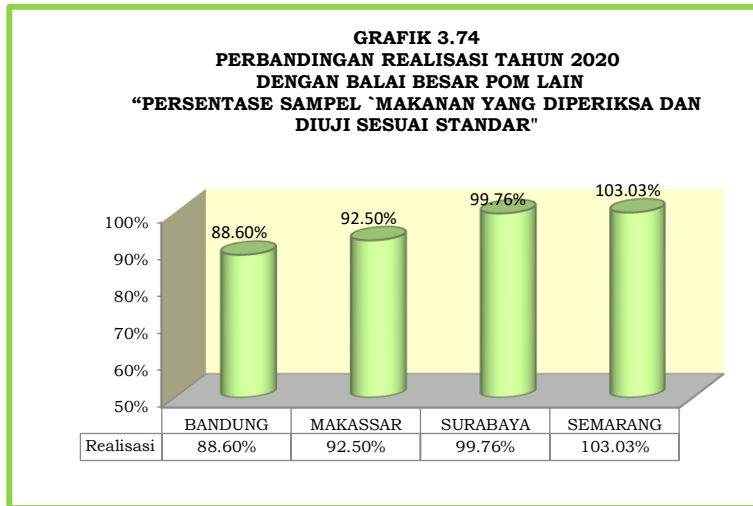
dengan kriteria **Cukup**.



B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator kinerja kegiatan yang baru ditetapkan pada tahun 2020 sehingga realisasi kinerja tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

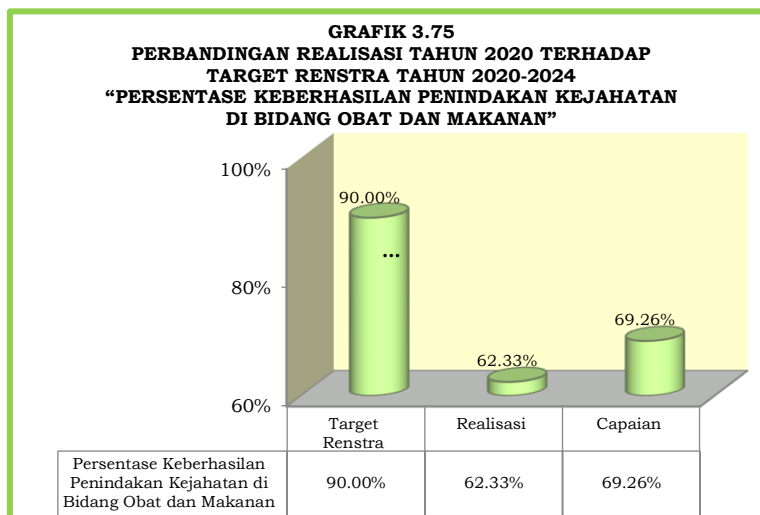


Pada tahun 2020, target indikator sasaran tersebut yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 90%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka

capaian kinerja sebesar 69,26%. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.73.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL

Realisasi kinerja dari Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut: Balai Besar POM di Semarang (100,03%), Balai Besar POM di Surabaya (99,76%), Balai Besar POM di Makassar (92,50%) dan Balai Besar POM di Bandung (88,60%). Realisasi kinerja tersebut tidak dapat dibandingkan dengan target nasional karena tidak ditetapkan.



E. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

Peningkatan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- ☰ Perencanaan penyidikan yang berkesinambungan dimulai dari pengumpulan bahan keterangan, pendalaman informasi, operasi penindakan dan proses pemberkasan disertai pengendalian, monitoring dari perencanaan hingga evaluasi hasil.
- ☰ Operasi penindakan yang dilakukan secara rutin dan sistematis, yaitu: Operasi OPSON tahun 2020, Operasi Pangea tahun 2020 dan Operasi Rutin Penindakan dengan rincian 4 perkara pelanggaran di bidang kosmetik, 3 pelanggaran di bidang pangan, 4 perkara pelanggaran di bidang obat. Kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Penyidikan berhasil menangani 9 perkara dengan taksiran nilai keekonomian barang bukti sebesar Rp. 35.123.205.742,00.
- ☰ Pada Triwulan IV juga dilaksanakan kegiatan Pemusnahan Barang Bukti. Untuk mencegah kemungkinan beredarnya kembali barang sitaan dan barang hasil pengawasan yang terbukti dapat membahayakan kesehatan, maka dilakukan Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 02 Desember 2020. Pada tahun 2020 Balai Besar POM di Bandung telah melakukan pemusnahan dengan nilai keekonomian sebesar Rp. 31.255.778.200,- atas barang sitaan dan barang hasil pengawasan tahun 2019 dan 2020 di PT. Tenang Jaya Sejahtera.
- ☰ Meningkatnya kualitas SDM terkait penyidikan Obat dan Makanan melalui pendidikan dan pelatihan selama periode Triwulan IV.
- ☰ Meningkatnya koordinasi lintas sektor terutama dengan *Criminal Justice System*, melalui konsultasi penyelesaian berkas perkara dan koordinasi informal lainnya.

Penurunan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- ☰ Wabah/pandemic penyakit *Corona* yang menyebabkan terhambatnya banyak kegiatan di Triwulan IV.
- ☰ Wabah/pandemic *Corona* menghambat proses rantai kegiatan bidang penindakan yang seharusnya berkesinambungan dimulai dari pengumpulan bahan keterangan, pendalaman informasi, operasi penindakan dan proses pemberkasan.
- ☰ Adanya aturan dan kebijakan baru yang disebabkan oleh Wabah/pandemic *Corona* dalam proses koordinasi dan pemberkasan cukup menghambat proses penyelesaian berkas perkara.



- ☪ Wabah/pandemic Corona juga mengakibatkan fasilitas sarana penahanan terbatas sehingga menghambat proses tahap II dari berkas perkara yang sudah selesai.
- ☪ Terbatasnya gerak petugas dikarenakan adanya pembatasan kegiatan di Kantor Balai POM di Bandung maupun di kantor Lintas Sektor yang menjadi *stakeholder* bidang penindakan. Pembatasan ini berupa *lockdown* di beberapa kantor seperti Kejaksaan Tinggi Bandung (sekitar Bulan Oktober), Pengadilan Negeri Bandung (sekitar Bulan Oktober), dan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A (sekitar Bulan November) terkait adanya kasus positif Covid-19 di kantor tersebut.
- ☪ Adanya perubahan modus operandi kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang semakin berkembang antara lain: maraknya penjualan produk ilegal secara *on line*, banyaknya *footloose* sarana produksi dan sarana distribusi, jam operasional yang tidak menentu/acak menyebabkan banyaknya operasi penindakan yang dilakukan tidak berhasil karena tutup, berpindah tempat dan tidak menemukan alat bukti yang cukup.
- ☪ Adanya petugas/ penyidik dari Balai Besar POM di Bandung yang pensiun dan mutasi ke Loka POM di Kabupaten Bogor sehingga mempengaruhi proses investigasi dan penindakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan ke-7, yaitu: “Meningkatnya Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandung” dilaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: (1) Penyidikan obat dan makanan; dan (2) Dukungan Teknis Investigasi Awal di Bidang Obat dan Makanan. Kedua kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi Balai Besar POM di Bandung sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM, yaitu: Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- ☪ Penyidikan Obat dan Makanan





GAMBAR 3.38
PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN

Pada tahun 2020, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan sebanyak 11 perkara. Perkara adalah kasus yang ditindak lanjuti secara pro justicia berdasarkan hasil gelar perkara. Sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Proses penyidikan atas 11 perkara tindak pidana di bidang obat dan makanan telah melalui tahapan sebagai berikut:

TABEL 3.42
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN
DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN”
TAHUN 2020

UPT	Tahapan	s.d TW IV (Jan - Des)										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai	Capaian perkara	% keberhasilan
		Perkara	Perkara	Perkara s.d	Perkara							
BBPOM di Bandung	SPDP	8	28	5		1.00		0.15	15.00%	59.09%	102.78%	60.74%
	Tahap I			2	5	0.44	0.76	0.4	27.35%			
	P21			1	17	0.22	0.62	0.3	14.41%			
	Tahap II			1	6	0.11	0.16	0.15	2.33%			
	Total	8	28	9	28							
Loka POM di Kota Tasikmalaya	SPDP	1	1			1.00		0.15	15.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Tahap I					1.00	0.50	0.4	40.00%			
	P21					1.00	0.50	0.3	30.00%			
	Tahap II			1	1	1.00	0.50	0.15	15.00%			
	Total	1	1	1	1							
Loka POM di Kab. Bogor	SPDP	1	2	1		1.00		0.15	15.00%	43.00%	100.00%	43.00%
	Tahap I					0.00	0.67	0.4	16.00%			
	P21				2	0.00	0.67	0.3	12.00%			
	Tahap II					0.00	0.00	0.15	0.00%			
	Total	1	2	1	2							
TOTAL	SPDP	10	31	6		1.00		0.15	15.00%	60.85%	102.44%	62.33%
	Tahap I			2	5	0.45	0.74	0.4	27.45%			
	P21			1	19	0.27	0.62	0.3	15.39%			
	Tahap II			2	7	0.18	0.17	0.15	3.01%			
	Total	10	31	11	31							



TABEL 3.43
RINCIAN NILAI KEEKONOMIAN BARANG BUKTI YANG DITANGANI

JENIS BARANG BUKTI	NILAI TAKSIRAN SITAAN			
	PRO JUSTITIA		NON PRO JUSTITIA	
Pangan	Rp.	115.137.000,00	Rp.	29.610.000,00
Obat	Rp.	861.971.942,00	Rp.	
Kosmetika	Rp.	34.116.486.800,00	Rp.	
Obat Tradisional	Rp.		Rp.	
Jumlah	Rp.	35.093.595.742,00	Rp.	29.610.000,00
TOTAL KESELURUHAN		RP. 35.123.205.742,00		

☰ Investigasi Awal

Kegiatan investigasi awal adalah untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi dari masyarakat, temuan hasil pemeriksaan, pengaduan masyarakat melalui Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi berdasarkan surat dari Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media online. Kegiatan investigasi awal yang dilakukan pada tahun 2020 terhadap 75 sarana, namun hanya 48 sarana yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Terhadap sarana tersebut, ditindaklanjuti dengan kegiatan penindakan dengan output kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan sebanyak 24 kasus, terdiri dari 23 kasus Pro-justitia, dan 1 kasus Non-justitia.

☰ Dukungan Teknis Investigasi Awal dan Penyidikan

Pemusnahan Barang Bukti



GAMBAR 3.39
PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

Untuk mencegah kemungkinan beredarnya kembali barang sitaan dan barang hasil pengawasan yang terbukti dapat membahayakan kesehatan, maka dilakukan pemusnahan. Pada tahun 2020 Balai Besar POM di Bandung telah melakukan pemusnahan dengan nilai keekonomian sebesar



Rp. 31.255.778.200,- atas barang sitaan dan barang hasil pengawasan tahun 2019 dan 2020 di PT. Tenang Jaya Sejahtera - Karawang sebanyak 3 truk (kapasitas total 30 ton). Barang sitaan dan barang hasil pengawasan yang dimusnahkan berupa produk pangan dan sediaan farmasi (obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen, dan kuasi) yang dilarang beredar karena mengandung bahan berbahaya maupun tidak memiliki ijin edar.

Peningkatan Kompetensi SDM Penindakan

**TABEL 3.44
PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENINDAKAN**

PENDIDIKAN/PELATIHAN/WORKSHOP/ BIMBINGAN TEKNIS-MANAJERIAL	PESERTA
Pelatihan Intelijen Dasar (Februari – Maret 2020)	INSAN NURUL PADJAR, S.Si., Apt.
Workshop Intelijen (Februari – Maret 2020)	RANI, S.Si, Apt
Diklat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Angkatan XII (Oktober – Desember 2020)	LUTFI RIZKI ANDRIANSYAH, S. Sos
Pelatihan Penanganan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan oleh PPNS Badan POM (November 2020)	Drs. M. Ali NEGARA SALIM, Apt.
	EDWARD SIAHAAN,S.Si.,Apt.
	LINTANG KUSUMAWARDANI, SH.
	RANI, S.Si, Apt.
	HARY NURYANTO, SE
	WACHID
	ALFAJRI ANWAR
	KOMANG ANDARU PRADIPTA, SH
Workshop Intelijen Manajerial (November 2020)	EDWARD SIAHAAN,S.Si.,Apt.
Seminar Excellent & Impactfull Team in the New Normal (November 2020)	HARY NURYANTO, SE
	ALFAJRI ANWAR
Perkuatan Koordinasi dan Peningkatan Kinerja PPNS (November 2020)	Drs. M. Ali NEGARA SALIM, Apt.
	KOMANG ANDARU PRADIPTA, SH
Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Manajemen Resiko (November 2020)	LINTANG KUSUMAWARDANI, SH.



Koordinasi dan Sinergisme Dalam Rangka Integrated Criminal Justice System (ICJS)



GAMBAR 3.40
KOORDINASI DAN SINERGISME ICJS

Pelaksanaan “Pertemuan Peningkatan Koordinasi dan Sinergisme Dalam Rangka Integrated Criminal Justice System (ICJS)” pada tanggal 26 Oktober 2020 bertempat di Aula Gedung D Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Bandung. Kegiatan “Peningkatan Koordinasi dan Sinergisme dalam Rangka ICJS” diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari Kepolisian Daerah Jawa Barat 2 orang, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat 2 Orang, Bidang Penindakan Balai Besar POM di Bandung 14 orang, Bidang Inspeksi dan Sertifikasi Balai Besar POM di Bandung 2 orang. Narasumber yang dihadirkan antara lain Kompol Agus Jamaludin,SH. (Polda Jawa Barat) dengan materi Kewenangan PPNS Dalam Melakukan Penegakan Hukum Melalui Upaya Paksa dan pemateri kedua yaitu DR. Suharso,SH.,MH. (Kejaksaan Tinggi Jawa Barat) dengan materi Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggung Jawaban di Indonesia. Pada kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinergisme dalam Rangka ICJS dilakukan juga penandatanganan Komitmen Bersama Mewujudkan Birokrasi Di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung oleh Widyaaiswara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Dr. Suharso, SH., MH.), Kabidkum Polda Jawa Barat (Kompol Agus Jamaludin,SH), Kepala Balai Besar POM di Bandung (Dra.Hardaningsih,Apt.,MHSM), Kasie Korwas PPNS Polda Jawa Barat (Kompol Kokon,SH).

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk pencapaian sasaran ini pada tahun sebelumnya dan rekomendasi tahun 2020 bertumpu pada peningkatan kualitas SDM terkait penyidikan obat dan makanan serta peningkatan koordinasi lintas sektor khususnya dengan *Criminal Justice System (CJS)*.

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun 2020 terhadap rekomendasi yang telah diberikan antara lain:



1. Peningkatan kompetensi SDM baik dari segi kompetensi teknis ataupun manajerial yang telah dilaksanakan Balai Besar POM di Bandung, Loka POM di Kota Tasikmalaya serta Loka POM di Kabupaten Bogor. Penunjukan peserta disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi staf untuk memperkecil perbedaan/gap kompetensi masing-masing individu.
2. Pelantikan dan pengangkatan PPNS pada bulan Februari 2020 terhadap 15 penyidik yang sudah habis masa berlaku Kartu Tanda Penyidik dan atau yang belum disumpah sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.
3. Peningkatan koordinasi internal dan lintas sektor pada saat akan, selama dan setelah proses penindakan dilaksanakan secara intensif terutama dengan Korwas POLDA Jabar, Jaksa Penuntut Umum serta Biro Hukum dan Organisasi Badan POM RI, baik untuk percepatan penyelesaian berkas perkara ataupun untuk menghadapi pra peradilan perkara yang ditangani penyidik Balai Besar POM di Bandung, Loka POM di Kota Tasikmalaya dan Loka POM di Kabupaten Bogor.
4. Pelaksanaan “Pertemuan Peningkatan Koordinasi dan Sinergisme Dalam Rangka Integrated Criminal Justice System (ICJS)” pada tanggal 26 Oktober 2020 bertempat di Aula Gedung D Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Bandung.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2




SASARAN KEGIATAN KE-8

TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

K keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 2 (dua) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun anggaran. Dari perhitungan diperoleh capaian sebesar **83,76%** dengan kriteria **Cukup**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.45.



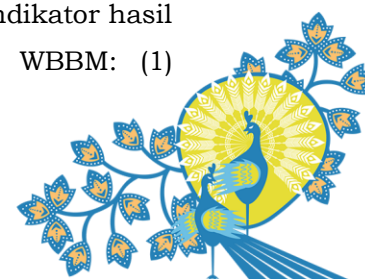
TABEL 3.45
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-8
TAHUN 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
1. Indeks RB BBPOM di Bandung	91,00	80,15	88,08%	Cukup	
2. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81,00	80,54	99,43%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			93.76%	BAIK	

1. INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG


Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: (1) Manajemen Perubahan: bobot 5%; (2) Penataan Tatalaksana: bobot 5%; (3) Penataan Sistem Manajemen SDM: bobot 15%; (4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja: bobot 10%; (5). Penguatan Pengawasan: bobot 15%; dan (6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik: bobot 10%. Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM: (1)



Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN: bobot 20%; (2) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat: bobot 20%.

**TABEL 3.46
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2020**

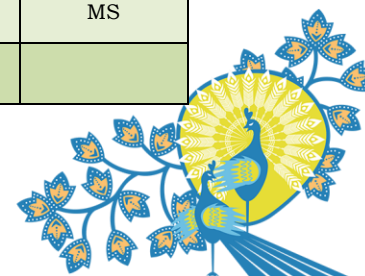
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Indeks RB BBPOM di Bandung	91,00	80,15	88,08%	Cukup 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

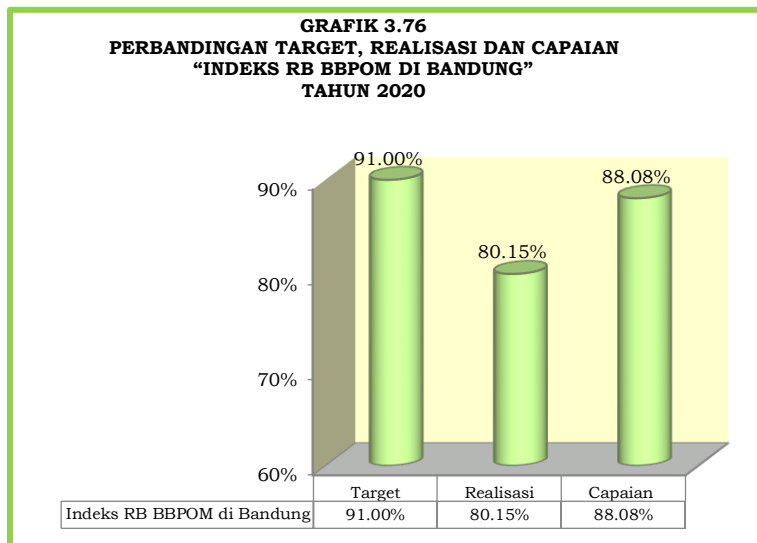
Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2020 sebesar 91. Pengukuran indikator berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM tahun 2020. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total yang terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil pada Balai Besar POM di Bandung sebesar 86,34 dengan rincian sebagai berikut:

**TABEL 3.47
HASIL EVALUASI
“INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2020**

PENILAIAN		NILAI	%	KETERANGAN	
Proses	I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (8)	7,78	97,25%	MS
	II.	PENATAAN TATALAKSANA (7)	5,33	76,19%	MS
	III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (10)	8,17	81,66%	MS
	IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)	9,17	91,69%	MS
	V.	PENGUATAN PENGAWASAN (15)	11,00	73,31%	MS
	VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)	8,06	80,56%	MS
TOTAL PENGUNGKIT		49,50			
Hasil	I.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)	19,44	97,19%	MS
	1.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	14,44	96,25%	MS
	2.	Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5,00	100,00%	MS
	II.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)	17,40	87,00%	MS
	1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)	17,40	87,00%	MS
TOTAL HASIL		36,84			



PENILAIAN	NILAI	%	KETERANGAN
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	86,34		



Sehubungan dengan adanya perbedaan hasil penilaian TPI dengan KemenPANRB untuk penetapan WBM/WBBK yang cukup tinggi maka nilai komponen pengungkit PMPZI dikonversi dengan rata-rata penilaian Balai Besar/Balai

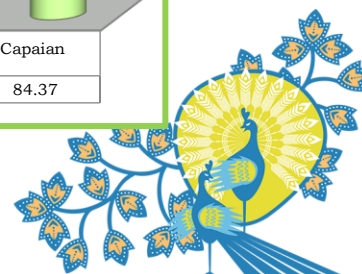
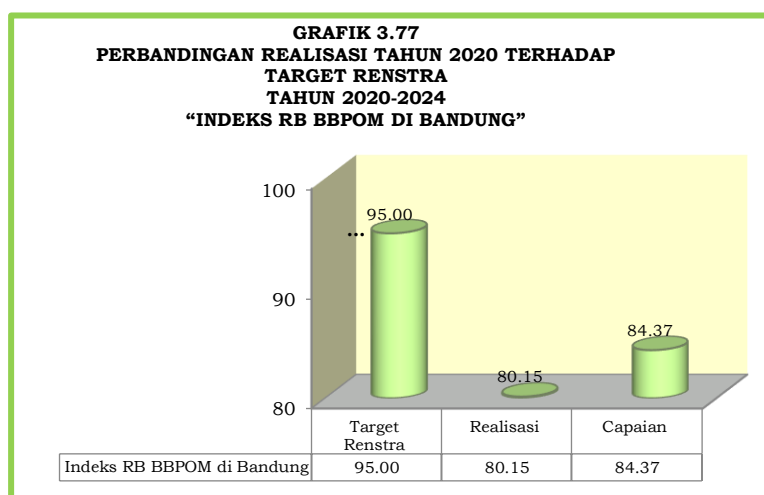
POM oleh KemenPANRB di bagi nilai rata-rata TPI pada tahun 2019. Dari konversi tersebut (0,875) menghasilkan indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Bandung sebesar 80,15. Dengan demikian nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **88,08%** dengan kriteria **Cukup**.

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandung tahun 2019 adalah sebesar 87,11, jika dibandingkan dengan tahun 2020 (80,15) maka terjadi penurunan sebesar 6,96. Pada tahun 2019 tidak ditetapkan targetnya, sehingga tidak dapat dihitung persentase capaian kinerjanya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

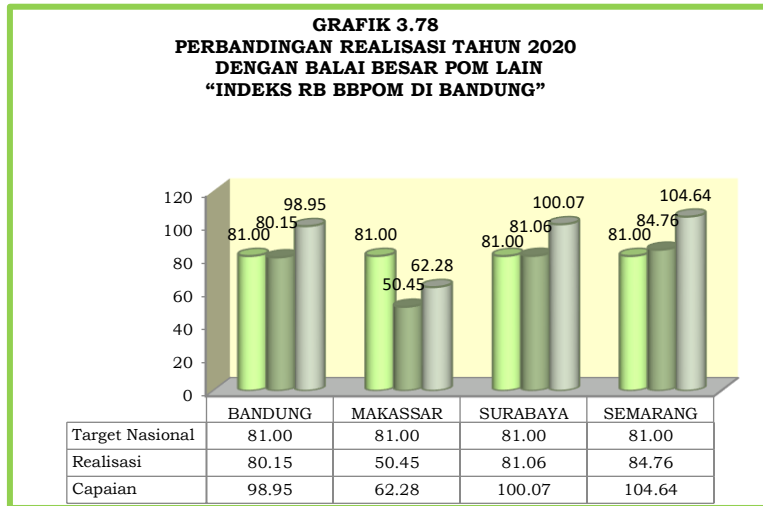
Pada tahun 2020, target indikator sasaran tersebut yang ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 sebesar 95%. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target



tersebut, maka capaian kinerja sebesar 84,37% Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.75.

E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL

Realisasi kinerja dari Indeks RB BBPOM di Bandung sesuai standar secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut: Balai Besar POM di Semarang (84,76%), Balai Besar POM di Surabaya (81,06%), Balai Besar



POM di Bandung (80,15%) dan Balai Besar POM di Makassar (50,45%). Jika realisasi kinerja dibandingkan dengan target nasional (81,00) maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Semarang (104,64%). Dari keempat Balai Besar POM tersebut hanya 2 Balai yang telah meraih predikat WBK yaitu Balai Besar POM di Surabaya (tahun 2017) dan Balai Besar POM di Semarang (tahun 2020).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM tahun 2020, Balai Besar POM di Bandung belum berhasil meraih predikat WBK. Analisis penyebab kegagalan tersebut, yaitu:

- ☹️ Belum seluruh area perubahan dilakukan monitoring dan evaluasi, serta belum seluruh hasil monitoring dan evaluasi tersebut ditindaklanjuti.
- ☹️ Pemberian *reward* (berupa pengembangan karier individu, penghargaan dll) belum seluruhnya berdasarkan hasil penilaian kinerja individu dan mekanisme penanganan pengaduan yang berkadar pengawasan.
- ☹️ Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima belum dilaksanakan kepada seluruh pegawai dan belum terdapat daftar/identifikasi jenis-jenis pelatihan budaya pelayanan prima bagi masing-masing petugas pemberi layanan.



- ☸ Belum seluruh area perubahan terdapat inovasi yang bisa meningkatkan efisiensi dan memenuhi kebutuhan stakeholder.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

- ☸ Menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokasi BBPOM di Bandung yang akan dilakukan pada tahun 2021.
- ☸ Melakukan inovasi berupa program desk Corrective Action and Preventive Action (CAPA) yang dilakukan baik secara luring dan daring dan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi pelaku usaha kecil dan mikro secara daring.

**F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Kegiatan yang menunjang pencapaian pernyataan kinerja adalah:

- ☸ Peningkatan kompetensi petugas layanan SKE, layanan informasi dan pengaduan dan layanan pengujian dalam rangka meningkatkan penerapan budaya layanan prima perlu ditingkatkan lagi sehingga semua petugas layanan memiliki budaya pelayanan prima. Tahun 2020 sudah dilakukan Pelatihan Teknis Evaluasi Surat Keterangan Ekspor Impor bagi Evaluator Baru di Balai/Balai Besar POM dan perlu disosialisasikan Kembali kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha mendapatkan informasi peraturan yang terupdate
- ☸ Monitoring dan evaluasi pembangunan Zona integritas belum dilakukan secara konsisten. Ketersediaan sarana prasarana untuk layanan publik masih terus dilengkapi dan ditingkatkan.
- ☸ Inovasi berupa layanan informasi dan pengaduan melalui no WhatsApp 'KABAYAN', pemantauan dan pelacakan permohonan pengujian dari pihak ketiga melalui aplikasi 'LACAK', permohonan pemeriksaan sarana balai (PSB) dan konsultasi baik denah dan good manufacturing practice melalui email perlu lebih gencar disosialisasikan pada masyarakat. Selain itu perlu dibuat inovasi berupa kegiatan ataupun yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik.
- ☸ Pemberdayaan subsite Balai Besar POM di Bandung lebih ditingkatkan lagi sehingga lebih mudah diakses, lebih komunikatif, tersedia lebih banyak informasi dan terpercaya.

G. TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk meningkatkan pembangunan ZI sebelumnya adalah:

- ☸ Melaksanakan Rencana Kerja Reformasi Birokasi BBPOM di Bandung yang telah disusun secara konsisten.



- ☰ Monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Reformasi Birokrasi BBPOM di Bandung secara berkala

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pokja Area 1 Manajemen Perubahan
 - a. Tim Kerja Reformasi Birokrasi
 - Pembentukan Tim Kerja Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh personil Balai Besar POM di Bandung yang ditetapkan melalui SK Kepala Balai Besar POM di Bandung nomor HK.02.02.103.1031.03.20.0652A tanggal 24 Maret 2020.
 - Pembentukan tim kerja Reformasi Birokrasi ditetapkan berdasarkan Mekanisme Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang telah disahkan oleh Pimpinan.
 - b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas
 - Balai Besar POM di Bandung melakukan review dan menetapkan dokumen Renja Kerja dan Program Prioritas Reformasi Birokrasi tahun 2020 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Bandung nomor HK.02.02.103.1031.03.20.0652B tanggal 26 Maret 2020.
 - Penyusunan Renja Kerja dan Program Prioritas Reformasi Birokrasi tahun 2020 telah mengacu pada dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM RI.
 - Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM oleh Balai Besar POM di Bandung dilakukan secara massif melalui berbagai cara diantaranya pemasangan banner dan spanduk di area kantor BBPOM di Bandung serta kampanye melalui media sosial diantaranya Instagram, Twitter, Facebook, dan Youtube.
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM

Evaluasi Pembangunan WBK/ WBBM dilakukan setiap bulan dengan melakukan Rapat Monitoring dan Evaluasi setiap bulan untuk memantau pelaksanaan program kerja Reformasi Birokrasi dari setiap POKJA.
 - d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
 - Untuk percepatan terbentuknya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta internalisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Balai Besar POM di Bandung dibentuk Tim Agent Perubahan melalui SK Kepala Balai Besar POM di Bandung nomor HK.02.02.1031.07.20.1446B tahun 2020 sebanyak 21 orang. Setiap agen perubahan membuat satu proyek perubahan mengenai internalisasi budaya kerja dan area perubahan reformasi birokrasi



yang ditetapkan dalam Renca Kerja Agen Perubahan Balai Besar POM di Bandung.

- Proyek perubahan telah dilaksanakan program sampai dengan Triwulan 3 meliputi Kampanye LDR, Salam BPOM, Mural Digital RB, One Day One Post, Halo-Halo Bandung, Yel-Yel dan Jargon RB, Mojang RB, Quiz RB, Taraje RB, Video Profil BBPOM di Bandung, Jingle Pelayanan Publik, Video KIE, Si Iteung, Capacity Building seluruh pegawai BBPOM di Bandung, Sangkuriang, BBPOM di Bandung Information Center, dan Video Tutorial Pelayanan Publik.
- Untuk meningkatkan keterlibatan personel dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK WBBM maka seluruh personil di Balai Besar POM di Bandung menandatangani Pakta Integritas.
- Pembangunan Zona Integritas juga didukung oleh lintas sektor. Kegiatan dilakukan melalui Sosialisasi dan Internalisasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di BBPOM di Bandung pada tanggal 08 Juli 2020 yang melibatkan lintas sektor dari berbagai instansi. Pada kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan komitmen bersama lintas sektor sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Balai Besar POM di Bandung.

2. Pokja Area 2 Penguatan Tata Laksana

a. Proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP):

- Pemutakhiran serta memastikan SOP Mikro sesuai dengan peta proses bisnis Balai Besar POM di Bandung dan SOP Makro Badan POM
- Penerapan SOP Makro dan Mikro dan pemantauan penerapannya di BBPOM di Bandung
- Tinjau ulang dan evaluasi SOP Makro dan SOP Mikro

b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik:

- Pemantauan dan memastikan pengukuran kinerja dan anggaran telah menggunakan aplikasi SIASN, e-performance, e-monev bappenas, e-monev DJA, dan e-monev TEPR, dan SMART BPOM
- Pemantauan dan memastikan operasionalisasi SDM/kepegawaian dilaksanakan melalui aplikasi SIASN
- Pemantauan dan memastikan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk pemberian pelayanan publik yang dimiliki telah diimplementasikan dengan baik



- Monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan public
 - c. Keterbukaan Informasi Publik:
 - Kebijakan keterbukaan informasi publik dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan
 - Monitoring dan evaluasi serta pelaporan dari setiap tahapan kerja PPID
 - d. Kualitas Pengelolaan arsip (Pengelolaan arsip telah sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan)
Pemantauan arsip aktif dan inaktif berdasarkan klasifikasi arsip Badan POM sesuai SOP dan melakukan pendataan serta rekapan arsip inaktif dan pemusnahan arsip
3. Pokja Area 3 Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, rekomendasi telah dilaksanakan serta dilengkapi dokumen-dokumen, seperti Analisis Jabatan dan Dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan dan Analisis Beban Kerja serta evaluasi CPNS tahun 2019
 - Pola Mutasi Internal, telah dilengkapi dokumen Surat Keputusan Kepala Balai dan telah menjadi Rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen QMS 2020 untuk dilaksanakan Rotasi Internal sesuai kompetensi dan ABK
 - Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, telah dilaksanakan berdasarkan Perencanaan serta standar kompetensi yang telah disusun, termasuk fasilitasi Pengembangan Kompetensi online oleh PPSDM untuk seluruh pegawai sesuai kebutuhan dan kualifikasi. Telah dilaksanakan pula monitoring dan evaluasi per triwulan, terutama untuk target capaian Jam Pelajaran (JP) setiap pegawai.
 - Penetapan kinerja individu, telah dilaksanakan cascading Penetapan Kinerja dari eselon 2 hingga level individu staff, melalui Indikator Kinerja di SIASN.
 - Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai, rekomendasi untuk selalu update data dan pelaporan telah dilaksanakan, termasuk pemberian reward dan punishment.
 - Sistem Informasi Kepegawaian, rekomendasi untuk selalu update data Sistem Informasi Kepegawaian dilaksanakan melalui SIASN



4. Pokja Area 4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 1. Keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan dokumen sebagai berikut:
 - Rencana Strategis BBPOM di Bandung Tahun 2020 – 2024
 - Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 dan Tahun 2021
 - Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021
 - *Plan Of Action* Tahun 2020 dan Tahun 2021
 - Penetapan Indikator Kinerja Utama BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024
 - Laporan Kinerja Interim dan Laporan Evaluasi Internal Triwulan I, II, III dan IV
 - Laporan RHPK dan RAPK Triwulan I, II, III dan IV
 - Rapat monitoring evaluasi kinerja dan realisasi anggaran setiap bulan/triwulan
 2. Peningkatan akuntabilitas BBPOM di Bandung sebagai berikut:
 - Dokumen perencanaan BBPOM di Bandung telah disusun sesuai dengan pedoman dan timeline yang telah ditetapkan serta telah dipublikasikan melalui website Badan POM. BBPOM di Bandung serta *esr.menpan.go.id*.
 - Integrasi dokumen perencanaan mulai dari Renstra BBPOM di Bandung Tahun 2020-2024, RKT Tahun 2020, PK Tahun 2020 dengan Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan kinerja Triwulan I, II, III dan IV.
 - Indikator Kinerja utama (IKU) BBPOM di Bandung telah selaras dengan IKU Badan POM.
 - Pelaporan RHPK, RAPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim, Monev Smart DJA, Monev Bappenas dan E Performance sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.
 - Telah diselenggarakan Pelatihan/Bimtek SAKIP kepada seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja pada tanggal 09-12 februari 2020.
5. Pokja Area 5 Penguatan Sistem Pengawasan
 - a. Pengendalian Gratifikasi
 - Sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada seluruh karyawan menggunakan medsos
 - Pemasangan spanduk pengendalian gratifikasi
 - Penyusunan laporan pengendalian gratifikasi secara berkala
 - Pembentukan Tim Pengendali gratifikasi
 - b. Penerapan SPIP



- Sosialisasi SPIP kepada seluruh karyawan
 - Pembentukan tim SPIP
 - Reviu atas penyusunan analisis resiko, evaluasi resiko, rencana mitigasi resiko dan pemantauan
 - c. Penyusunan PM-EPITE BBPOM di Bandung
 - d. Penerapan pengelolaan keuangan negara di BBPOM di Bandung dilaksanakan sesuai ketentuan
 - e. Pengaduan Masyarakat
 - Penerapan kebijakan pengaduan masyarakat
 - Terlaksananya tindaklanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
 - f. Whistle-Blowing System
 - Penerapan Whistle Blowing System
 - Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
 - g. Penanganan Benturan Kepentingan
Penanganan beturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
6. Pokja Area 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
Melaksanakan kebijakan survey kepuasan masyarakat secara berkala
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan public
 - Memberikan masukan terhadap kebijakan survey masyarakat secara berkala
 - Tindak lanjut terhadap seluruh hasil evaluasi survey kepuasan masyarakat secara berkala
 - Hasil survey kepuasan masyarakat diupload website/ subsite Balai POM, Medsos BBPOM.
 - Penyempurnaan Media pengaduan pelayanan
 - Tindak lanjut keseluruhan pengaduan pelayanan public
 - Evaluasi pengelolaan pengaduan
 - Peningkatan kecepatan merespon pengaduan masyarakat

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA


Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



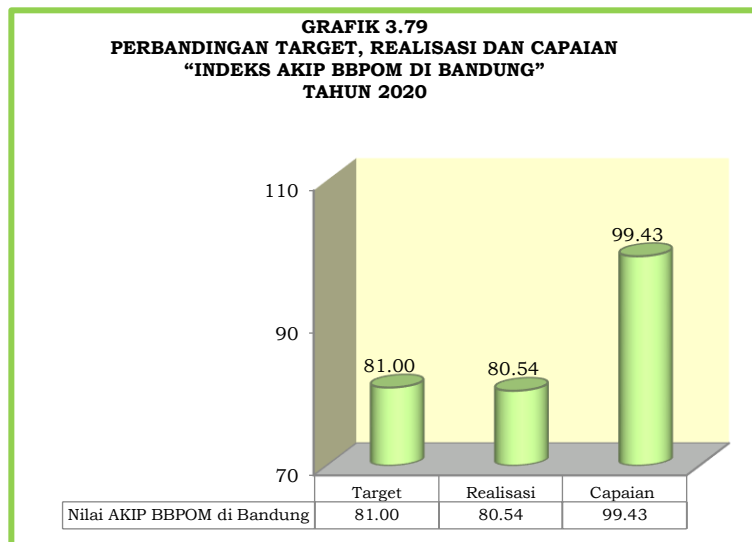
2. INDEKS AKIP BBPOM DI BANDUNG

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai AKIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Indikator Nilai AKIP tersebut dihitung melalui penilaian evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Balai Besar POM di Bandung yang dilakukan oleh Inspektorat Badan POM RI.

TABEL 3.48
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS AKIP BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81,00	80,54	99,43%	Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020



Target yang ditetapkan pada indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 81,00. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi

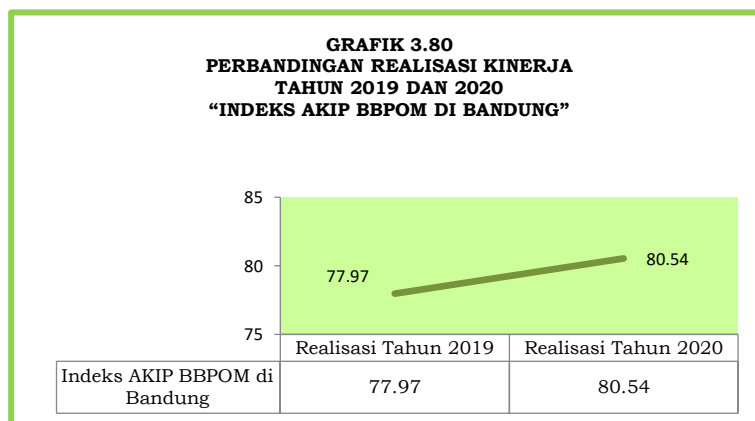
SAKIP, maka implementasi SAKIP Tahun 2020 Pada Balai Besar POM di Bandung dapat dikategorikan A (80,54) atau Memuaskan. Dengan demikian nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **99,43%** dengan kriteria **Baik**. Rincian hasil evaluasi tiap komponen SAKIP adalah sebagai berikut:



TABEL 3.49
PENILAIAN SAKIP BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2020

KOMPONEN YANG DINILAI		BOBOT (%)	NILAI
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,36
b.	Pengukuran Kinerja	25	18,75
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,89
d.	Evaluasi Internal	10	8,60
e.	Pencapaian Kinerja	20	14,94
<i>Nilai Hasil Evaluasi</i>		100	80,54
<i>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</i>			A

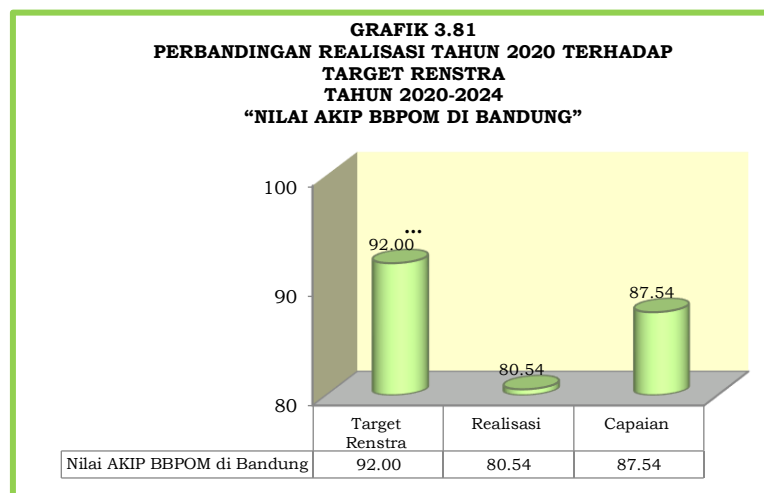
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019



Indeks AKIP BBPOM di Bandung pada tahun 2020 adalah 80,54 sedangkan tahun 2019 adalah 77,97 maka terjadi peningkatan sebesar 2,57.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Target akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang ditetapkan sebesar 92. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 87,54%

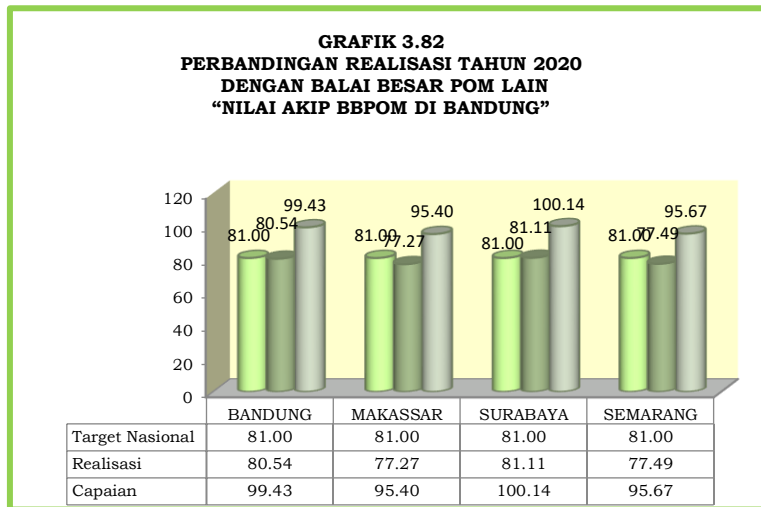


Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.81.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL

Realisasi kinerja dari Nilai AKIP BBPOM di Bandung sesuai standar secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut: Balai Besar POM di Surabaya (81,11), Balai Besar POM di Bandung (80,54), Balai Besar



POM di Semarang (77.49) dan Balai Besar POM di Makassar (77.27). Jika realisasi kinerja dibandingkan dengan target nasional (81,00) maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Semarang (100,14%).

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG AKAN DILAKUKAN PADA TAHUN 2021

Kebahagiaan dalam pencapaian kinerja sasaran ini disebabkan oleh:

- ☰ Perencanaan yang matang dan dengan target-target serta ukuran yang jelas dan mudah dievaluasi sehingga dapat memberi dampak kepada masyarakat saat ini.
- ☰ Pelaporan kinerja dan anggaran yang dilakukan secara berkala.
- ☰ Monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang dilakukan setiap bulan.
- ☰ Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran BBPOM di Bandung dalam menerapkan SAKIP secara konsisten.

Alternatif solusi yang akan dilakukan pada tahun 2021 untuk meningkatkan nilai AKIP BBPOM di Bandung berdasarkan rekomendasi yang disampaikan melalui surat Inspektur Utama Badan POM Nomor PI.04.7.71.12.20.53 tanggal 15 Desember 2020 perihal Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- ☰ Perencanaan
 - Mempublikasikan dokumen IKU 2020-2024 pada salah satu media publikasi seperti Website BPOM/Subsite Unit/Sosial Media Unit yang mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat.



- Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci serta anggarannya pada setiap periode yang akan dilakukan dalam rencana aksi untuk memastikan bahwa Program/Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memanfaatkannya dalam pengukuran capaian kinerja secara berkala.
- Mendokumentasikan data dukung dan justifikasi penetapan target kinerja secara memadai.

🏛️ Pengukuran

- Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta menyampaikan masukan dan perbaikan atas pemanfaatan dan penggunaan aplikasi *e-performance* Badan POM.
- Menjabarkan dan menyelaraskan indikator kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai dan memanfaatkannya dalam pengukuran dan penilaian capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

🏛️ Pelaporan

- Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja mengenai analisis capaian kinerja sasaran kegiatan/analisis capaian kinerja outcome serta mengaitkan analisis akuntabilitas keuangan dan analisis efisiensi dengan faktor penunjang keberhasilan serta menyajikan kesimpulan atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran pada periode akhir Renstra.
- Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja yang telah disajikan pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan organisasi maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.

🏛️ Evaluasi Internal

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik atas target kinerja triwulan, tahunan dan target jangka menengah yang dilengkapi dengan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rekomendasi perbaikan, rencana aksi dan simpulan kondisi sebelumnya dan setelah rencana aksi. Untuk analisis capaian RAPK per triwulan agar dikaitkan dengan capaian kegiatan/sub kegiatan yang mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja yang telah disahkan.
- Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan.

🏛️ Capaian Kinerja

Meningkatkan capaian kinerja melalui pemanfaatan hasil evaluasi internal.



**E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN
ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja sebagai berikut :

- ☰ Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 yang diselenggarakan pada tanggal 10-12 Februari 2020, dengan narasumber dari Inspektorat Utama Badan POM RI.



**GAMBAR 3.41
BIMTEK PENYUSUAN LAPKIN TAHUN 2020**

- ☰ Rekonsiliasi data kinerja yang diselenggarakan setiap tanggal 3 Bulan $n + 1$, untuk melakukan pencocokan data kinerja untuk pelaporan e-monev DJA, Bappenas dan RHPK.
- ☰ Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung yang dihadiri oleh Bidang/Bagian/Loka POM yang diselenggarakan secara luring dan daring. Kegiatan bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan merumuskan rencana tindaklanjut untuk kegiatan bulan berikutnya.



**GAMBAR 3.42
RAPAT MONEV KINERJA BULANAN**

F. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Rekomendasi untuk meningkatkan nilai AKIP BBPOM di Bandung adalah:

- ☰ Perlu dilakukan pembahasan terkait rekomendasi Inspektorat Utama Badan POM untuk meningkatkan efektivitas penerapan SAKIP pada BBPOM di Bandung. Rekomendasi Inspektorat Utama Badan POM adalah sebagai berikut:
 - ☰ Pengukuran Kinerja



- Membuat mekanisme pengumpulan data kinerja berupa pedoman atau SOP pengumpulan data kinerja yang sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan mampu telusur hingga tataran individu pegawai.
- Melaksanakan monitoring capaian dan kinerja sampai dengan level individu dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward dan punishment terutama untuk level eselon IV ke atas.

☰ Pelaporan Kinerja

Mengoptimalkan hasil pelaporan kinerja dalam rangka perbaikan perencanaan yang mendukung tujuan dan sasaran organisasi pada periode sebelumnya.

☰ Evaluasi Kinerja

Memanfaatkan hasil evaluasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas SDM untuk mendorong perbaikan kinerja dan implementasi SAKIP.

☰ Pencapaian Kinerja

Memanfaatkan hasil analisa keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya untuk mendorong pencapaian kinerja pada tahun berjalan.

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindaklanjut sebagai berikut:

- ☰ Mekanisme pengumpulan data capaian kinerja dilakukan secara sistematis sesuai dengan SOP POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.103.01 Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja (tanggal efektif: 01 Juli 2020), dan telah dibentuk Tim Pengelola Data Kinerja dan Penyusun Laporan Kinerja BBPOM di Bandung Tahun 2020. Pengumpulan data kinerja dan penyusunan laporan kinerja Balai Besar POM di Bandung dikoordinasikan secara berjenjang oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja. Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut: (1) Entitas Akuntabilitas Kinerja Bidang/Bagian/Loka POM dan (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan cascading kinerja eselon III/IV hingga tataran individu pegawai.
- ☰ Pengumpulan data kinerja melalui Link: <https://sites.google.com/view/monev-bbpom-di-bandung>. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan Rekonsiliasi Data yang dilakukan setiap tanggal 3 Bulan n + 1 selama 2 hari. Setelah dilakukan rekonsiliasi data akan dikunci oleh Sub Bag PE, Bidang/Bagian/Loka POM hanya dapat view data. Dengan adanya rekonsiliasi data, merupakan upaya pencocokan data dari setiap Bagian/Bidang/Loka POM agar tidak terjadi perbedaan cara perhitungan dan



kesalahan data kinerja. Data yang sudah direkonsiliasi merupakan data yang akan disajikan pada Rapat Monev Bulanan/Triwulan.

- ☪ Telah disusun Surat Keputusan Kepala BBPOM di Bandung No. HK.02.02.103.1031.09.20.1976A tentang Reward dan Punishment Atas Capaian Kinerja BBPOM di Bandung. Reward dan Punishment diberikan kepada penanggungjawab Entitas Akuntabilitas Kinerja Bidang/Balai/Loka POM.
- ☪ Rekomendasi pada Laporan Kinerja BBPOM di Bandung Tahun 2019 telah dilakukan monitoring secara berkala terhadap tindaklanjutnya.
- ☪ Pada setiap awal bulan, diselenggarakan rapat Monev Bulanan/Triwulan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja output (Bulanan) dan capaian kinerja output dan sasaran kegiatan (Triwulan) untuk menetapkan rencana pelaksanaan pada bulan/triwulan berikutnya. Agar seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- ☪ Dilakukan monitoring terhadap Capaian RAPK secara berkala Triwulan sebagai dasar pemberian Reward dan Punishment yang. Dengan adanya Reward dan Punishment diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan rasa tanggungjawab sehingga diharapkan adanya perbaikan terhadap capaian kinerja pada periode sebelumnya
- ☪ Telah diselenggarakan Pelatihan Teknis yang diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja dengan target 20 JP untuk setiap orang. Dengan adanya, pandemik covid beberapa SDM mencapai melebihi target yang ditetapkan.
- ☪ Telah diselenggarakan Pelatihan SAKIP BBPOM di Bandung pada tanggal 10-12 Februari 2020 dengan narasumber dari Inspektorat Utama, untuk meningkatkan pemahaman SDM BBPOM di Bandung tentang SAKIP dan meningkatkan kualitas LAKIP BBPOM di Bandung Tahun 2019.
- ☪ Telah diselenggarakan Pelatihan Sosialisasi Keuangan dengan Narasumber dari KPP Bojonagara dan KPPN Bandung II pada tanggal 11 Maret 2020 sebagai upaya Peningkatan SDM pengelola keuangan BBPOM di Bandung yang kompeten dan profesional sesuai tugas dan fungsinya.
- ☪ Analisis Keberhasilan dan Kegagalan menjadi dasar perumusan alternative solusi (rekomendasi), Rekomendasi tersebut telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk perbaikan kinerja yang sedang berjalan (Monev Bulanan/Triwulan).

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



**SASARAN
KEGIATAN
KE-9**

**TERWUJUDNYA SDM BBPOM DI BANDUNG YANG
BERKINERJA OPTIMAL**



Keberhasilan sasaran strategis ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) dan diukur pada akhir tahun anggaran. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.50.

**TABEL 3.50
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-9
TAHUN 2020**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	78,58	104,77%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			104,77%	BAIK	

INDEKS PROFESIONAL ASN BBPOM DI BANDUNG

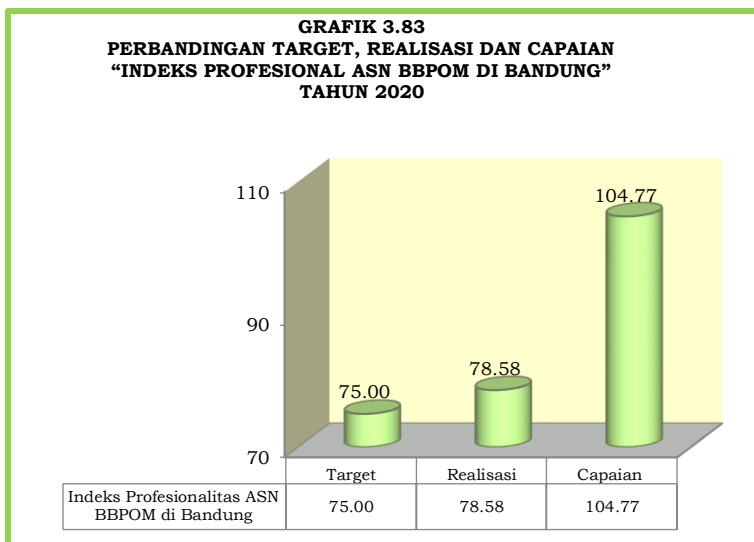
Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: (1) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai; (2) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan; (3) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan (4) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami. Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT yang dipersiapkan oleh Biro Umum dan SDM Badan POM.



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020

Target yang ditetapkan pada indikator ini pada tahun 2020 adalah sebesar 75. Berdasarkan Surat Plt. Biro SDM Badan POM Nomor B-KP.09.24.241.01.21.24 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tanggal 15 Januari 2020,

realisasi indikator ini sebesar 78,58. Dengan demikian nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar **104%** dengan kriteria **Baik**. Rincian penilaian indikator tersebut adalah sebagai berikut.



TABEL 3.51
PENILAIAN “INDEKS PROFESIONALITAS ASN”
TAHUN 2020

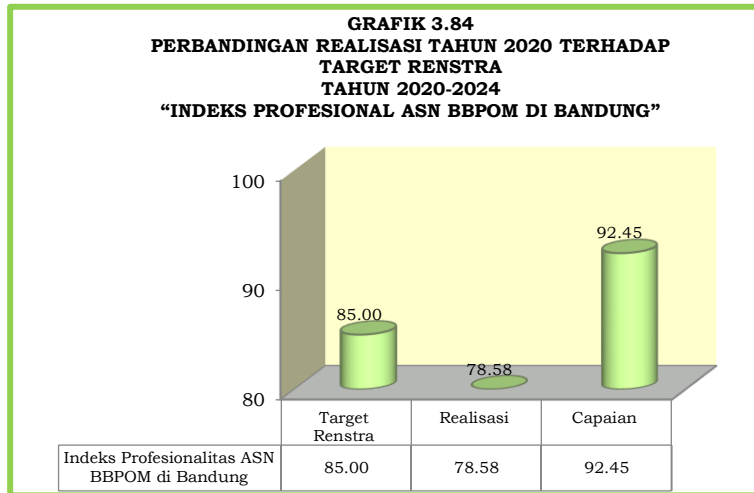
UNIT KERJA	IP	JUMLAH	TOTAL IP
Balai Besar POM di Bandung	78,25	138	10.799
Loka POM di Kota Tasikmalaya	75,94	17	1.291
Loka POM di Kab. Bogor	85,00	14	1.190
Indeks Profesional ASN	78,58	169	13.280

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator kinerja kegiatan yang baru ditetapkan pada tahun 2020 sehingga realisasi kinerja tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

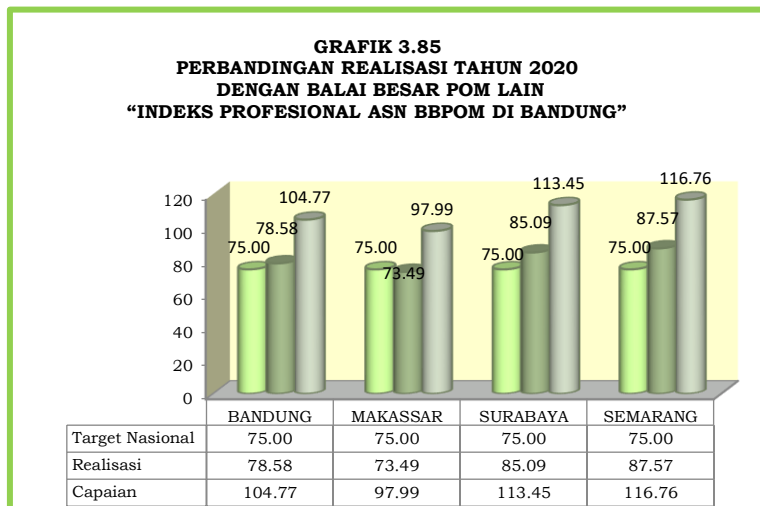


Target akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang ditetapkan sebesar 85,00. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 92,45%

Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.84.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL

Realisasi kinerja dari Indeks professional ASN BBPOM di Bandung secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut: Balai Besar POM di Semarang (87,57), Balai Besar POM di Surabaya (85.09), Balai Besar



POM di Bandung (78,58) dan Balai Besar POM di Makassar (73,49). Jika realisasi kinerja dibandingkan dengan target nasional (75,00) maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Semarang (116,76%).



**E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/
PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG AKAN DILAKUKAN
PADA TAHUN 2021**

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh Biro SDM Badan POM mengacu kepada survei melalui google form yang diisi oleh Seluruh Pegawai Badan POM, termasuk pegawai BBPOM di Bandung, Loka POM Tasik dan Bogor. Hasil survei tersebut kemudian diverifikasi oleh Tim Kepegawaian masing-masing Unit Kerja untuk kemudian dilaksanakan desk online untuk Penetapan Hasil Akhir.

Berikut diuraikan parameter yang mempengaruhi besaran Indeks:

- ☰ Parameter Kualifikasi Pendidikan (25%), Penilaian terhadap tingkat Pendidikan Pegawai masing-masing adalah sebagai berikut: S3 (25); S2 (20); S1/D4 (15); D3 (10); D1/D2/SLTA (5); <SLTA (1). Secara umum, Pegawai BBPOM di Bandung memiliki tingkat Pendidikan yang memadai, namun masih terdapat pegawai dengan capaian nilai (10) dan (5) yang sangat direkomendasikan mendapatkan Tugas Belajar atau Ijin Belajar agar dapat meningkatkan Kualifikasi Pendidikan.
- ☰ Parameter Kompetensi (40%), Penilaian terhadap Pengembangan Kompetensi terdiri atas Keikutsertaan Pegawai dalam Diklat Pimpinan (untuk Pejabat Struktural)/ Diklat Fungsional (untuk Pejabat Fungsional), Diklat Teknis 20 JP, dan Seminar/Workshop. Secara umum, capaian keikutsertaan Pegawai BBPOM di Bandung cukup memadai, namun masih ada catatan antara lain: beberapa pejabat struktural belum mengikuti diklatpim (sebelum SOTK baru berdasarkan Perka 21 Tahun 2020) serta masih banyaknya pejabat fungsional menyatakan belum mendapatkan diklat fungsional. Karena Bobot persentase yang tertinggi dalam pengukuran Indeks, Pengembangan Kompetensi diharapkan dapat lebih ditingkatkan, terutama pelaksanaan Diklat Fungsional.
- ☰ Parameter Kinerja (30%), Penilaian berdasarkan capaian Sasaran Kinerja Pegawai di SIASN, yaitu SKP dan Penilaian Perilaku 91 - 100 (30); 76 - 90 (25); 61 - 75 (15); 51 -60 (5); 50 (1). Hampir seluruh Pegawai BBPOM di Bandung mencapai nilai (25) dan terdapat beberapa pegawai dengan capaian Kinerja Sangat Baik. Diharapkan semakin banyak pegawai mencapai nilai SKP sangat baik agar Nilai Indeks juga dapat meningkat.
- ☰ Parameter Disiplin (5%), Penilaian berdasarkan kriteria sebagai berikut: Tidak Pernah Hukuman Disiplin (5); Pernah Hukuman Disiplin Ringan (3); Pernah Hukuman Disiplin Sedang (2); Pernah Hukuman Disiplin Berat (1). Secara umum, Pegawai BBPOM di Bandung tidak pernah mendapat hukuman disiplin dalam waktu satu tahun terakhir, namun untuk pegawai yang pernah mendapat hukuman disiplin, umumnya sehubungan catatan



kepatuhan absen jam kerja yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat terus ditingkatkan dengan perbaikan monitoring dan evaluasi yang telah rutin dilaksanakan.

F. EVALUASI DAN ANALISIS TERKAIT TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA TRIWULAN SEBELUMNYA

Rekomendasi Perbaikan Kinerja Triwulan sebelumnya difokuskan dalam capaian Penataan SDM Pembangunan Zona Intgritas BBPOM di Bandung, namun keterkaitan dengan IP ASN sangat erat seperti telah diuraikan di bagian D sebelumnya. Seluruh Rekomendasi telah dilaksanakan dan secara umum berperan dalam tercapainya target yang telah ditentukan.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA




Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

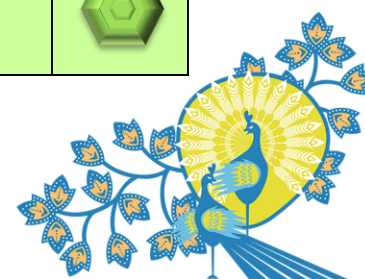
**SASARAN
KEGIATAN
KE-10**

**MENGUATNYA LABORATORIUM PENGELOLAAN
DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator, yaitu 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP (diukur pada akhir tahun anggaran) dan 2) Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal (diukur setiap triwulan). Keduanya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.75.

**TABEL 3.52
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-10
TAHUN 2020**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76,00%	71,50%	94,08%	Baik	
2. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2,00	132,45%	Tidak dapat disimpulkan	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			113,27%	BAIK	



1. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI SESUAI STANDAR GLP

Pada tahun 2020 telah diterbitkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1114 tahun 2020 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM yang berlaku untuk tahun 2020-2024. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) ini merupakan acuan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan SKL di Badan POM sebagai upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Badan POM.

Penilaian kemampuan laboratorium dilakukan terhadap 3 (tiga) parameter yaitu pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Kompetensi dan Standar Peralatan. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) dengan menggunakan tools penilaian sesuai Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan POM.

Metode penilaian yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penilaian Standar Ruang Lingkup (SRL)

Pemenuhan terhadap SRL pengujian menggunakan bukti Catatan Pengujian/Lembar Catatan Pengujian (CP/LCP). Hasil Uji Profisiensi yang inlier. Hasil Uji Kolaborasi yang diikuti untuk pengujian terkait. Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh parameter yang mempunyai angka 1 dan dibagi dengan target kemudian dikalikan dengan 100%.

2. Penilaian Standar Kompetensi

Komponen penilaian kompetensi terdiri dari Pengetahuan dan Keterampilan. Bukti fisik untuk aspek pengetahuan adalah sertifikat pelatihan/bukti pelatihan/bukti diseminasi/surat keterangan supervisi tentang pelatihan terkait. Bukti fisik untuk keterampilan berupa CP/LCP pengujian minimal melakukan satu kali pengujian terkait parameter yang dimaksud/Laporan Pengujian hasil supervisi.

- ☛ Hitung nilai kompetensi masing-masing personel yang terdapat pada Formulir Informasi Kompetensi. Hasil sudah dinyatakan dalam persen (%).
- ☛ Hasil perhitungan kompetensi personel dari masing-masing laboratorium direkap pada Rekapitulasi Persentase Pemenuhan Kompetensi Personel.
- ☛ Hasil Rekapitulasi masing-masing Laboratorium kemudian digabungkan pada Profil Kompetensi Personel Penguji.




3. Penilaian Standar Peralatan

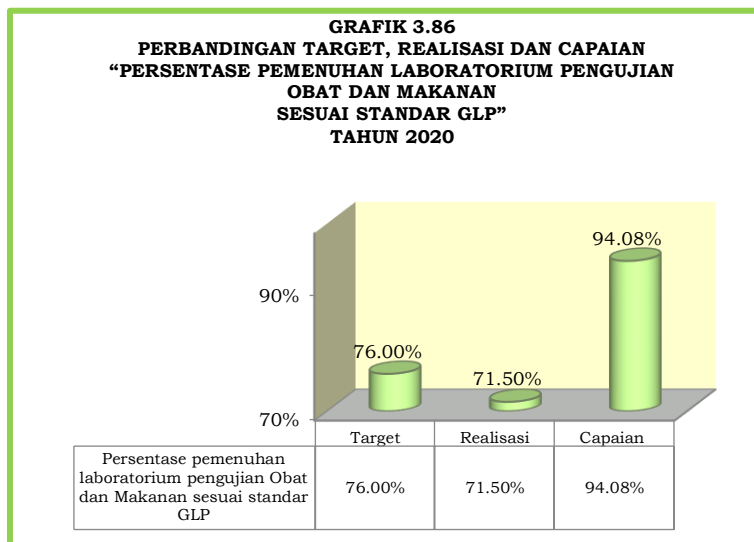
- ☼ Untuk perhitungan persentase masing-masing alat adalah jumlah alat yang dimiliki dibagi dengan standar dikalikan 100%.
- ☼ Untuk jumlah alat yang angka persentasenya lebih dari 100% maka angka yang digunakan adalah 100%.
- ☼ Pemenuhan standar peralatan dihitung dengan menjumlah persentase seluruh peralatan dibagi dengan jumlah jenis peralatan yang tercantum pada standar.

Hasil penilaian ketiga parameter tersebut di atas kemudian dirata-ratakan, dan menjadi nilai capaian indikator sasaran kegiatan ini. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 3.53.

**TABEL 3.53
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
SESUAI STANDAR GLP”
TAHUN 2020**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76,00%	71,50%	94,08%	Baik 

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020



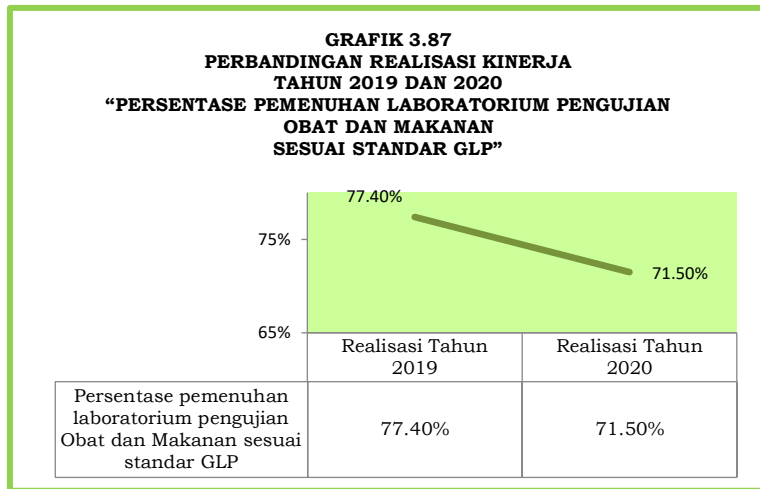
Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 76,00%. Berdasarkan hasil penilaian dari P3OMN, Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai

standar GLP Balai Besar POM di Bandung tahun 2020 sebesar 71,50%, dengan rincian sebagai berikut: persentase pemenuhan standar ruang lingkup sebesar 66,6%; persentase pemenuhan standar kompetensi sebesar 81,5% dan persentase pemenuhan standar peralatan sebesar 66,4%. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **94,08%** dengan kriteria **Baik**.



B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Penilaian tahun 2020 merupakan penilaian pertama untuk periode Renstra 2020–2024 dengan menggunakan tools penilaian yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Indikator kinerja kegiatan ini

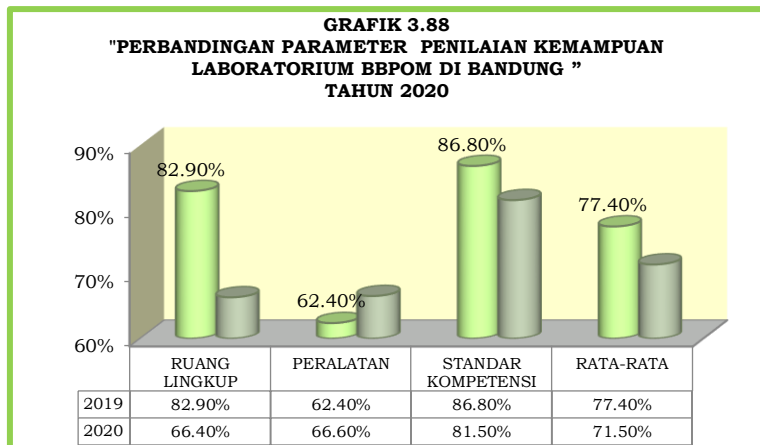


merupakan indikator kinerja kegiatan yang baru ditetapkan pada tahun 2020 sehingga realisasi kinerja tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Akan tetapi, pada tahun 2019 telah dilakukan hasil asesment pemenuhan GLP oleh PPPOMN dengan nilai 77,40. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan persentase pemenuhan GLP sebesar 5,90% dibandingkan dengan tahun 2019.

Penurunan ini terutama pada pemenuhan standar ruang lingkup. Hal tersebut disebabkan karena perubahan tools yang sangat berbeda signifikan adalah pada pengukuran indikator pemenuhan standar ruang lingkup.

Pada tahun 2019, realisasi indikator sasaran ini sebesar 77,4% dengan rincian:

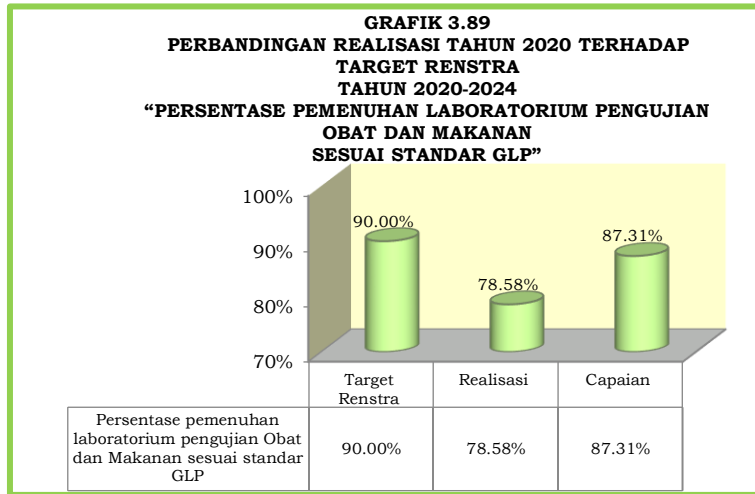
- 1) pemenuhan standar ruang lingkup : 82,9%,
- 2). Standar Peralatan : 62,4%, dan
- 3). Standar Kompetensi : 86,8%. Apabila kita bandingkan, yang menurun cukup signifikan adalah



pada parameter standar ruang lingkup. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.88.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

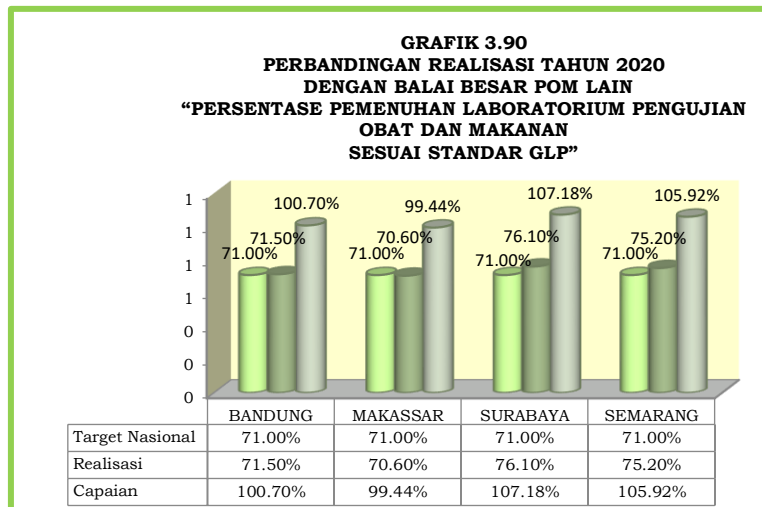


Target yang ditetapkan pada akhir periode Renstra Tahun 2020-2024 sebesar 90,00%, jika dibandingkan dengan target tersebut maka capaian kinerja sebesar 87,81%. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada

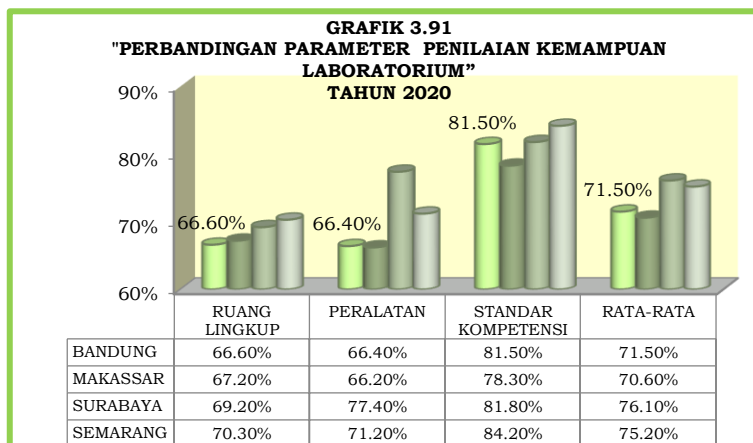
grafik 3.86.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL

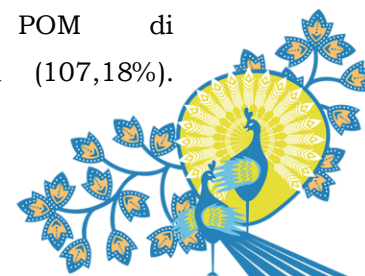
Realisasi kinerja dari Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut: Balai Besar POM di Surabaya (76,10%), Balai Besar



POM di Semarang (75.20%), Balai Besar POM di Bandung (71,50%) dan Balai



Besar POM di Makassar (70.60%). Jika realisasi kinerja dibandingkan dengan target nasional (71,00%) maka capaian kinerja tertinggi adalah Balai Besar POM di Surabaya (107,18%).



Apabila kita membandingkan lebih detail, realisasi sasaran kegiatan ini, yang masih rendah adalah pemenuhan standar peralatan dan standar Ruang lingkup. Hasil perbandingan selengkapnya dapat dilihat pada grafik 3.88.

E. ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Ketidakberhasilan pencapaian indikator sasaran ini disebabkan oleh :

- ☰ Terjadi perubahan tools pengukuran yang baru disosialisasikan di Bulan November 2020, melalui Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.01.1.2.11.20.1115 tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan POM tanggal 16 November 2020. Penetapan target pemenuhan standar ruang lingkup menggunakan tools yang lama, sedangkan pengukuran menggunakan tools yang baru. Perubahan tools yang sangat berbeda signifikan adalah pada pengukuran indikator pemenuhan standar ruang lingkup. Pada perhitungan standar ruang lingkup produk obat berubah cara perhitungannya. Semula dihitung dengan cara membandingkan ruang lingkup yang sudah mampu diuji dibandingkan dengan standar. Namun pada tahun 2020 berubah menjadi persentase peningkatan pengujian produk baru yang mampu dilakukan dengan jumlah minimal 20% dari standar sebesar 500 jenis., dan hal ini mengakibatkan capaian untuk parameter tersebut menjadi rendah;
- ☰ Pada Pedoman Penilaian Kemampuan Laboratorium Badan POM yang baru disosialisasikan tersebut terdapat beberapa parameter uji baru yang tidak termasuk dalam parameter uji kritis sesuai pedoman sampling tahun 2020, sehingga tidak dilakukan pengujian oleh laboratorium. Selain itu, kurangnya pemenuhan Standar Ruang Lingkup karena adanya kendala dari pengadaan sampel yang ditetapkan perencanaan sampling sesuai dengan standar ruang lingkup karena tidak tersedia di pasaran. Selain itu, terdapat beberapa parameter uji yang belum mampu dilakukan karena tidak tersedianya peralatan dan bahan baku pembanding. Hal-hal tersebut mengakibatkan, menjadi salah satu penyebab capaian untuk pemenuhan standar ruang lingkup menjadi rendah.
- ☰ Persentase pemenuhan standar kompetensi sebesar 81,5%. Hal ini terjadi karena beberapa penyebab, yaitu : 1). Belum dilaksanakannya pelatihan untuk materi tertentu (Teknis Analisis menggunakan Instrumen tingkat tinggi seperti PCR, LC/MS-MS, GC/MS-MS dan ICP MS); 2). BBPOM Bandung belum melakukan pengujian DNA sehingga untuk pemenuhan kompetensi personel dan peralatan masih belum sesuai standar.
- ☰ Persentase pemenuhan standar peralatan hanya sebesar 66,4%. Hal ini terjadi karena beberapa penyebab, yaitu : 1). Pada tahun 2020 terjadi



Refocussing Anggaran yang mengakibatkan dibatalkannya proses pengadaan Alat Laboratorium; 2). Beberapa peralatan yang termasuk dalam standar peralatan sudah diajukan pengadaannya pada tahun 2020-2021, namun tidak mendapat rekomendasi dari P3OMN karena adanya rencana Regionalisasi Laboratorium; 3). Keterbatasan lahan laboratorium sehingga apabila ada penambahan alat akan terjadi kesulitan untuk penempatan alat yang baru.

Sehubungan dengan informasi yang telah disampaikan di atas, bahwa perubahan cara pengukuran indikator ini terjadi di Bulan November bersamaan dengan proses evaluasi oleh PPPOMN, maka pada tahun 2020, tidak dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu cepat untuk meningkatkan capaian sasaran kegiatan ini. Alternatif solusi direncanakan akan dilakukan pada tahun 2021 adalah:

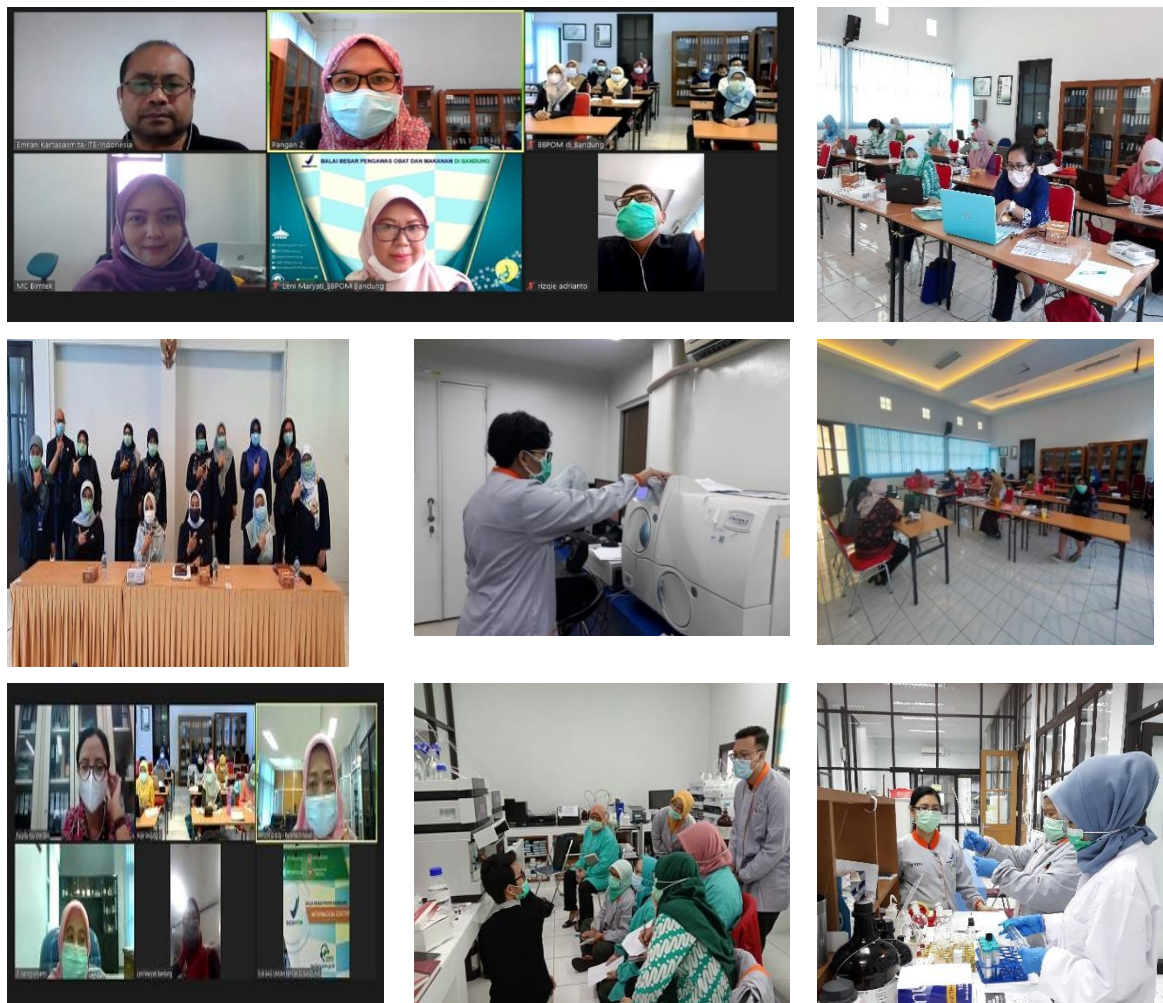
- ✎ Untuk meningkatkan persentase pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), dilakukan rencana tindak lanjut : 1). membuat road map pemenuhan SRL, selama 5 tahun (tahun 2020-2024); 2). membuat perencanaan sampling (sampel targeted) sesuai dengan roadmap yang telah dibuat dan mengkomunikasikannya dengan bidang pemeriksaan; 3). membuat perencanaan kebutuhan reagen dan baku pembanding untuk pemenuhan perencanaan sampling di atas; 4). Melakukan update metode pengujian; 5). Melakukan monitoring pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat.
- ✎ Untuk meningkatkan persentase pemenuhan standar kompetensi dilakukan rencana tindak lanjut : 1). Membuat road map pemenuhan standar kompetensi selama 5 tahun (tahun 2020-2024); 2). Membuat perencanaan peningkatan kompetensi sesuai dengan roadmap yang telah dibuat (Bimtek Internal dan Eksternal, pendampingan personil); 3). Melakukan monitoring pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat.
- ✎ Untuk meningkatkan persentase pemenuhan standar peralatan dilakukan rencana tindak lanjut : 1) Perencanaan pembangunan fasilitas laboratorium dan pengadaan peralatan pendukung untuk pengujian DNA/RNA di tahun 2021; 2). Membuat road map pemenuhan Peralatan sesuai standar selama 5 tahun (tahun 2020-2024); 3). Membuat perencanaan peralatan sesuai dengan roadmap yang telah dibuat dan mengkomunikasikannya dengan P3OMN; 4) Melakukan monitoring pelaksanaan dari perencanaan yang telah dibuat; 5). Perencanaan pengembangan laboratorium yang dimulai dengan pembuatan Master Plan Balai Besar POM di Bandung pada tahun 2021.



**F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/
KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA**

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, antara lain:

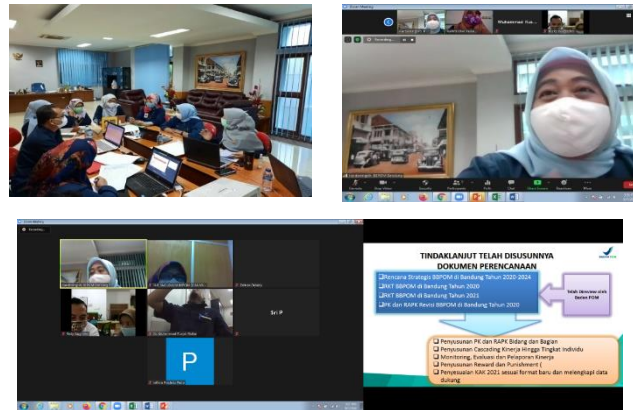
- ☛ Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi. Pelatihan ini melibatkan narasumber dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Perguruan Tinggi, Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia, Penyedia Alat Laboratorium.



**GAMBAR 3.43
BIMBINGAN TEKNIS INTERNAL LABORATORIUM**

- ☛ Monitoring dan Evaluasi Kegiatan yang dilakukan secara rutin. Rapat Money Kinerja Bulanan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung dan dihadiri oleh seluruh Bidang/Bagian/Loka POM yang diselenggarakan secara Luring dan Daring.





GAMBAR 3.44
MONEV KEGIATAN

☪ Penilaian Good Laboratory Practice (GLP)

Dilakukan penilaian kemampuan laboratorium oleh Pusat Pengujian Obat dan Makanan (P3OMN) pada tanggal 30 November 2020. Hal tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas Laboratorium Pengujian. Penilaian melibatkan dua orang assesor dari P3OMN.

G. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA

☪ Pengadaan Alat Laboratorium yang dilaksanakan di tahun 2020 belum sepenuhnya terlaksana, karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi covid 19. Dari total alat laboratorium yang akan diadakan di tahun 2020 sebanyak 21 unit, hanya terealisasi 2 unit saja. Untuk itu pada tahun 2021, direncanakan kembali pengadaan alat laboratorium tersebut, namun karena anggaran yang tersedia terbatas, sehingga tidak seluruh perencanaan tahun 2020 dapat dialokasikan di tahun 2021.

☪ Pengembangan kompetensi yang direncanakan di tahun 2020 telah dilaksanakan seluruhnya. Namun untuk memenuhi standar kompetensi personel, perlu dilakukan peningkatan kompetensi lainnya. Dan hal ini sudah masuk ke dalam rencana pengembangan kompetensi di tahun 2021.

H. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA


Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



2. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL

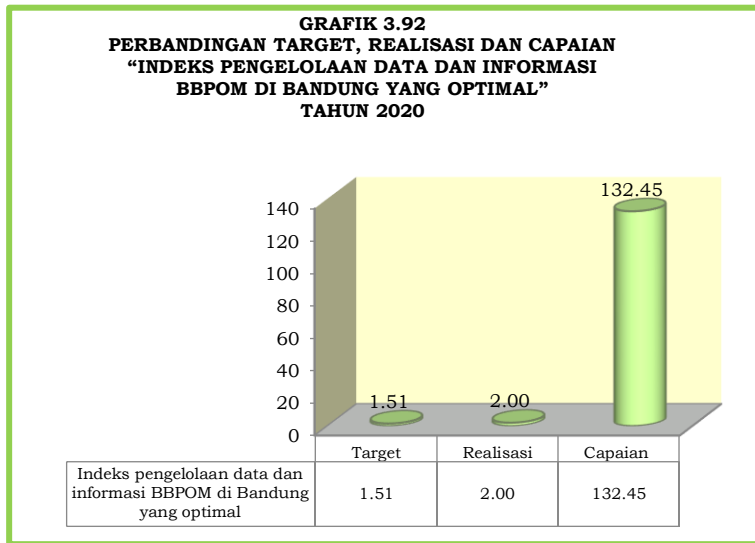
Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen: (1). Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: SIPT, SPIMKer Data Keracunan. (2). Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

TABEL 3.54
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL”
TAHUN 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2,00	132,45%	Tidak dapat disimpulkan 



A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020



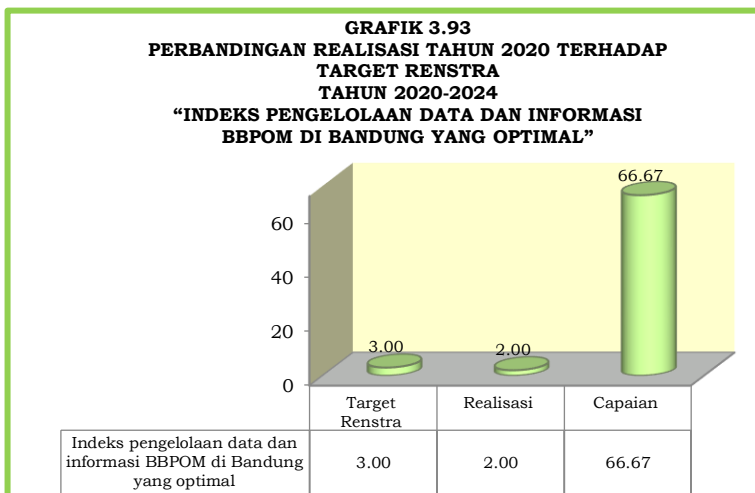
Pada tahun 2020, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 1,51, sedangkan realisasinya sebesar 2,00. Dengan rincian, pada komponen Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi sebesar 1 dan komponen

Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan sebesar 3. Sehingga capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **132,45%** dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan.**

B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator kinerja kegiatan yang baru ditetapkan pada tahun 2020 sehingga realisasi kinerja tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



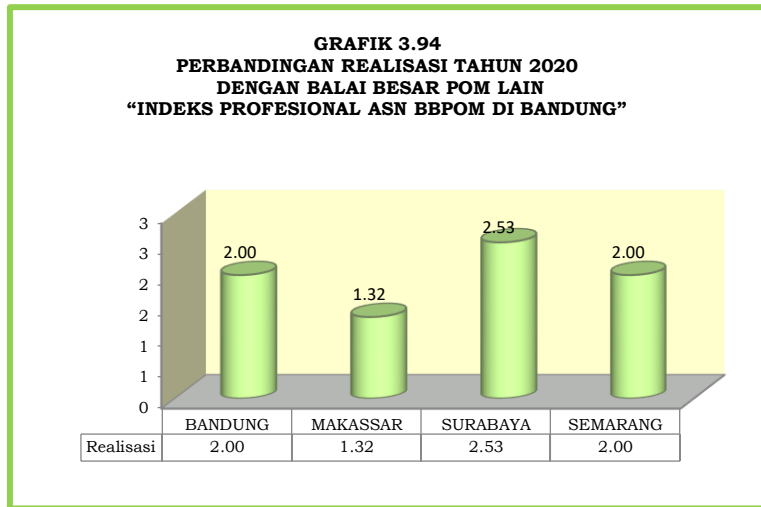
Target akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang ditetapkan sebesar 85,00. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 92,45%

Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.93.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL

Realisasi kinerja dari Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut: Balai Besar POM di Surabaya (2,53), Balai Besar POM di Bandung dan Balai Besar POM di



Semarang (2,00) dan Balai Besar POM di Makassar (1,32). Target nasional tidak ditetapkan sehingga tidak dapat diukur capaian kinerjanya terhadap target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG AKAN DILAKUKAN PADA TRIWULAN IV

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang optimal merupakan Indikator Kinerja yang ditetapkan berdasarkan komponen-komponen sebagai berikut:

- ☛ Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM – Email, pada triwulan IV terjadi peningkatan pemanfaatan 142 akun email pegawai, hingga mencapai 92% pemanfaatan pada Bulan Desember. Hal tersebut karena terus diumumkan himbuan penggunaan email dan koneksi dengan aplikasi SIMEUT dan SIMANGGA. Namun masih kurangnya fitur email corporate dibandingkan email yang umum digunakan, misalnya gmail dan yahoo masih menjadi hambatan. Sehingga diperlukan fitur yang lebih baik agar pegawai selalu menggunakan email tersebut.
- ☛ Nilai Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM – BCC, berdasarkan data akses dan login Badan POM Command Centre, menunjukkan peningkatan pada Bulan Oktober, mencapai 82 akses dan login, namun menurun menjadi 9 akses dan login pada Bulan Desember. Hal tersebut menjadi catatan kepada administrator yang diberi kewenangan akses untuk mempunyai manajemen yang baik, agar rutin mengakses BCC. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah masih dirasa kurangnya kemanfaatan BCC tersebut, sehingga tidak ada dampak signifikan antara mengakses ataupun tidak mengakses data tersebut.



- ☰ Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM - Sharing Folder, berdasarkan data akses Sharing Folder rata-rata 59.55 akses perbulan pada TW4. Terjadi penurunan persentase akses dari 67.5 akses perbulan pada TW3. Hal tersebut menjadi catatan kepada administrator yang diberi kewenangan akses untuk mempunyai manajemen yang baik, agar rutin mengakses Shared Folder, dengan target rata-rata 100 akses perbulan. Namun, yang menjadi perhatian adalah masih dirasa kurangnya kemanfaatan Shared folder tersebut, karena keterbatasan kapasitas kurang lebih 5-15 GB. Sementara itu, pegawai BBPOM di Bandung lebih terbiasa memanfaatkan shared folder yang dikelola server BBPOM di Bandung dengan kapasitas minimal 500 GB. Menjadi tantangan bagi tim TIK agar data yang sifatnya terbatas yang diunggah ke server shared folder Badan POM.
- ☰ Nilai Indeks Indeks Pemanfaatan Sistem Informasi BPOM – Berita Aktual, berdasarkan data upload berita aktual rata-rata 5,1 berita perbulan pada TW4. Terjadi penurunan upload berita aktual rata-rata 5,5 berita perbulan pada TW3. Secara umum, apabila dibandingkan target minimal 6 berita aktual perbulan, capaian BBPOM di Bandung telah cukup baik. Namun masih perlu ditingkatkan, dengan peningkatan koordinasi dengan Bidang-Bidang untuk fasilitasi upload Berita Aktual sesuai ketentuan Berita yang dapat diupload.
- ☰ Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BCC-SIPT, berdasarkan data input SIPT Sampling dan Pengujian, dari 5374 sampel telah diinput 5069 (94.32%) pada akhir TW4. Terjadi peningkatan input dari triwulan sebelumnya (62.1%) pada TW3 dan (27.82%) pada TW2. Secara umum, kerja keras dan kerjasama yang baik seluruh pihak, baik administrator PUSDATIN serta Bidang Pemeriksaan serta Bidang Pengujian sangat berperan dalam peningkatan capaian akses SIPT tersebut. Namun terdapat beberapa catatan, yaitu terlambatnya implementasi SIPT versi 3.0 di TW2 serta kendala teknis aplikasi menjadi faktor utama yang mempersulit capaian dalam triwulan awal dan menumpuk di akhir tahun, diharapkan tidak terjadi di tahun berikut.
- ☰ Nilai Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BCC-SPIMKER, berdasarkan data input SPIMKER, persentase entry dan verifikasi data menunjukkan angka rata-rata di atas 90% hingga bulan Oktober 2020. Namun terjadi penurunan persentase verifikasi oleh Petugas pada bulan November (64%) dan Desember (52%). Secara keseluruhan capaian tersebut cukup baik, namun menjadi catatan dalam bulan terakhir tahun 2020, dimana kemungkinan petugas kesulitan melaksanakan verifikasi data. Hal tersebut diharapkan dapat diperbaiki dalam pelaksanaan tahun berikutnya.



F. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA SEBELUMNYA

Rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pada periode sebelumnya, antara lain peningkatan koordinasi dengan PUSDATIN serta peningkatan komunikasi kepada seluruh pegawai BBPOM di Bandung telah dilaksanakan, dan secara umum menjadi salah satu faktor utama, tercapainya target Indeks pada akhir tahun 2020. Untuk Evaluasi tahun selanjutnya, catatan yang diuraikan dalam bagian D diatas, akan dilaksanakan dan terus dilakukan Monitoring berkala.

G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA




Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

**SASARAN
KEGIATAN
KE-11**

**TERKELOLANYA KEUANGAN BBPOM DI BANDUNG
SECARA AKUNTABEL**

K^{KE-11} eberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 2 (dua) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kedua indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran tersebut sebesar **105,05%** dengan kriteria **Baik**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.78.

**TABEL 3.55
CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-11
TAHUN 2020**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
1. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93,00	95,14	102,30%	Baik	
2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (100%)	108,70%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			105,05%	BAIK	




1. NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:(1) Revisi DIPA; (2) Deviasi Halaman III DIPA; (3) Pengelolaan UP; (4) Rekon LPJ Bendahara; (5) Data Kontrak; (6) Penyelesaian Tagihan; (7) Penyerapan Anggaran; (8) Retur SP2D; (9) Perencanaan Kas (Renkas); (10) Pengembalian/Kesalahan SPM; (11) Dispensasi Penyampaian SPM; (12) Pagu Minus; dan (13) Konfirmasi Capaian Output.

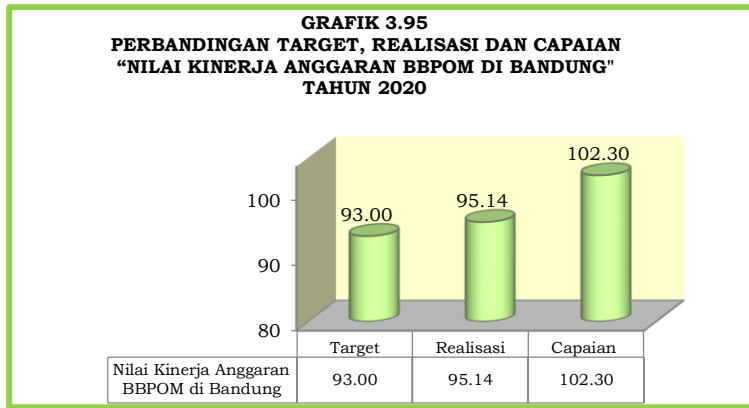
Namun, adanya kebijakan Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam rangka mendukung upaya percepatan penanganan COVID-19 maka IKPA Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN direlaksasi, artinya tidak dilakukan penilaian IKPA pada triwulan I dan II. Selanjutnya pada triwulan III, tahapan penanganan Covid-19 telah memasuki masa tatanan normal baru (*new normal*), Direktur Jenderal Perbendaharaan mencabut kebijakan relaksasi penilaian IKPA Tahun 2020 serta memberlakukan kebijakan penilaian kembali IKPA mulai Triwulan III Tahun 2020, terdapat 2 indikator yang tidak dilakukan penilaian yaitu : (1) **Revisi DIPA**, sehingga Satker dapat melakukan revisi DIPA lebih dari satu kali dalam satu triwulan; (2) **Deviasi Halaman III DIPA**, sehingga Satker dapat melakukan revisi rencana penarikan dana (RPD) pada halaman III DIPA sesuai dengan kebutuhan.

TABEL 3.56
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93,00	95,14	102,30%	Baik	



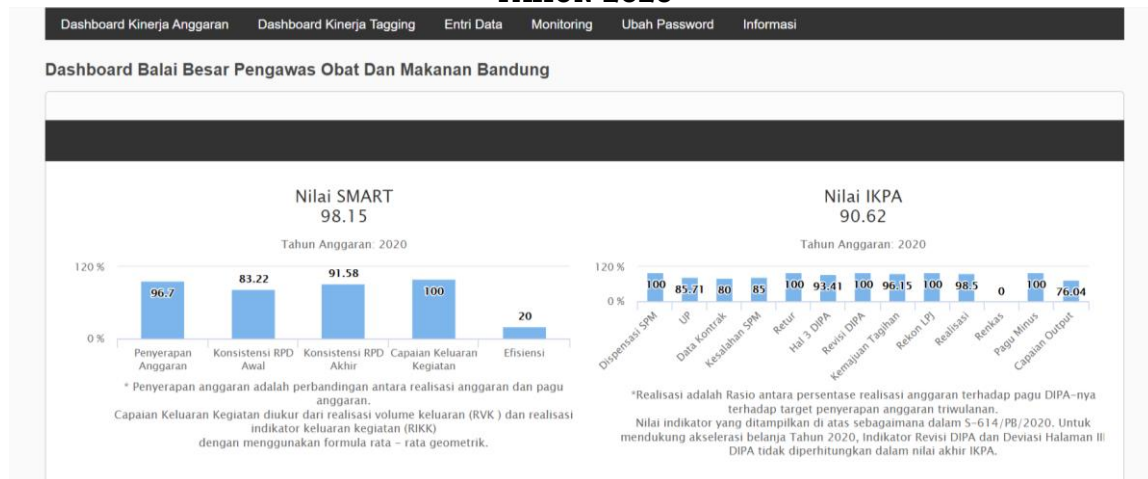
A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020



Pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar 93,00. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung tahun 2020 sebesar 95,14, dengan rincian, nilai EKA sebesar 98,15 dan nilai IKPA

sebesar 92,62. Dengan demikian capaian kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **102,30%** dengan kriteria **Baik**.

**TABEL 3.57
NILAI EKA DAN IKPA BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2020**



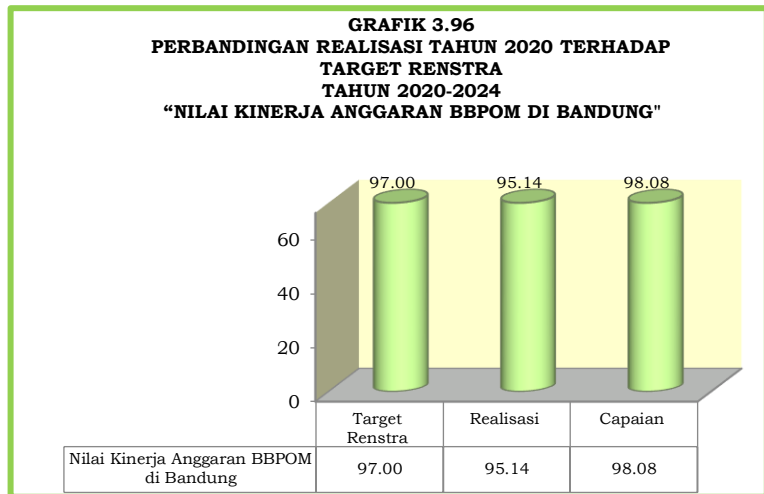
B. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Indikator baru ditetapkan pada tahun 2020 sehingga realisasi kinerja tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

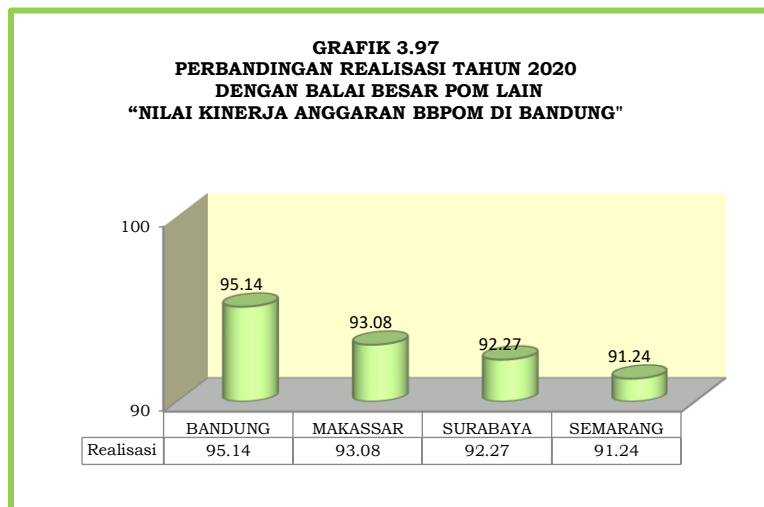
Target akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang ditetapkan sebesar 97,00. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 98,08%



Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.96.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL

Realisasi kinerja dari Nilai kinerja Anggaran secara berturut-turut dari yang tertinggi sebagai berikut: Balai Besar POM di Bandung (95,14), Balai Besar POM di Makassar (93,08) dan Balai Besar POM di Surabaya (92,27) dan



Balai Besar POM di Semarang (91,24). Target nasional tidak ditetapkan sehingga tidak dapat diukur capaian kerjanya terhadap target nasional.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Peningkatan pencapaian kinerja disebabkan antara lain oleh:

- ☛ Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap output dan sasaran kegiatan yang dilakukan setiap bulan dengan melibatkan pimpinan, sehingga pimpinan dapat menentukan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran pada periode selanjutnya.



- ☰ Realokasi dan Refocussing anggaran untuk kegiatan prioritas antara lain : kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat, penanganan pandemik Covid-19, peningkatan kemampuan laboratorium pengujian untuk melakukan pengujian Covid 19 serta peningkatan kualitas pelayanan publik BBPOM di Bandung.
- ☰ Pada masa pandemic Covid-19 dan tatanan normal baru (*new normal*), BBPOM di Bandung melakukan perubahan terhadap paradigma pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan ke arah pemanfaatan sistem informasi secara daring dan menggunakan berbagai media sosial, hasilnya sangat efektif dan efisien. Dengan pemanfaatan sistem informasi, pada beberapa kegiatan (output) dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada triwulan IV, capaian kinerja sasaran kegiatan sampai dengan triwulan IV sebesar 103,11%.
- ☰ Penyerapan anggaran BBPOM di Bandung berdasarkan SAS pada triwulan IV sebesar Rp, 46.499.251.688,- (96,93%) terhadap pagu tahun anggaran 2020 sebesar Rp.47.974.243.000,-.
- ☰ Peningkatan kinerja pengelolaan APBN pada satker BBPOM di Bandung, antara lain: pertanggungjawab UP dan TUP tepat waktu, penyampaian data kontrak dan LPJ Bendahara tepat waktu, penyelesaian tagihan tepat waktu.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain:

- ☰ Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap output dan sasaran kegiatan secara berkala.
- ☰ Optimalisasi anggaran dari sisa dana kegiatan atau kontrak karena target telah tercapai untuk kegiatan lain.
- ☰ Percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja sebagai berikut:

- ☰ Kegiatan Sosialisasi Keuangan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2020 dengan narasumber dari KPPN Bandung II dan KPP Bandung Bojonagara, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi bagi pengelola keuangan di BBPOM di Bandung terkait peraturan terkini di bidang pengelolaan keuangan.





GAMBAR 3.45
SOSIALISASI KEUANGAN

- ☪ Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung yang dihadiri oleh Bidang/Bagian/Loka POM yang diselenggarakan secara luring dan daring. Kegiatan bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan merumuskan rencana tindak lanjut untuk kegiatan bulan berikutnya serta monitoring terhadap progress realisasi anggaran dan mengukur tingkat efisiensi kegiatan dan sasaran kegiatan.

G. TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Rekomendasi untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BBPOM di Bandung pada periode sebelumnya adalah:

- ☪ Melakukan langkah-langkah untuk memenuhi seluruh indikator pembentuk IKPA.
- ☪ Melakukan perhitungan kebutuhan anggaran dalam mencapai kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran agar memenuhi target realisasi anggaran sebesar 99%.
- ☪ Refocusing anggaran untuk penanganan pandemik Covid-19 dan pelaksanaan KIE pada masa pandemik Covid-19 sesuai Rencana Anggaran Belanja KIE pola baru.

Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- ☪ Beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk memenuhi indikator pembentuk IKPA antara lain: pertanggungjawab UP dan TUP tepat waktu, penyampaian data kontrak dan LPJ Bendahara tepat waktu, penyelesaian tagihan tepat waktu.
- ☪ Seluruh Bidang/Bagian/Loka POM telah melakukan perhitungan kebutuhan anggaran dalam mencapai kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran. Hasil perhitungan tersebut menjadi dasar dalam melakukan realokasi anggaran/refocusing anggaran. Selama tahun 2020, telah dilakukan revisi DIPA di Kanwil DJPB dan DJA sebanyak 9 kali dan revisi POK sebanyak 2 kali. Revisi anggaran untuk pemotongan APBN, kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat, penanganan pandemik Covid-19, peningkatan kemampuan



laboratorium pengujian untuk melakukan pengujian Covid 19 serta peningkatan kualitas pelayanan publik BBPOM di Bandung.


G. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.

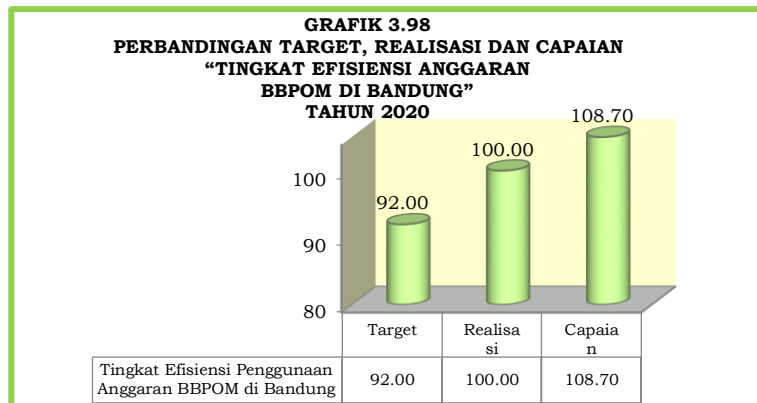
2. TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

TABEL 3.58
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
“TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG”
TAHUN 2020

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (100%)	108,70%	Baik	

A. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020



Pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar 92,00. Tingkat Efisiensi Anggaran BBPOM di Bandung tahun 2020 sebesar 100,00. Dengan demikian capaian

kinerja indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar **108,70%** dengan kriteria **Baik**.

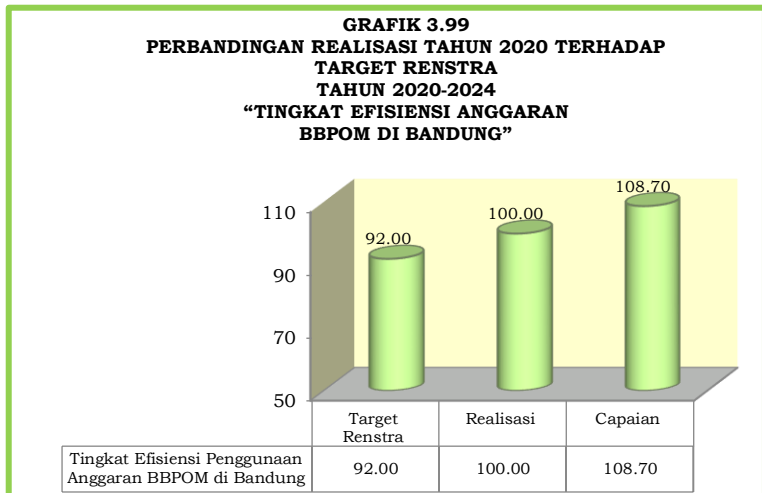
C. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TAHUN 2019

Indikator baru ditetapkan pada tahun 2020 sehingga realisasi kinerja tahun 2020 tidak bisa dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.



D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Target akhir periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang ditetapkan sebesar 92,00. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja sebesar 908,70% Secara lengkap dapat dilihat pada grafik 3.99.



E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 DENGAN KINERJA BALAI BESAR POM LAIN DAN TARGET NASIONAL



Realisasi kinerja Tingkat efisiensi anggaran adalah, sebagai berikut: Balai Besar PO7 di Bandung, Balai Besar POM di Makassar, Balai Besar POM di Surabaya dan Balai Besar POM di Semarang (100,00).

Target nasional tidak ditetapkan sehingga tidak dapat diukur capaian kerjanya terhadap target nasional.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja sebagai berikut:

- ☞ Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan setiap bulan yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung yang dihadiri oleh Bidang/Bagian/Loka POM yang diselenggarakan secara luring dan daring. Kegiatan bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dan merumuskan rencana tindak lanjut untuk kegiatan bulan berikutnya serta



monitoring terhadap progress realisasi anggaran dan mengukur tingkat efisiensi kegiatan dan sasaran kegiatan.

**G. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/
PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH
DILAKUKAN**

Peningkatan pencapaian kinerja sasaran pada triwulan III disebabkan antara lain oleh:

- ☰ Telah dilakukan realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran dari kegiatan dengan TE yang rendah untuk kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat, penanganan pandemik Covid-19, peningkatan kemampuan laboratorium pengujian untuk melakukan pengujian Covid 19 serta peningkatan kualitas pelayanan publik BBPOM di Bandung.
- ☰ Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran yang dilakukan setiap bulan untuk mengetahui progress pelaksanaan kegiatan, mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi serta untuk merumuskan rencana tindaklanjut pada periode selanjutnya.

Alternative solusi yang telah dilakukan, yaitu:

- ☰ Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap output dan sasaran kegiatan secara berkala.
- ☰ Optimalisasi anggaran dari sisa dana kegiatan atau kontrak karena target telah tercapai untuk kegiatan lain.
- ☰ Percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

**H. EVALUASI DAN ANALISIS TERKAIT TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI
PERBAIKAN KINERJA TRIWULAN SEBELUMNYA**

Rekomendasi untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BBPOM di Bandung pada periode sebelumnya adalah:

- ☰ Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran setiap output dan sasaran kegiatan secara berkala.
- ☰ Optimalisasi anggaran dari sisa dana kegiatan atau kontrak karena target telah tercapai untuk kegiatan lain.
- ☰ Percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
- ☰ Perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan selama pandemic Covid-19, jika tidak memungkinkan perlu dilakukan penurunan terhadap target dan anggaran indikator kegiatan tersebut.



Berdasarkan rekomendasi tersebut telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- ☰ Pada masa pandemic Covid-19 dan tatanan normal baru (*new normal*), BBPOM di Bandung melakukan perubahan terhadap paradigma pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan ke arah pemanfaatan sistem informasi secara daring dan menggunakan berbagai media sosial, hasilnya sangat efektif dan efisien. Dengan pemanfaatan sistem informasi, pada beberapa kegiatan (output) dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan pada triwulan IV, capaian kinerja sasaran kegiatan sampai dengan triwulan IV sebesar 103,13%.
- ☰ Realokasi dan Refocussing anggaran untuk kegiatan prioritas antara lain : kegiatan KIE dengan Tokoh Masyarakat, penanganan pandemik Covid-19, peningkatan kemampuan laboratorium pengujian untuk melakukan pengujian Covid 19 serta peningkatan kualitas pelayanan publik BBPOM di Bandung.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk analisis efisiensi penggunaan sumber daya, akan dibahas secara terperinci pada poin 3.2.



3.2

REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2020, anggaran Balai Besar POM di Bandung sebesar Rp. 47.974.243.000,- (Empat puluh tujuh miliar Sembilan ratus tujuh puluh empat juta Dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah), sedangkan realisasinya berdasarkan SAS sebesar Rp.46.499.251.688,- (Empat puluh enam miliar empat ratus Sembilan puluh sebilan juta Dua ratus lima puluh satu ribu Enam ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga persentase capaian realisasi sebesar 96,93%, dengan rincian sebagai berikut:

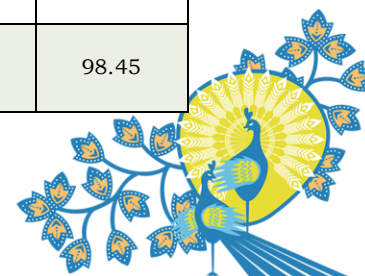
TABEL 3.59
REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2020

Jenis Belanja	Pagu TA 2020	Realisasi	Capaian
Belanja Pegawai	24,045,471,000	23,124,582,238	96.17
Belanja Barang	22,604,350,000	22,052,282,650	97.56
Belanja Modal	1,324,422,000	1,322,386,800	99.85
Total	47,974,243,000	46,499,251,688	96.93

Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan dan alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

TABEL 3.60
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	944,115,000	932,514,113	98.77
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	327,870,000	324,321,258	98.92
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di	228,072,000	224,545,665	98.45



NO.	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Bandung			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	2,257,416,000	2,234,303,276	98.98
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6,139,311,000	6,023,331,559	98.11
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,141,692,000	1,138,482,155	99.72
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,005,055,000	974,136,900	96.92
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	1,987,602,000	1,976,769,407	99.45
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	88,201,000	85,441,000	96.87
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	4,134,705,000	4,094,049,609	99.02
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29,720,204,000	28,491,356,746	95.87
	TOTAL	47,974,243,000	46,499,251,688	96.93

Penyerapan anggaran persasaran kegiatan pada tahun 2020 dari yang terbesar secara berurutan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Kegiatan Keenam yaitu: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 1,141,692,000,- dan realisasi sebesar Rp. 1,138,482,155,-, dengan capaian 99,72%.
- 2) Sasaran Kegiatan Kedelapan yaitu: Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal dengan pagu sebesar Rp. 1,987,602,000,- dan realisasi sebesar Rp. 1,976,769,407,-, dengan capaian 99,45%.
- 3) Sasaran Kegiatan Kesepuluh yaitu: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan pagu sebesar Rp. 4,134,705,000,- dan realisasi sebesar Rp. 4,094,049,609,-, dengan capaian 99,02%.
- 4) Sasaran Kegiatan Keempat yaitu: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 2,257,416,000,- dan realisasi sebesar Rp. 2,234,303,276,- dengan capaian 98,98%.
- 5) Sasaran Kegiatan Kedua yaitu: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 327,870,000,- dan realisasi sebesar Rp. 324,321,258,- dengan capaian 98,92%.



- 6) Sasaran Kegiatan Kesatu yaitu: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 944,115,000,- dan realisasi sebesar Rp. 932,514,113,- dengan capaian 98,77%.
- 7) Sasaran Kegiatan Ketiga yaitu: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 228,072,000,- dan realisasi sebesar Rp. 224,545,665,- dengan capaian 98,45%.
- 8) Sasaran Kegiatan Kelima yaitu: Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 6,139,311,000,- dan realisasi sebesar Rp. 6,023,331,559,- dengan capaian 98,11%.
- 9) Sasaran Kegiatan Ketujuh yaitu: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung dengan pagu sebesar Rp. 1,005,055,000,- dan realisasi sebesar Rp. 974,136,900,- dengan capaian 96,92%.
- 10) Sasaran Kegiatan Kesembilan yaitu: Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal dengan pagu sebesar Rp. 88,201,000,- dan realisasi sebesar Rp. 85,441,000,- dengan capaian 96,87%.
- 11) Sasaran Kegiatan Kesebelas yaitu: Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel dengan pagu sebesar Rp. 29,720,204,000,- dan realisasi sebesar Rp. 28,491,356,746,- dengan capaian 95,87%.

Sedangkan jika dilihat penyerapan anggaran berdasarkan *perspective balance score card* maka secara berturut-turut dari yang tertinggi adalah sebagai berikut:

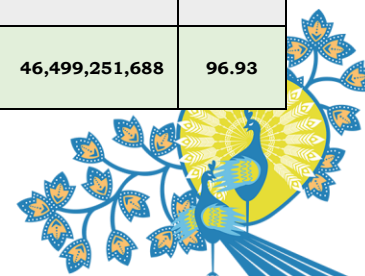
- 1) *Stakeholders Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1,500,057,000,- dan realisasi sebesar Rp. 481,381,036,- dengan capaian 98,75%.
- 2) *Internal Process Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10,543,474,000,- dan realisasi sebesar Rp. 10,370,253,890,- dengan capaian 98,36%.
- 3) *Learning and Growth Perspective* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 35,930,712,000,- dan realisasi sebesar Rp. 34,647,616,762,- dengan capaian 96,43%.

TABEL 3.61



**REALISASI ANGGARAN PERSASARAN KEGIATAN BERDASARKAN PERSPECTIVE
BALANCE SCORE CARD BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020**

Perspective	Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan			Perspective		
		Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE	1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	944,115,000	932,514,113	98.77	1,500,057,000	1,481,381,036	98.75
	2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	327,870,000	324,321,258	98.92			
	3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	228,072,000	224,545,665	98.45			
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE	4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	2,257,416,000	2,234,303,276	98.98	10,543,474,000	10,370,253,890	98.36
	5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6,139,311,000	6,023,331,559	98.11			
	6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,141,692,000	1,138,482,155	99.72			
	7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1,005,055,000	974,136,900	96.92			
	8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	1,987,602,000	1,976,769,407	99.45			
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE	9 Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	88,201,000	85,441,000	96.87	35,930,712,000	34,647,616,762	96.43
	10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	4,134,705,000	4,094,049,609	99.02			
	11 Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	29,720,204,000	28,491,356,746	95.87			
NILAI PENCAPAIAN ANGGARAN		47,974,243,000	46,499,251,688	96.93	47,974,243,000	46,499,251,688	96.93



Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ CAPAIAN INPUT}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ RENCANA CAPAIAN OUTPUT}}{\% \text{ RENCANA CAPAIAN INPUT}}$$
$$SE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:



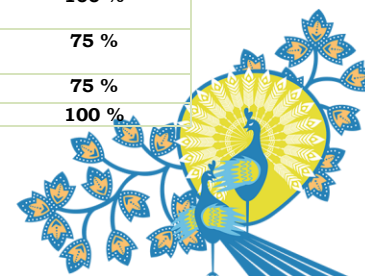
$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana).

Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.62
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TAHUN 2020

	Indikator Sasaran Kegiatan	Volume	Anggaran	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
	a	b	c	d=b/c	e = d-1	f
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	120.82	98.66	1.22	0.22	95 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	98.46	99.83	0.99	-0.01	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	104.99	99.13	1.06	0.06	100 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	93.40	94.59	0.99	-0.01	75 %
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	93.54	98.92	0.95	-0.05	75 %
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	109.42	98.07	1.12	0.12	100 %
7	Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	106.24	89.65	1.19	0.19	100 %
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	97.07	99.80	0.97	-0.03	75 %
9	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	111.32	95.37	1.17	0.17	100 %
10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	91.20	95.25	0.96	-0.04	75 %
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	101.78	99.90	1.02	0.02	100 %
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	113.18	99.62	1.14	0.14	100 %
13	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	96.96	99.58	0.97	-0.03	75 %
14	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Bandung	113.51	96.62	1.17	0.17	100 %
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	103.74	97.95	1.06	0.06	100 %
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	100.00	98.51	1.02	0.02	100 %
17	Jumlah desa pangan aman	100.00	99.37	1.01	0.01	100 %
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100.00	97.44	1.03	0.03	100 %
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	109.45	99.74	1.10	0.10	100 %
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	108.05	99.69	1.08	0.08	100 %
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	84.23	96.92	0.87	-0.13	75 %
22	Indeks RB BBPOM di Bandung	88.08	99.98	0.88	-0.12	75 %
23	Nilai AKIP BBPOM di Bandung	99.43	99.35	1.00	0.00	100 %



Indikator Sasaran Kegiatan	Volume	Anggaran	IE	TE	KATEGORI	
	Capaian (%)	Capaian (%)				
a	b	c	d=b/c	e = d-1	f	
24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	104.77	96.87	1.08	0.08	100 %
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	94.08	98.71	0.95	-0.05	75 %
26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	132.45	99.82	1.33	0.33	95 %
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	102.30	94.57	1.08	0.08	100 %
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	108.70	96.17	1.13	0.13	100 %
Tingkat Efisiensi		103.11	96.93	1.06	0.06	100 %

Pada tahun 2020, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator secara kumulatif masuk kedalam kategori Efektif (100%). Namun, berdasarkan data pada tabel di atas maka dapat diketahui sebanyak 9 (Sembilan) indikator yang masuk kedalam kategori Tidak Efektif (75%).

Sedangkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.63
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN KEGIATAN/OUTPUT
TAHUN 2020**

No	Kegiatan/Output	Capaian Volume (%)	Capaian Anggaran (%)	IE	SE	TE	KATEGORI
a	b	c	d	e=c/d	f	g=e-f	h
1	Sampel Makanan yang Diperiksa	100.00	99.43	1.01	1	0.01	EFISIEN
2	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	100.48	98.68	1.02	1	0.02	EFISIEN
3	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	103.86	98.93	1.05	1	0.05	EFISIEN
4	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan	125.00	99.26	1.26	1	0.26	EFISIEN
5	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Good Laboratory Practice (laboratorium)	100.00	98.71	1.01	1	0.01	EFISIEN
6	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Jawa Barat	110.00	96.59	1.14	1	0.14	EFISIEN
7	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa	100.04	99.23	1.01	1	0.01	EFISIEN
8	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan (UPT)	100.00	99.39	1.01	1	0.01	EFISIEN
9	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah PJAS (Sekolah)	100.00	98.51	1.02	1	0.02	EFISIEN
10	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan (jenis keputusan)	118.18	99.89	1.18	1	0.18	EFISIEN



No	Kegiatan/Output	Capaian Volume (%)	Capaian Anggaran (%)	IE	SE	TE	KATEGORI
a	b	c	d	e=c/d	f	g=e-f	h
11	KIE Obat dan Makanan Aman (KIE)	122.92	97.88	1.26	1	0.26	EFISIEN
12	Desa Pangan Aman (desa)	100.00	99.37	1.01	1	0.01	EFISIEN
13	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	100.00	97.44	1.03	1	0.03	EFISIEN
14	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	100.00	99.82	1.00	1	0.00	EFISIEN
15	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	100.00	99.35	1.01	1	0.01	EFISIEN
16	Layanan Perkantoran (Layanan)	100.00	94.57	1.06	1	0.06	EFISIEN
TINGKAT EFISIENSI		105.00	97,68	1.07	1	0.07	EFISIEN

Pada tahun 2020, BBPOM di Bandung melaksanakan 16 (enam belas) kegiatan dan seluruh kegiatan tersebut efektif. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah KIE Obat dan Makanan Aman (KIE) (TE=0,26) dan Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan (TE=0,14). Sedangkan nilai TE terendah adalah Layanan Sarana dan Prasarana Internal (TE=-0,00). Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung terlaksana secara efisien.

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.





BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.2 SARAN

4.1

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020 mengukur pencapaian kinerja tahun 2020 berdasarkan target pada Penetapan Kinerja Tahun 2020. Pada tahun ini merupakan awal tahun Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2020-2024. Berikut hasil pencapaian sasaran kegiatan pada tahun 2020, yaitu:

1. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2020 sebanyak 11 (sebelas) sasaran kegiatan. Dari sasaran kegiatan tersebut telah diukur berdasarkan 28 (dua puluh delapan) indikator sasaran kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kriteria **Sangat Baik**, 9 (sembilan) sasaran kegiatan dengan kriteria **Baik**, dan 1 (satu) sasaran kegiatan dengan kriteria **Cukup**.
2. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

Seluruh sasaran kegiatan dapat dicapai dengan kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa dari *stakeholders perspective* Balai Besar POM di Bandung sudah dapat menunjukkan kinerja yang baik.

- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama sebesar 104% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.
- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedua sebesar 94% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Bandung.
- ☪ Capaian kinerja sasaran kegiatan ketiga sebesar 104% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung.



INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Seluruh sasaran kegiatan dapat dicapai dengan kriteria baik, kecuali untuk sasaran kegiatan meningkatkan efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

- ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan keempat sebesar 105% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik.
- ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan kelima sebesar 101% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatnya efektifitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung
- ☰ Capaian kinerja sasaran strategis keenam sebesar 109% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan.
- ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan ketujuh sebesar 84% dengan kriteria Cukup, ini menunjukkan Balai Besar POM di Bandung perlu upaya dalam meningkatkan efektifitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan.

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

Seluruh sasaran kegiatan dapat dicapai dengan kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa dari *Learning and Growth perspective* Balai Besar POM di Bandung sudah dapat menunjukkan kinerja yang baik.

- ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan sebesar 94% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang optimal.
- ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesembilan sebesar 105% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan SDM yang berkinerja optimal.
- ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesepuluh sebesar 113% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam menguatkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.
- ☰ Capaian kinerja sasaran kegiatan kesebelas sebesar 106% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung mengelola keuangan secara akuntabel.



3. Efisiensi kegiatan yang dicapai oleh Balai Besar POM di Bandung, seluruhnya menunjukkan hasil yang efisien dengan tingkat efisiensi berkisar antara 0,00 – 0,26. Sebanyak 16 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan seluruh kegiatan tersebut efektif, Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah KIE Obat dan Makanan Aman (KIE) (TE=0,26) dan Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan (TE=0,14). Sedangkan nilai TE terendah adalah Layanan Sarana dan Prasarana Internal (TE=0,00).

4.2

SARAN

Untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan dalam kondisi new normal serta sumber daya yang terbatas maka perlu langkah-langkah strategi yang tepat serta inovasi. Capaian sasaran strategis pada tahun 2020 merupakan dasar untuk menetapkan strategi dan inovasi pada tahun selanjutnya. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh UPT di wilayah kerja Provinsi Jawa Barat, antara lain :

1. Koordinasi dengan lintas sektor sehingga inpres No. 3 tahun 2018 tentang peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan dengan baik melalui pemantapan jaringan pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Menjalin kerjasama dengan *stake holder* terkait, sehingga instansi yang berkomitmen dalam pengawasan Obat dan Makanan lebih banyak lagi. Selain itu program atau kegiatan yang merupakan tanggungjawab dari pemangku kepentingan didorong agar dilaksanakan secara mandiri sehingga kerjasama/kemitraan berjalan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Mengupayakan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dengan melakukan berbagai inovasi yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pelayanan prima.
4. Melakukan penyesuaian dalam metode pengawasan pre market, post market dan penyidikan yaitu dengan menggunakan teknologi dan melakukan inovasi berbasis teknologi.
5. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terus menerus serta berkesinambungan.





LAMPIRAN

- 1. RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020-2024**
- 2. RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020**
- 3. PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020**
- 4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020**
- 5. PENGUKURAN KINERJA SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020**
- 6. TINGKAT EFISIENSI SASARAN KEGIATAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020**
- 7. TINGKAT EFISIENSI KEGIATAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020**

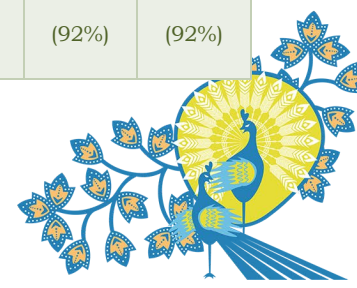
LAMPIRAN 1
RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDER PERSPECTIVE						
SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3
	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	91	92	93	94
	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78
SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72	75	78	81	83
SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	85	86	87,5	89
	7. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	74	77	80	83
	8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5	90,5	91	91,5	92
INTERNAL PERSPECTIVE						
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
	10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9	63,9	70,9	78	85
	11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	88	91	94	97



**LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2020**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
	12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	55	60	65	70
	13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	78	80	81	82
	14. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7	3,75	3,81	4,16	4,51
SK5. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	73	77	80	83
	16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	42	62	82	104
	17. Jumlah desa pangan aman	9	19	28	37	47
	18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4	8	13	18	23
SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	85	88	91	94
	20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82	84	86	88	90
SK7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	78	82	86	90
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE						
SK8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Bandung	91	92	93	94	95
	23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81	85	90	91	92
SK9. Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75	77	80	82	85
SK10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	79	81	85	90
	26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51	2	2,26	2,5	3
SK11. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93	94	95	96	97
	28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)



LAMPIRAN 2
RENCANA KINERJA TAHUNAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2020



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR. HK.02.02.103.1031.06.20.1060A

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG NOMOR. HK.02.02.1031.12.19.3866 TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TAHUN 2020

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.03.103.05.20.1124A tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024, dipandang perlu untuk menetapkan Perubahan atas Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor. HK.02.02.1031.12.19.3866 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia





BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

- Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
 11. Keputusan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.03.103.05.20.1124A tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024.
 12. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
 13. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 14. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
 15. Keputusan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.03.103.05.20.1124A tahun 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG NOMOR. HK.02.02.1031.12.19.3866 TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2020.



**LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2020**



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

- KESATU : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2020.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 01 Juni 2020
Kepala Balai Besar POM di Bandung



Hardaningsih



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

LAMPIRAN
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
NOMOR. HK.02.02.1031.12.19.3866
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2020

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83
		7. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
		14. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7



**LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2020**



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,43
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		17. Jumlah desa pangan aman	6
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82
		20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Bandung	91
		23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76
		26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)



LAMPIRAN 3
PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2020



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171
Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546
Email : bpom_bandung@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hardaningsih, Apt, MHSM.
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 02 Juni 2020

Pihak Kedua	Pihak Pertama
	
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Dra. Hardaningsih, Apt, MHSM.



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	72
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83
		7. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung	88,5
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	14. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung	3,7
		15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,43
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16
		17. Jumlah desa pangan aman	6
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2



**LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2020**



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82
		20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di Bandung	91
		23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung	81
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung	75
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76
		26. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal	1,51
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	93
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)

Kegiatan :

1. Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia

Anggaran

Rp. 47.101.471.000

Bandung, 02 Juni 2020

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Dra. Hardaningsih, Apt, MHSM.



LAMPIRAN 4
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2020



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

RENCANA AKSI PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	80,8	80,8	80,8	542.172.000
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78	78	78	175.693.000
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	90	90	90	186.500.000
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	72	72	72	43.345.000
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				72	250.000.000
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				83	63.030.000
		7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				71	12.360.000
		8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Bandung				88,5	118.060.000
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandung	9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	87	87	113.270.000
		10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,9	56,9	56,9	56,9	141.139.000
		11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	85	85	485.921.000
		12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	50	50	50	636.240.000
		13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76	76	76	76	1.274.680.000
		14. Indeks pelayanan publik BBPOM di Bandung				3,7	226.040.000
5.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan		87,43	87,43	87,43	3.744.645.000
		16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Progress 20%	Progress 20%	Progress 50%	16	377.215.000
		17. Jumlah desa pangan aman	Progress 20%	Progress 65%	Progress 85%	6	685.850.000



**LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2020**



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

Jl. Pasteur No. 25 Bandung 40171

Telp. : 022 4230546, 4213152, 4266620, 4200381, 4200382 Fax. : 022 4230546

Email : bpom_bandung@pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (Rp)
			B03	B06	B09	B12	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Progress 25%	Progress 60%	Progress 90%	2	167.885.000
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	19. Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	17,5	37,5	60	82	692.434.000
		20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	22,5	42,5	65	82	429.280.000
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	21. Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	48	60	68	74	1.159.575.000
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandung yang optimal	22. Indeks RB BBPOM di bandung				91	206.364.000
		23. Nilai AKIP BBPOM di Bandung				81	1.857.087.000
9.	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandung yang berkinerja optimal	24. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandung				75	137.199.000
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan	25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				76	2.995.283.000
		26. Persentase pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandung yang optimal		1,51	1,51	1,51	460.000.000
11.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	27. Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandung	45	55	75	93	5.674.733.000
		28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Bandung	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	Efisien (92%)	24.245.471.000

Bandung, 02 Juni 2020

Pihak Pertama

Dra. Hardaningsih, Apt, MHSM.



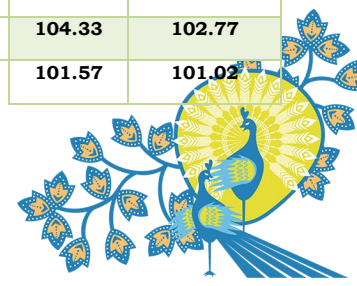
LAMPIRAN 5
PENGUKURAN KINERJA SASARAN KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian		
			Tahun 2020						
			Pembilang	Penyebut	Realisasi				
Stakeholder Perspective									
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.80%	1929	1976	97.62%	120.82	120.00
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.00%	470	612	76.80%	98.46	98.46
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.00%	514	544	94.49%	104.99	104.98
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.00%	271	403	67.25%	93.40	93.40
NPS SK 1						104.42	104.21		
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	72	-	-	67.35	93.54	93.54
NPS SK 2						93.54	93.54		
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	-	-	90.82	109.42	109.42
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	-	-	75.43	106.24	106.24
		8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88.5	-	-	85.91	97.07	97.07
NPS SK 3						104.24	104.24		
Capaian Perspective stakeholder						100.73	100.67		
Internal Process Perspective									
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87			96.85	111.32	111.32
		10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56.9			51.89	91.20	91.20
		11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00%	2020	2335	86.51%	101.78	101.78
		12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50.00%	232	410	56.59%	113.18	113.18



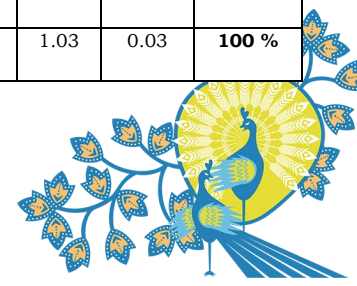
LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target	Realisasi			Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian		
			Tahun 2020						
			Pembilang	Penyebut	Realisasi				
	13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00%	1109	1505	73.69%	96.96	96.96	
	14	Indeks Pelayanan Publik	3.7	-	-	4.20	113.51	113.51	
						NPS SK 4	104.66	104.66	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.43%	-	-	90.70%	103.74	103.74
		16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16			16.00	100.00	100.00
		17	Jumlah desa pangan aman	6			6	100.00	100.00
		18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2			2	100.00	100.00
						NPS SK 5	100.94	100.94	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82.00%			89.75%	109.45	109.45
		20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82.00%	-	-	88.60%	108.05	108.05
						NPS SK 6	108.75	108.75	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74.00%	-	-	62.33%	84.23	84.23
								NPS SK 7	84.23
						Capaian Internal Process Perspective	99.65	99.65	
Learning & Growth Perspective									
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	22	Indeks RB UPT	91	-	-	80.15	88.08	88.08
		23	Nilai AKIP UPT	81	-	-	80.54	99.43	99.43
						NPS SK 8	93.76	93.76	
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	24	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	-	-	78.58	104.77	104.77
								NPS SK 9	104.77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76	-	-	71.50	94.08	94.08
		26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1.51	-	-	2.00	132.45	120.00
						NPS SK 10	113.27	107.04	
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	-	-	95.14	102.30	102.30
		28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92.00%			100.00%	108.70	108.70
						NPS SK 11	105.50	105.50	
						Capaian Learning & Growth Perspective	104.33	102.77	
						NPS TOTAL	101.57	101.02	



LAMPIRAN 6
TINGKAT EFISIENSI SASARAN KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2020

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.80%	97.62%	120.82	592,018,000	584,109,818	98.66	1.22	0.22	95 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78.00%	76.80%	98.46	139,951,000	139,717,598	99.83	0.99	-0.01	75 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.00%	94.49%	104.99	176,451,000	174,922,857	99.13	1.06	0.06	100 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72.00%	67.25%	93.40	35,695,000	33,763,840	94.59	0.99	-0.01	75 %
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	72	67.35	93.54	327,870,000	324,321,258	98.92	0.95	-0.05	75 %
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	90.82	109.42	106,110,000	104,060,000	98.07	1.12	0.12	100 %
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	75.43	106.24	12,114,000	10,860,000	89.65	1.19	0.19	100 %
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88.5	85.91	97.07	109,848,000	109,625,665	99.80	0.97	-0.03	75 %
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87.00%	96.85%	111.32	123,342,000	117,634,376	95.37	1.17	0.17	100 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56.90%	51.89%	91.20	162,739,000	155,002,700	95.25	0.96	-0.04	75 %
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85.00%	86.51%	101.78	514,520,000	513,990,000	99.90	1.02	0.02	100 %
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50.00%	56.59%	113.18	435,180,000	433,526,000	99.62	1.14	0.14	100 %
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	76.00%	73.69%	96.96	912,520,000	908,721,000	99.58	0.97	-0.03	75 %
14	Indeks Pelayanan Publik	3.7	4.2	113.51	109,115,000	105,429,200	96.62	1.17	0.17	100 %
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.43	90.70	103.74	5,116,471,000	5,011,467,639	97.95	1.06	0.06	100 %
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16	16	100.00	292,995,000	288,630,000	98.51	1.02	0.02	100 %
17	Jumlah desa pangan aman	6	6	100.00	624,130,000	620,228,024	99.37	1.01	0.01	100 %
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2	2	100.00	105,715,000	103,005,896	97.44	1.03	0.03	100 %



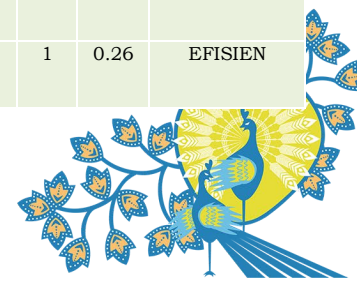
LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82.00%	89.75%	109.45	703,902,000	702,053,740	99.74	1.10	0.10	100 %
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82.00%	88.60%	108.05	437,790,000	436,428,415	99.69	1.08	0.08	100 %
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74.00%	62.33%	84.23	1,005,055,000	974,136,900	96.92	0.87	-0.13	75 %
22	Indeks RB UPT	91	80.15	88.08	325,195,000	325,113,704	99.98	0.88	-0.12	75 %
23	Nilai AKIP UPT	81	80.54	99.43	1,662,407,000	1,651,655,703	99.35	1.00	0.00	100 %
24	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75	78.58	104.77	88,201,000	85,441,000	96.87	1.08	0.08	100 %
25	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76.00%	71.50%	94.08	2,995,283,000	2,956,662,809	98.71	0.95	-0.05	75 %
26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1.51	2	132.45	1,139,422,000	1,137,386,800	99.82	1.33	0.33	95 %
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	95.14	102.30	5,674,733,000	5,366,684,508	94.57	1.08	0.08	100 %
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92.00%	100.00%	108.70	24,045,471,000	23,124,672,238	96.17	1.13	0.13	100 %
TOTAL				103.11	47,974,243,000	46,499,251,688	96.93	1.06	0.06	100 %



LAMPIRAN 7
TINGKAT EFISIENSI KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2020

No	Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran			IE	SE	TE	KATEGORI
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)				
a	b	c	d	$e=(d/cx100)$	f	g	$h=(g/fx100)$	$i=e/h$	j	k	l
1	Sampel Makanan yang Diperiksa	1015	1015	100.00	613,436,000	609,909,853	99.43	1.01	1	0.01	EFISIEN
2	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	415	417	100.48	558,522,000	551,160,376	98.68	1.02	1	0.02	EFISIEN
3	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	1425	1480	103.86	1,075,259,000	1,063,723,700	98.93	1.05	1	0.05	EFISIEN
4	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan Obat dan Makanan	4	5	125.00	124,405,000	123,483,950	99.26	1.26	1	0.26	EFISIEN
5	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Good Laboratory Practice (laboratorium)	1	1	100.00	2,995,283,000	2,956,662,809	98.71	1.01	1	0.01	EFISIEN
6	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Jawa Barat	10	11	110.00	880,650,000	850,652,950	96.59	1.14	1	0.14	EFISIEN
7	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa	2519	2520	100.04	1,472,371,000	1,461,086,415	99.23	1.01	1	0.01	EFISIEN
8	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan (UPT)	2	2	100.00	315,920,000	314,005,508	99.39	1.01	1	0.01	EFISIEN
9	Sekolah yang Diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah PJAS (Sekolah)	16	16	100.00	292,995,000	288,630,000	98.51	1.02	1	0.02	EFISIEN
10	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan (jenis keputusan)	11	13	118.18	624,368,000	623,705,665	99.89	1.18	1	0.18	EFISIEN
11	KIE Obat dan Makanan Aman (KIE)	96	118	122.92	5,355,760,000	5,242,132,589	97.88	1.26	1	0.26	EFISIEN



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

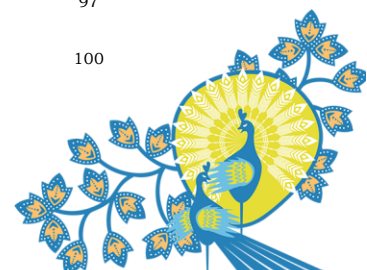
No	Kegiatan/ Output	Volume			Anggaran			IE	SE	TE	KATEGORI
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)				
a	b	c	d	$e=(d/cx100)$	f	g	$h=(g/fx100)$	$i=e/h$	j	k	l
12	Desa Pangan Aman (desa)	6	6	100.00	624,130,000	620,228,024	99.37	1.01	1	0.01	EFISIEN
13	Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	2	2	100.00	105,715,000	103,005,896	97.44	1.03	1	0.03	EFISIEN
14	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	1	1	100.00	1,139,422,000	1,137,386,800	99.82	1.00	1	0.00	EFISIEN
15	Layanan Dukungan Manajemen Satker (Layanan)	1	1	100.00	2,075,803,000	2,062,210,407	99.35	1.01	1	0.01	EFISIEN
16	Layanan Perkantoran (Layanan)	1	1	100.00	5,674,733,000	5,366,684,508	94.57	1.06	1	0.06	EFISIEN



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
TABEL 1.1	UNIT PELAKSANA TEKNIS BPOM PROVINSI JAWA BARAT	3
TABEL 2.1	SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET BBPOM DI BANDUNG TAHUN 2020-2024	20
TABEL 2.2	RENCANA KINERJA TAHUNAN BBPOM DI BANDUNG TAHUN 2020	23
TABEL 2.3	PERJANJIAN KINERJA BBPOM DI BANDUNG TAHUN 2020	24
TABEL 2.4	RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2020	26
TABEL 2.5	KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA	29
TABEL 3.1	CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2020	30
TABEL 3.2	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN PERSENTASE CAPAIAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020	31
TABEL 3.3	NILAI KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN PERSPECTIVE BALANCE SCORE CARD TAHUN 2020	34
TABEL 3.4	CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1 TAHUN 2020	35
TABEL 3.5	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT" TAHUN 2020	36
TABEL 3.6	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT" TAHUN 2020	43
TABEL 3.7	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN" TAHUN 2020	49
TABEL 3.8	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN" TAHUN 2020	55
TABEL 3.9	PARAMETER UJI SAMPEL TMS	57
TABEL 3.10	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-2 TAHUN 2020	61
TABEL 3.11	KATEGORI INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU	62
TABEL 3.12	HASIL SURVEY INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU	62
TABEL 3.13	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE 3 TAHUN 2020	66
TABEL 3.14	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN" TAHUN 2020	67
TABEL 3.15	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN" TAHUN 2020	71
TABEL 3.16	NILAI KONVERSI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM	76
TABEL 3.17	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM" TAHUN 2020	76
TABEL 3.18	PENILAIAN "INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM" PER JENIS DAN UNSUR PELAYANAN TAHUN 2020	77
TABEL 3.19	PERBANDINGAN PENILAIAN "INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM" PER UNSUR PELAYANAN TAHUN 2019 DAN 2020	78
TABEL 3.20	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-4 TAHUN 2020	81
TABEL 3.21	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN" TAHUN 2020	82
TABEL 3.22	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN" TAHUN 2020	85
TABEL 3.23	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU" TAHUN 2020	89
TABEL 3.24	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN" TAHUN 2020	97
TABEL 3.25	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN" TAHUN 2020	100



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020

TABEL		HALAMAN
TABEL 3.26	KATEGORI NILAI KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK	103
TABEL 3.27	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG" TAHUN 2020	104
TABEL 3.28	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-5 TAHUN 2020	108
TABEL 3.29	KATEGORI PENILAIAN "TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN" TAHUN 2020	110
TABEL 3.30	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN" 2020	110
TABEL 3.31	REALISASI "TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN" TAHUN 2020	111
TABEL 3.32	LAYANAN INFORMASI TAHUN 2020	112
TABEL 3.33	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN" TAHUN 2020	119
TABEL 3.34	PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN PJAS TAHUN 2020	120
TABEL 3.35	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "JUMLAH DESA PANGAN AMAN" TAHUN 2020	124
TABEL 3.36	PROGRESS PELAKSANAAN DESA PANGAN AMAN TAHUN 2020	124
TABEL 3.37	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA" TAHUN 2020	129
TABEL 3.38	PROGRESS PELAKSANAAN KEGIATAN PANGAN AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA TAHUN 2020	130
TABEL 3.39	CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6 TAHUN 2020	134
TABEL 3.40	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR" TAHUN 2020	135
TABEL 3.41	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR" TAHUN 2020	140
TABEL 3.42	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-7 TAHUN 2020	145
TABEL 3.43	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN" TAHUN 2020	150
TABEL 3.44	RINCIAN NILAI KEEKONOMIAN BARANG BUKTI YANG DITANGANI	151
TABEL 3.45	PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENINDAKAN	152
TABEL 3.46	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-8 TAHUN 2020	155
TABEL 3.47	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG" TAHUN 2020	156
TABEL 3.48	HASIL EVALUASI "INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG" TAHUN 2020	156
TABEL 3.49	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "INDEKS AKIP BBPOM DI BANDUNG" TAHUN 2020	165
TABEL 3.50	PENILAIAN SAKIP BBPOM DI BANDUNG TAHUN 2020	166
TABEL 3.51	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-9 TAHUN 2020	172
TABEL 3.52	PENILAIAN "INDEKS PROFESIONALITAS ASN" TAHUN 2020	173
TABEL 3.53	CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-10 TAHUN 2020	176
TABEL 3.54	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP" TAHUN 2020	178
TABEL 3.55	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL" TAHUN 2020	185
TABEL 3.56	CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS KE-11 TAHUN 2020	189
TABEL 3.57	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG" TAHUN 2020	190
TABEL 3.58	NILAI EKA DAN IKPA BBPOM DI BANDUNG TAHUN 2020	191
TABEL 3.59	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR "TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG" TAHUN 2020	195
TABEL 3.60	REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG TAHUN 2020	199
TABEL 3.61	ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	199
TABEL 3.62	REALISASI ANGGARAN PERSASARAN KEGIATAN BERDASARKAN PERSPECTIVE	202
TABEL 3.63	PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	204
TABEL 3.64	PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI BERDASARKAN KEGIATAN/OUTPUT	205



DAFTAR GRAFIK

GRAFIK		HALAMAN
GRAFIK 3.1	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN "PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT" TAHUN 2020	37
GRAFIK 3.2	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA "PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT" TAHUN 2019 DAN 2020	37
GRAFIK 3.3	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 "PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT"	38
GRAFIK 3.4	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN TERHADAP TARGET NASIONAL "PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT"	39
GRAFIK 3.5	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN "PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT" TAHUN 2020	43
GRAFIK 3.6	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA "PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT" TAHUN 2019 DAN 2020	44
GRAFIK 3.7	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 "PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT"	44
GRAFIK 3.8	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN "PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT"	45
GRAFIK 3.9	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN "PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN" TAHUN 2020	50
GRAFIK 3.10	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA "PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN" TAHUN 2019 DAN 2020	50
GRAFIK 3.11	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 "PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN"	51
GRAFIK 3.12	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN "PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN"	51
GRAFIK 3.13	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN "PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN" TAHUN 2020	55
GRAFIK 3.14	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA "PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN" TAHUN 2019 DAN 2020	55
GRAFIK 3.15	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 "PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN"	56
GRAFIK 3.16	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN "PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN"	56
GRAFIK 3.17	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN "INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU" TAHUN 2020	62
GRAFIK 3.18	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA "INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU" TAHUN 2019 DAN 2020	63
GRAFIK 3.19	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 "INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU"	63
GRAFIK 3.20	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN "INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU"	64
GRAFIK 3.21	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN "INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN" TAHUN 2020	67
GRAFIK 3.22	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 "INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN"	68
GRAFIK 3.23	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN "INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN"	68
GRAFIK 3.24	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN "INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN" TAHUN 2020	72





GRAFIK		HALAMAN
GRAFIK 3.25	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 "INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN"	72
GRAFIK 3.26	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN "INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN"	73
GRAFIK 3.27	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN "INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM" TAHUN 2020	77
GRAFIK 3.28	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA "INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM" TAHUN 2019 DAN 2020	77
GRAFIK 3.29	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 "INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM"	79
GRAFIK 3.30	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN "PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN" TAHUN 2020	82
GRAFIK 3.31	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 "PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN"	83
GRAFIK 3.32	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN "PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN"	84
GRAFIK 3.33	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN "PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN" TAHUN 2020	86
GRAFIK 3.34	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA "PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN" TAHUN 2019 DAN 2020	86
GRAFIK 3.35	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 "PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN"	87
GRAFIK 3.36	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN "PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN"	87
GRAFIK 3.37	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN "PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2020	89
GRAFIK 3.38	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN "PERSENTASE PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU TAHUN 2020	89
GRAFIK 3.39	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 "PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU"	90
GRAFIK 3.40	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA "PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU" TAHUN 2019 DAN 2020	90
GRAFIK 3.41	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA "PERSENTASE PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU" TAHUN 2019 DAN 2020	91
GRAFIK 3.42	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN "PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU"	91
GRAFIK 3.43	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN "PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN" TAHUN 2020	97
GRAFIK 3.44	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA "PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN" TAHUN 2019 DAN 2020	97
GRAFIK 3.45	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 "PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN"	98
GRAFIK 3.46	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN "PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN"	98
GRAFIK 3.47	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN "PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN" TAHUN 2020	100
GRAFIK 3.48	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA "PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN" TAHUN 2019 DAN 2020	101
GRAFIK 3.49	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 "PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN"	101



GRAFIK		HALAMAN
GRAFIK 3.50	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN “PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN”	102
GRAFIK 3.51	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN “INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG” TAHUN 2020	104
GRAFIK 3.52	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA “INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG” TAHUN 2019 DAN 2020	105
GRAFIK 3.53	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 “INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG”	105
GRAFIK 3.54	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN “INDEKS PELAYANAN PUBLIK BBPOM DI BANDUNG”	106
GRAFIK 3.55	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN “TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN” TAHUN 2020	110
GRAFIK 3.56	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 “TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”	111
GRAFIK 3.57	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN “TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN”	112
GRAFIK 3.58	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN “JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN” TAHUN 2020	119
GRAFIK 3.59	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 “JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN”	121
GRAFIK 3.60	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN “JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN”	121
GRAFIK 3.61	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN “JUMLAH DESA PANGAN AMAN” TAHUN 2020	124
GRAFIK 3.62	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 “JUMLAH DESA PANGAN AMAN”	125
GRAFIK 3.63	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN “JUMLAH DESA PANGAN AMAN”	126
GRAFIK 3.64	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN “JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA” TAHUN 2020	130
GRAFIK 3.65	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 “JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA”	131
GRAFIK 3.66	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN “JUMLAH PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA”	131
GRAFIK 3.67	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN “PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR” TAHUN 2020	135
GRAFIK 3.68	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 “PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR”	136
GRAFIK 3.69	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN “PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR”	136
GRAFIK 3.70	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN “PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR” TAHUN 2020	140
GRAFIK 3.71	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 “PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR”	141
GRAFIK 3.72	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN “PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR”	141
GRAFIK 3.73	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN “PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN” TAHUN 2020	146
GRAFIK 3.74	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN “PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR”	147
GRAFIK 3.75	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 “PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN”	147
GRAFIK 3.76	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN “INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG” TAHUN 2020	157
GRAFIK 3.77	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 “INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG”	157
GRAFIK 3.78	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN “INDEKS RB BBPOM DI BANDUNG”	158
GRAFIK 3.79	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN “INDEKS AKIP BBPOM DI BANDUNG” TAHUN 2020	165
GRAFIK 3.80	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DAN 2020 “INDEKS AKIP BBPOM DI BANDUNG”	166





GRAFIK		HALAMAN
GRAFIK 3.81	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 “NILAI AKIP BBPOM DI BANDUNG”	166
GRAFIK 3.82	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN “INDEKS PROFESIONAL ASN BBPOM DI BANDUNG” TAHUN 2020	167
GRAFIK 3.83	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN “INDEKS PROFESIONAL ASN BBPOM DI BANDUNG” TAHUN 2020	173
GRAFIK 3.84	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 “INDEKS PROFESIONAL ASN BBPOM DI BANDUNG”	174
GRAFIK 3.85	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN “INDEKS PROFESIONAL ASN BBPOM DI BANDUNG”	174
GRAFIK 3.86	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN “PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP”TAHUN 2020	178
GRAFIK 3.87	PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DAN 2020 “PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP”	179
GRAFIK 3.88	“PERBANDINGAN PARAMETER PENILAIAN KEMAMPUAN LABORATORIUM BBPOM DI BANDUNG” TAHUN 2020	179
GRAFIK 3.89	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 “PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP”	180
GRAFIK 3.90	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN “PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP”	180
GRAFIK 3.91	“PERBANDINGAN PARAMETER PENILAIAN KEMAMPUAN LABORATORIUM” TAHUN 2020	180
GRAFIK 3.92	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN “INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL” TAHUN 2020	186
GRAFIK 3.93	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 “INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI BANDUNG YANG OPTIMAL”	186
GRAFIK 3.94	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN “INDEKS PROFESIONAL ASN BBPOM DI BANDUNG”	187
GRAFIK 3.95	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN “NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG” TAHUN 2020	191
GRAFIK 3.96	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 “NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG”	192
GRAFIK 3.97	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN “NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG”	192
GRAFIK 3.98	PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN “TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG” TAHUN 2020	195
GRAFIK 3.99	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 TERHADAP TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024 “TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG”	196
GRAFIK 3.100	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2020 DENGAN BALAI BESAR POM LAIN “TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN BBPOM DI BANDUNG”	196





DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		HALAMAN
GAMBAR 1.1	STRUKTUR ORGANISASI BBPOM DI BANDUNG	5
GAMBAR 1.2	STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM	5
GAMBAR 2.1	MISI BALAI BESAR POM DI BANDUNG 2020-2024	19
GAMBAR 2.2	PETA STRATEGI LEVEL II BALAI BESAR POM DI BANDUNG	20
GAMBAR 3.1	KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)	41
GAMBAR 3.2	PENGAWASAN SARANA INDUSTRI PANGAN OLAHAN	47
GAMBAR 3.3	BIMTEK E REGISTRASI PANGAN OLAHAN	48
GAMBAR 3.4	PENGAWASAN SARANA DISTRIBUSI DAN SARANA PELAYANAN KEFARMASIAN	53
GAMBAR 3.5	BIMBINGAN TEKNIS PELAKU USAHA GARAM	59
GAMBAR 3.6	KEGIATAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH	59
GAMBAR 3.7	KEGIATAN DESA PANGAN AMAN	59
GAMBAR 3.8	KEGIATAN PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	60
GAMBAR 3.9	LAYANAN INFORMASI	69
GAMBAR 3.10	BIMBINGAN TEKNIS CPPOB	70
GAMBAR 3.11	DESK CAPA	70
GAMBAR 3.12	LAYANAN INFORMASI	74
GAMBAR 3.13	BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PELAKU USAHA	74
GAMBAR 3.14	INSPEKSI TERHADAP SARANA	75
GAMBAR 3.15	KEGIATAN KIE	75
GAMBAR 3.16	KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK	80
GAMBAR 3.17	SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	80
GAMBAR 3.18	MEDIA KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)	116
GAMBAR 3.19	KIE MELALUI IG LIVE	116
GAMBAR 3.20	KIE MELALUI RADIO DAN MEDIA CETAK	117
GAMBAR 3.21	KEGIATAN WEBINAR KEAMANAN PANGAN	117
GAMBAR 3.22	WEBINAR BEKERJASAMA DENGAN STAKEHOLDER	117
GAMBAR 3.23	KIE DENGAN TOKOH MASYARAKAT	118
GAMBAR 3.24	WEBINAR BERKERJASAMA DENGAN STAKEHOLDER	118
GAMBAR 3.25	AUDIENSI DAN ADVOKASI DENGAN LINTAS SEKTOR	123
GAMBAR 3.26	KEGIATAN BIMTEK KEAMANAN PANGAN DAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN	123
GAMBAR 3.27	AUDIENSI DAN ADVOKASI DENGAN LINTAS SEKTOR	128
GAMBAR 3.28	BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN	128
GAMBAR 3.29	BIMTEK KOMUNITAS DESA DAN PELAKU USAHA PANGAN DESA	128
GAMBAR 3.30	KEGIATAN FASILITASI KEAMANAN PANGAN	128
GAMBAR 3.31	WORKSHOP MONEV KEAMANAN PANGAN	129
GAMBAR 3.32	AUDIENSI DAN ADVOKASI DENGAN LINTAS SEKTOR	133
GAMBAR 3.33	KEGIATAN BIMTEK PETUGAS PASAR	133
GAMBAR 3.34	BIMBINGAN TEKNIS INTERNAL LABORATORIUM	138
GAMBAR 3.35	MONEV KEGIATAN	138
GAMBAR 3.36	BIMBINGAN TEKNIS LABORATORIUM PANGAN	143
GAMBAR 3.37	MONEV KINERJA BULANAN	144
GAMBAR 3.38	PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN	150
GAMBAR 3.39	PEMUSNAHAN BARANG BUKTI	151
GAMBAR 3.40	KOORDINASI DAN SINERGISME ICJS	153
GAMBAR 3.41	BIMTEK PENYUSUAN LAPKIN TAHUN 2020	169
GAMBAR 3.42	RAPAT MONEV KINERJA BULANAN	169
GAMBAR 3.43	BIMBINGAN TEKNIS INTERNAL LABORATORIUM	183
GAMBAR 3.44	MONEV KEGIATAN	184
GAMBAR 3.45	SOSIALISASI KEUANGAN	194





 bandung.pom.go.id

 BPOMBandung

 @bpombandung

 @BPOMBandung

 BalaiBesarPOMdiBandung



 **KABAYAN**
Ho Balai Melayani
08112440533

